

# POLITICA

DINAMIKA MASALAH POLITIK DALAM NEGERI & HUBUNGAN INTERNASIONAL

VOL. 10 NO.1, MEI 2019

Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menjangkau gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jurnal Politica diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, dua kali dalam setahun, yaitu bulan Mei dan November. Redaksi mengundang para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk memberikan tulisannya.

- ❁ **Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber**  
*Jerry Indrawan*
- ❁ **Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik**  
*Efriza*
- ❁ **Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province: Cooperation between West Java, Indonesia and South Australia**  
*Andriani Florencia Dharmajaya, Anggara Raharjo*
- ❁ **Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)**  
*Septyanto Galan Prakoso, Nadia Dian Ardita, Andriyansyah Perdana Muryantoro*
- ❁ **Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional**  
*Aji Widiatmaja, Ulul Albab*

|     |        |      |           |                  |                |
|-----|--------|------|-----------|------------------|----------------|
| POL | Vol.10 | No.1 | Hal. 1-93 | Jakarta Mei 2019 | ISSN 2087-7900 |
|-----|--------|------|-----------|------------------|----------------|



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Diterbitkan Oleh:  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| Catatan Redaksi.....   | iii   |
| • <i>Cyberpolitics</i> sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber<br>oleh: Jerry Indrawan.....  | 1-15  |
| • Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik<br>oleh: Efriza .....  | 17-38 |
| • Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation between West Java, Indonesia and South Australia<br>oleh: Andriani Florencia Dharmajaya, Anggara Raharyo.....                           | 39-55 |
| • Analisis Diplomasi <i>Soft Power Denmark</i> Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)<br>oleh: Septyanto Galan Prakoso, Nadia Dian Ardita, Andriyansyah Perdana Murtyantoro ..... | 57-75 |
| • Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional<br>oleh: Aji Widiatmaja, Ulul Albab .....  | 77-93 |



## CATATAN REDAKSI

Jurnal *Politica* Vol 10 No 1 Mei 2019 menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu-isu strategis Indonesia, baik di bidang politik dalam negeri maupun hubungan internasional, baik hasil kajian maupun penelitian.

Artikel pertama berjudul “*Cyberpolitics* sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber” di tulis oleh Jerry Indrawan. Artikel ini membahas tentang penggunaan pendekatan milenial sebagai sarana kampanye yang dicirikan dengan digunakannya media fisik yang diberi nama siber (*Cyber*). Melalui pendekatan ini, terminologi politik mengalami fusi dengan ruang siber sehingga memunculkan istilah baru yang diistilahkan dengan “*cyberpolitics*”. *Cyberpolitics* adalah sebuah terminologi yang dimunculkan untuk merespons adanya interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan terjadi hanya melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan. Secara sederhana, *cyberpolitics* diartikan sebagai politik baru di era milenial yang mengombinasikan ilmu politik dengan perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, memahami *cyberpolitics* lebih dalam membutuhkan perspektif inter-disipliner sehingga ruang lingkupnya menjadi lebih luas. Karenanya, *cyberpolitics* sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut.

Artikel kedua ditulis oleh Efriza dengan judul “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik”. Di dalam analisisnya, penulis berpendapat bahwa lanskap politik suatu negara demokratis adalah partai politik. Karena itu, di negara demokratis seperti Indonesia, partai politik menjadi tulang punggung berjalannya demokrasi dalam berbagai proses politik, baik di lembaga legislatif maupun pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Meskipun partai politik mempunyai posisi penting di era reformasi, namun permasalahan justru banyak ditemukan di partai-partai politik. Artikel ini menemukan fakta bahwa persepsi publik terhadap kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik masih buruk. Partai politik dianggap bertanggung jawab terhadap buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik.

Artikel ketiga berjudul “*Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation Between West Java, Indonesia And South Australia*” ditulis oleh Andriani Florencia Dharmajaya dan Anggara Raharyo. Kedua penulis menjelaskan jika kerja sama antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi telah menjadi salah satu perhatian di studi Hubungan Internasional. Mayoritas peneliti menamakan hal ini sebagai aktivitas paradiplomasi yang berarti kerja sama yang dilakukan oleh aktor sub-nasional untuk mendapatkan manfaat atau mencapai kepentingan nasional. Analisis tulisan ini berfokus pada praktik paradiplomasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Australia Selatan. Dengan memanfaatkan laporan tahunan dari kedua belah pihak sebagai sumber utama, kedua penulis berpendapat bahwa kerja sama dalam bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata serta kebudayaan dan pendidikan masih dalam tahap perkembangan awal, walaupun, beberapa sektor telah menunjukkan perkembangan yang baik, terutama bagi Jawa Barat.

Artikel keempat berjudul “Analisis Diplomasi *Soft Power Denmark* Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)” yang ditulis oleh Septyanto Galan Prakoso, Nadia Dian Ardita, dan Andriyansyah Perdana Murtyantoro. Artikel ini ingin memperlihatkan bahwa pemanasan global merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga menyumbang

terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran terhadap dampak eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan mengakibatkan meningkatnya suhu bumi sehingga membahayakan kehidupan manusia untuk jangka panjang mengingat permukaan air laut yang meningkat akan sangat membahayakan kehidupan manusia yang berada di sekitar pantai. Di samping itu, banyak negara yang terancam tenggelam bila air laut dibiarkan terus meningkat tanpa terkendali. Denmark termasuk negara yang sangat menaruh perhatian terhadap isu pemanasan global. Salah satu langkah yang diambil adalah menggaling kerja sama dengan negara-negara yang telah melakukan kontribusi untuk memperlambat fase pemanasan global. Indonesia dianggap sebagai negara yang telah berupaya menurunkan tingkat emisi karbon. Analisis dalam tulisan ini termasuk terfokus pada kerja sama Denmark dan Indonesia dalam mengatasi masalah lingkungan, dan tindakan apa yang dilakukan pemerintah Denmark untuk mengurangi tingkat polusi di Indonesia.

Artikel kelima dalam jurnal ini ditulis oleh Aji Widiatmaja dan Ulul Albab dengan judul “Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional”. Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan corak kebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung *outward looking* dengan mengedepankan *soft power* dan bercorak *high politics*. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat *inward looking* yang berfokus pada kepentingan nasional. Penulis memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri dengan menggabungkan corak *inward* dan *outward looking* dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Penggabungan itu penting dilakukan agar tercapai kepentingan nasional Indonesia. Secara sederhana, kebijakan *outward looking* digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (*inward looking*). Secara konkret upaya penggabungan itu dicontohkan seperti mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN sebagai *zone of peace, freedom, and neutrality* (ZOPFAN), mencegah masuknya kekuatan asing, menjaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespons perubahan lingkungan strategis.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar dan masukan terhadap semua artikel yang masuk untuk penerbitan Jurnal Politica Vol 10 No 1 Mei 2019. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seksi editor yang telah bekerja keras membantu terselenggaranya penerbitan jurnal ini. Kami mengharapkan terbitnya Jurnal Politica Vol 10 No 1 Mei 2019 dapat membantu memberikan informasi yang berguna bagi kegiatan diskusi maupun penelitian mengenai isu-isu bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional.

Selamat membaca.

Jakarta, Mei 2019  
Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Jerry Indrawan

*Cyberpolitics as A New Perspective In Understanding Politics in The Cyber Era*

*Political science studies have developed from conventional perspectives, marked by the use of physical means of campaign, to the era of non-conventional politics, where the use of cyber medium is more prevalent. The use of cyber medium in the study of political science has resulted in many sectors, from democracy, security, defense, social and cultural affairs, education, to political campaigns to conducted through the cyber medium. Cyberpolitics is a new concept that is very interesting to discuss, as interesting as it is to be studied in detail. Cyberpolitics will be the future of political campaign for all political stakeholders, especially those running in political contests. Political activism has already been replaced by a form of virtual communication. Cyberpolitics can in this regard help democracy work as it should. The aim of this research is to understand cyberpolitics more deeply, and that requires an interdisciplinary perspective, not just political science. The significance of this research is to provide a different perspective to the public about the development of political science, which now moves towards the use of cyber technology. This paper will discuss the study of cyberpolitics, which is seen as a new perspective in understanding politics in the cyber era. The author recommends that studies discussing the concept of cyberpolitics be discussed and researched more intensively among political science scholars, so that the combination of political science and information technology in the future can mutually enrich the scientific understanding of both disciplines.*

*Keywords: Cyberpolitics; Politics in Cyber Era; Cyber Security and Defense.*

Jerry Indrawan

*Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber*

Kajian ilmu politik sudah berkembang dari yang bersifat konvensional, yaitu menggunakan sarana kampanye yang bersifat fisik, menuju ke era politik non-konvensional, yaitu penggunaan medium siber. Penggunaan medium siber dalam kajian ilmu politik membuat banyak sektor, seperti demokrasi, keamanan, pertahanan, sosial dan budaya, pendidikan, sampai kampanye politik, dilakukan melalui medium siber. *Cyberpolitics* menjadi sebuah konsep baru yang sangat menarik untuk dibahas, serta diteliti lebih dalam. *Cyberpolitics* akan menjadi masa depan kampanye politik bagi setiap *stakeholder* politik, terutama bagi mereka yang akan berkontestasi dalam kompetisi pemilihan politik. Aktivisme politik sudah mulai digantikan oleh bentuk komunikasi secara virtual. *Cyberpolitics* dengan demikian dapat membantu demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami *cyberpolitics* secara lebih dalam, sehingga membutuhkan perspektif interdisipliner, tidak hanya ilmu politik. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang berbeda kepada khalayak umum tentang perkembangan ilmu politik, yang sekarang mengarah ke arah penggunaan teknologi siber. Makalah ini akan membahas kajian *cyberpolitics*, yang dilihat sebagai sebuah perspektif baru dalam memahami politik di era siber. Penulis merekomendasikan bahwa kajian-kajian yang membahas tentang konsep *cyberpolitics* mulai lebih banyak dibahas dan diteliti di kalangan akademisi-akademisi ilmu politik, agar perpaduan antara ilmu politik dengan teknologi informasi ke depannya dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan masing-masing.

Kata Kunci: *Cyberpolitics*; Politik di Era Siber; Keamanan dan Pertahanan Siber.

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Efriza

*The Existence Of The Political Parties In Public Perception*

*A democratic country needs political parties. They become the driving force in the implementation of democracy in Indonesia considering the important role that they play in various political processes in the legislature, government, and other state institutions. Given the importance of political parties in Indonesia in the Reform era, it turns out that most problems come from political parties. This paper aims to gain an understanding of the development and role of political parties in the Reform era based on the public perception of the existence of political parties. Based on the objective of the study, the significance of this study can hopefully be elicited, which is to provide an understanding and an input on the development and role of political parties in the Reform era. Results of the study suggests that public perception of the performance of political parties as political infrastructure was still poor and that political parties were also responsible for the poor performance of the political superstructure institutions. Therefore, the researcher recommends that political parties internally need to strengthen party institutionalization, while on the other hand, there needs to be an effort to simplify party systems in Indonesia.*

*Keywords: Political Parties; Democracy; Reform; Public Perception.*

Efriza

Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik

Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab peran penting dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Mengingat pentingnya posisi partai politik di Indonesia pada era reformasi ini, malah ternyata letak permasalahan ada di partai politik. Penulisan ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan dan peran partai politik di era reformasi berdasarkan persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Dari tujuan itu diharapkan dapat dihasilkan kegunaan kajian ini, yakni memberikan pemahaman dan masukan terhadap perkembangan dan peran partai politik di era reformasi ini. Penulisan ini menemukan fakta bahwa persepsi publik atas kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik masih buruk dan partai politik juga dianggap bertanggung jawab atas masih buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik. Oleh karena itu, rekomendasi yang ditawarkan adalah partai politik secara internal perlu melakukan penguatan institusionalisasi partai, di sisi lain perlu adanya upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.

Kata Kunci: Partai Politik; Demokrasi; Reformasi; Persepsi Publik.

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Andriani Florencia Dharmajaya, Anggara Raharyo

Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation between West Java, Indonesia and South Australia

*Cooperation between cities and states/provinces has gained its attention in contemporary global affairs. Most scholars refer to it as para-diplomacy, which can be defined as cooperation between sub-national actors for the benefit or the interest of the national governments. This research focuses on the practice of para-diplomacy between West Java Province of Indonesia and South Australia. It aims to explain the progress of the sister province cooperation out of the renewal of its agreement in 2015 and their progress of cooperation until 2017. This research utilizes annual reports of the cooperation from both sides of the parties to identify the practices and progress of the cooperation. From the analysis, cooperation in agriculture, fisheries, and tourism, including culture and education are still in the developing progress. Nevertheless, several sectors have shown an improvement on the West Java's side.*

*Keywords: Para-diplomacy; West Java; South Australia; Indonesia – Australia; Sister Province.*

Andriani Florencia Dharmajaya, Anggara Raharyo

Desentralisasi Kerja Sama Luar Negeri: Studi Kasus Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Indonesia dan Australia Selatan

Kerja sama antar Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi telah menjadi salah satu perhatian di studi Hubungan Internasional. Mayoritas peneliti menamakan hal ini sebagai aktivitas paradiplomasi yang berarti kerja sama yang dilakukan oleh aktor sub-nasional untuk mendapatkan manfaat atau mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini berfokus pada praktik paradiplomasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Australia Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dari kerja sama provinsi yang telah dilaksanakan dari pembaharuan perjanjian kerja sama pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan dari kedua belah pihak sebagai sumber utama. Dari analisis ini, kerja sama dalam bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata serta kebudayaan dan pendidikan masih dalam tahap perkembangan awal. Walaupun, beberapa sektor telah menunjukkan perkembangan yang baik, terutama bagi Jawa Barat.

Kata Kunci: Paradiplomasi; Jawa Barat; Australia Selatan; Indonesia – Australia; Sister Province.

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Septyanto Galan Prakoso, Nadia Dian Ardita, Andriyansyah Perdana Murtyantoro

*An Analysis of Denmark's Soft Power Diplomacy in Indonesia*

*(A Study on Environmental Management Cooperation in Indonesia)*

*Global warming is one of the key issues of the century. The cause of this particular phenomenon is that most economic activities have been carried out by many countries without due consideration of sustainability and the environment. Due to the lack of awareness of both aspects, the Earth's temperature is getting warmer over the past few years and the long-term effect of such trend is that the sea level has started to rise. Coastal countries start to witness its impacts and some of them have already taken several actions to address this problem. Among the few countries that are determined to take serious measures to address this issue is Denmark. Through its Ministry of Foreign Affairs, Denmark has worked in cooperation/ collaboration with countries that have contributed to this environmental problem in slowing down the phase of global warming by looking directly at its source. In response to this situation, back in November 2017, Denmark's Prime Minister Lars Løkke Rasmussen visited Jakarta to discuss issues of Denmark's interest in Indonesia, especially about environmental issue in Indonesia. The meeting was marked by a commitment of strengthened relations between two countries, and an exchange of gifts between both leaders. This study aims to find out the reasons why Denmark wanted to cooperate with Indonesia in surmounting environmental problems, and what actions the Danish government has taken to decrease the rate of pollution in Indonesia through the adoption of the National Interest concept. Towards the end, this article shows that Denmark has built several green facilities in order to decrease the pollution level, which partially comes from Indonesia.*

*Keywords: Indonesia-Denmark; green diplomacy; cooperation.*

Septyanto Galan Prakoso, Nadia Dian Ardita, Andriyansyah Perdana Murtyantoro

*Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)*

Pemanasan global merupakan isu yang penting pada abad ini. Sumber dari terjadinya fenomena ini adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sebagai akibat dari kurangnya aspek-aspek tersebut menyebabkan meningkatnya temperatur bumi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini kemudian menyebabkan dampak jangka panjang yaitu naiknya permukaan air laut. Negara-negara pesisir mulai merasakan dampak dan melakukan berbagai usaha untuk menghadapi isu lingkungan ini. Denmark menjadi salah satu negara yang berkeinginan untuk mengatasi masalah ini. Melalui Kementerian Luar Negerinya, Denmark telah melakukan kerja sama dengan negara-negara yang menjadi kontributor penyebab masalah lingkungan ini dengan tujuan untuk memperlambat laju pemanasan global. Melihat situasi ini, Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, melakukan kunjungan ke Indonesia pada November 2017. Kunjungan kenegaraan ini bertujuan untuk membahas kepentingan nasional Denmark terhadap Indonesia, khususnya mengenai isu lingkungan hidup. Pertemuan ini ditandai dengan pemberian hadiah diplomatik antara kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Denmark ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan serta tindakan apa yang pemerintah Denmark lakukan dalam mengurangi tingkat polusi di Indonesia dengan menggunakan konsep *National Interest*. Bagian terakhir jurnal ini menunjukkan hasil konkrit kerja sama Indonesia-Denmark yaitu dibangunnya fasilitas-fasilitas yang berorientasi Hijau untuk mengurangi polusi yang sebagian dihasilkan oleh Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia-Denmark; diplomasi hijau; kerja sama.

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Aji Widiatmaja, Ulul Albab

*Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamic*

*Indonesia's foreign policy in the Susilo Bambang Yudhoyono's (SBY) and Joko Widodo's era have their own strengths and weaknesses. SBY's foreign policy tended to be outward-looking, which was marked by promotion of soft power, high politics, and leveraging Indonesia influence in global stage. Meanwhile, Joko Widodo's foreign policy is more inward-looking in that it focuses more on domestic sectors. Problems will arise if a country carries out its foreign policy in an unbalanced manner. Development in the global and regional strategic environment requires a collective response achieved in multilateral forums. This makes cooperation and active participation of a country in international forums become important. This paper aims to analyze Indonesia's foreign policy under SBY and Joko Widodo to find out the strengths and weaknesses of both foreign policies. The author has also provided a foreign policy recommendation that combines both inward and outward-looking perspectives in its performance. They are made in the form of reclaiming Indonesia's leadership in ASEAN to make the region a zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN), preventing foreign powers infiltration, maintaining ASEAN countries sovereignty, and curbing pragmatic and unilateralist actions in response to strategic environmental dynamics. These are important to ensure the achievement of Indonesia's national interests. In simple terms, outward-looking policies are adopted as a tool to achieve national interests that benefit the Indonesian people (inward-looking).*

*Keywords: Foreign policy; inward looking; outward looking; Indonesia leadership; National interest.*

Aji Widiatmaja, Ulul Albab

*Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional*

Kebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung *outward looking* dengan mengedepankan *soft power* dan bercorak *high politics* serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat *inward looking* yang berfokus pada penguatan sektor domestik. Permasalahan akan muncul jika suatu negara tidak berimbang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Perkembangan lingkungan strategis global dan regional membutuhkan respons kolektif yang dicapai dalam forum-forum multilateral. Hal ini membuat kerja sama dan keaktifan suatu negara dalam forum internasional menjadi penting. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, penulis juga memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri yang menggabungkan corak *inward* dan *outward looking* dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal tersebut berupa mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN guna membuat ASEAN sebagai *zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN)*, mencegah masuknya kekuatan asing, menajaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut penting dilakukan guna menjamin tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Secara sederhana, kebijakan *outward looking* digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (*inward looking*).

Kata Kunci: kebijakan luar negeri; *inward looking*; *outward looking*; kepemimpinan Indonesia; kepentingan nasional.

# Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber

## *Cyberpolitics as A New Perspective in Understanding Politics in The Cyber Era*

**Jerry Indrawan\***

\*Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta

email: jerry\_indrawan18@yahoo.co.id

---

### **Riwayat Artikel**

Diterima 7 Maret 2019

Direvisi 2 April 2019

Disetujui 2 Mei 2019

### **Abstract**

*Political science studies have developed from conventional perspectives, marked by the use of physical means of campaign, to the era of non-conventional politics, where the use of cyber medium is more prevalent. The use of cyber medium in the study of political science has resulted in many sectors, from democracy, security, defense, social and cultural affairs, education, to political campaigns to conducted through the cyber medium. Cyberpolitics is a new concept that is very interesting to discuss, as interesting as it is to be studied in detail. Cyberpolitics will be the future of political campaign for all political stakeholders, especially those running in political contests. Political activism has already been replaced by a form of virtual communication. Cyberpolitics can in this regard help democracy work as it should. The aim of this research is to understand cyberpolitics more deeply, and that requires an interdisciplinary perspective, not just political science. The significance of this research is to provide a different perspective to the public about the development of political science, which now moves towards the use of cyber technology. This paper will discuss the study of cyberpolitics, which is seen as a new perspective in understanding politics in the cyber era. The author recommends that studies discussing the concept of cyberpolitics be discussed and researched more intensively among political science scholars, so that the combination of political science and information technology in the future can mutually enrich the scientific understanding of both disciplines.*

*Keywords: Cyberpolitics; Politics in Cyber Era; Cyber Security and Defense.*

### **Abstrak**

Kajian ilmu politik sudah berkembang dari yang bersifat konvensional, yaitu menggunakan sarana kampanye yang bersifat fisik, menuju ke era politik non-konvensional, yaitu penggunaan medium siber. Penggunaan medium siber dalam kajian ilmu politik membuat banyak sektor, seperti demokrasi, keamanan, pertahanan, sosial dan budaya, pendidikan, sampai kampanye politik, dilakukan melalui medium siber. *Cyberpolitics* menjadi sebuah konsep baru yang sangat menarik untuk dibahas, serta diteliti lebih dalam. *Cyberpolitics* akan menjadi masa depan kampanye politik bagi setiap *stakeholder* politik, terutama bagi mereka yang akan berkontestasi dalam kompetisi pemilihan politik. Aktivisme politik sudah mulai digantikan oleh bentuk komunikasi secara virtual. *Cyberpolitics* dengan demikian dapat membantu demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami *cyberpolitics* secara lebih dalam, sehingga membutuhkan perspektif inter-disipliner, tidak hanya ilmu politik. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang berbeda kepada khalayak umum tentang perkembangan ilmu politik, yang sekarang mengarah ke arah penggunaan teknologi siber. Makalah ini akan membahas kajian *cyberpolitics*, yang dilihat sebagai sebuah perspektif baru dalam memahami politik di era siber. Penulis merekomendasikan bahwa kajian-kajian yang membahas tentang konsep *cyberpolitics* mulai lebih banyak dibahas dan diteliti di kalangan akademisi-akademisi ilmu politik, agar perpaduan antara ilmu politik dengan teknologi informasi ke depannya dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan masing-masing.

Kata Kunci: *Cyberpolitics*; Politik di Era Siber; Keamanan dan Pertahanan Siber.

---

## Pendahuluan

Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang terus menerus mengalami perubahan karena sifatnya yang dinamis dan menyesuaikan dengan ruang lingkungannya. Begitu pula dengan perkembangan di sektor teknologi informasi (TI) yang terjadi dengan sangat cepat. Politik mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perubahan yang cepat tersebut, yang terjadi di dunia TI. Untuk itu, perkembangan kajian ilmu politik di era teknologi informasi seperti sekarang ini membuat penulis merasa tertantang untuk memberikan analisa subjektif terkait hubungan antara keduanya. Pengkajian terhadap hubungan antara ilmu politik dan TI bermuara pada munculnya konsep *cyberpolitics* atau politik siber.

Penulis berpendapat bahwa konsep *cyberpolitics* akan menjadi sarana utama bagi ilmu politik untuk berakselerasi di masa depan karena memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mampu menjangkau banyak *stakeholder*. Untuk itu, mengkaji *cyberpolitics* membutuhkan beragam perspektif dan kajian keilmuan yang berkaitan, seperti teknologi informasi, komunikasi, keamanan, pertahanan, pendidikan, sampai sosial dan budaya. Namun, ke depan kajian ini menawarkan perspektif yang menarik untuk diteliti dan diamati lebih lanjut karena merupakan sebuah kajian yang baru, tapi dapat masuk ke dalam banyak sektor-sektor lainnya.

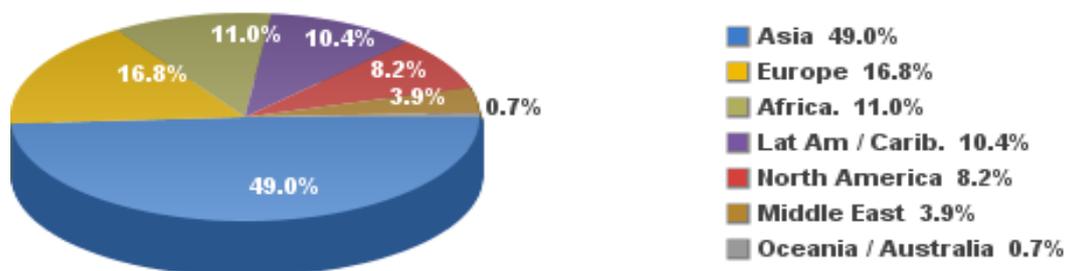
Menilik perkembangan politik (demokrasi) di ranah digital di Indonesia, selama hampir 5 tahun memerintah kita melihat intensitas Presiden Joko Widodo dalam mendorong terwujudnya demokrasi digital di berbagai sektor pemerintahan. Dengan beragam instrumen, seperti *e-government*, misalnya, kualitas pelayanan publik normatif dapat terus ditingkatkan. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat juga dapat terus diakomodasi dan difasilitasi melalui beragam media sosial.

Di Indonesia, istilah demokrasi digital memang kerap diidentikkan dengan keriuhan di media massa yang mewarnai beberapa kontestasi politik besar, seperti Pilpres 2014, Pilkada Jakarta 2017, dan tentu saja Pilpres 2019 pada April lalu. Padahal makna demokrasi digital tidak bisa direduksi sebatas pada ramainya keterlibatan masyarakat pada peristiwa tersebut, yang konon telah menimbulkan polarisasi yang cukup tajam di tengah masyarakat hingga kini.

Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa praktik positif dari demokrasi digital yang sudah berjalan di Indonesia, misalnya, dalam pelibatan partisipasi publik dalam penggalangan petisi daring, aplikasi tentang pelaporan fasilitas publik atau korupsi yang dilakukan arapat negara, sampai informasi-informasi politik tentang proses kontestasi politik, baik lokal, maupun nasional. Dunia internet menyediakan ruang dan fitur berlimpah untuk dimanfaatkan guna mendorong praktik demokrasi yang lebih mapan. Medium digital bagi kaum milenial menjadi pilihan yang sangat rasional bagi mereka untuk tahu lebih banyak tentang politik. Hal ini bisa diakibatkan karena keterbatasan waktu, maupun juga sikap mental praktis (instan) yang mereka idap seiring perkembangan zaman yang semakin *high-tech*.

Sekalipun istilah "*cyberpolitics*" terkesan baru, namun sesungguhnya menggunakan medium-medium yang kita semua sudah kenal, yaitu ruang siber. Kita akan memulai dengan memberikan fakta bahwa peran siber dalam dunia politik sangatlah besar. Sejalan dengan perkembangan internet yang sangat cepat di tahun 1990-an, istilah ruang siber di dalam politik dunia (*cyberspace in world politics*). Awalnya hanya membahas doktrin-doktrin yang terkait keamanan nasional, namun berkembang menjadi pusat informasi karena membahas arus informasi (*traffic information*)

## Internet Users in the World by Regions - June 30, 2018



Source: Internet World Stats - [www.internetworldstats.com/stats.htm](http://www.internetworldstats.com/stats.htm)

Basis: 4,208,571,287 Internet users in June 30, 2018

Copyright © 2018. Miniwatts Marketing Group

Gambar 1. Pengguna Internet di Dunia Berdasarkan Wilayah

yang sangat padat di internet. Karena itu, AS, Jepang, dan beberapa negara Eropa Barat sudah mulai melakukan transisi menuju masyarakat informasi. Saat ini, jaringan global internet meliputi 4.2 miliar manusia di bumi (kurang lebih 55.1% populasi dunia). Secara aktif mengembangkan “*internet of things*” (IoT) yang kedepannya akan mengikat tidak hanya manusia, tetapi juga jaringan, perangkat komputer, peralatan sehari-hari, dan barang-barang lainnya. Diramalkan, pada tahun 2020, akan ada 50 miliar perangkat yang memiliki koneksi internet.<sup>1</sup>

Melihat pentingnya dan meningkatnya kuantitas dari penggunaan internet di kalangan masyarakat dunia, *cyberpolitics* dapat memainkan peran yang sangat sentral dalam pewujudan praktik-praktik politik di masa depan. Bisa jadi, di masa mendatang internet akan menggantikan televisi sebagai medium utama komunikasi politik. Internet akan menjadi sarana di mana seluruh aktivitas politik berpusat, jika masyarakat dunia lebih menggunakan “*world wide web*” daripada saluran-saluran politik konvensional. Pertemuan-pertemuan politik akan dilakukan secara maya, bukan lagi nyata. Bahkan,

<sup>1</sup> Hans Vestberg, “Ericsson CEO to Shareholders: 50 Billion Connections 2020,” *Ericsson*, 13 April 2010, diakses 7 Februari 2019, <http://www.ericsson.com/thecompany/press/releases/2010/04/1403231>

memilih (*vote*) pun dilakukan secara daring. *Cyberpolitics* menganalisis konten diskusi politik di internet, serta untuk melihat bagaimana internet digunakan secara politis. Internet akan tumbuh terus seiring dengan meningkatnya orang yang menggunakan, sehingga kondisi ini akan mengubah sifat (*nature*) dari ilmu politik yang selama ini dipraktikkan.

*Cyberpolitics* akan merangsang minat generasi milenial untuk lebih terlibat dalam politik karena medium siber yang digunakannya sangat pas untuk mereka. Di era yang serba cepat dan mudah ini, keterlibatan masyarakat, terutama milenial, di dunia politik sudah seperti layaknya memesan makanan atau taksi *online*. Politik bukan lagi sebuah ilmu kaku yang hanya menasar kalangan berumur, namun bisa menjadi sebuah tren baru. Mengingat politik berurusan dengan banyak aspek dalam kehidupan manusia, sudah sepantasnya generasi milenial memiliki kepedulian terhadapnya. Dengan *cyberpolitics*, upaya untuk “peduli” itu sendiri menjadi semakin dimudahkan karena aksesnya pun mudah.

Tulisan ini akan membahas bagaimana ilmu politik di era milenial ini dijalankan dalam berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara, seperti pendidikan, komunikasi,

demokrasi, sistem sosial dan budaya masyarakat, teknologi dan informasi, serta keamanan dan pertahanan, yang akan dibahas secara khusus di bagian subbab terakhir. Praktik-praktik untuk menjalankannya pun sudah tidak lagi konvensional, melainkan melalui medium siber, yang penulis istilahkan sebagai *cyberpolitics*.

## Metode Penelitian

Dalam metode penelitian dibahas metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Dalam tulisan ini, penulis melakukan telaah konsep secara kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini biasa digunakan untuk menjelaskan masalah pada penelitian ini karena metode ini adalah sebuah metode penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>2</sup> Penulis menggunakan metode ini karena tulisan ini hanya menggunakan sumber pustaka tanpa melakukan kajian lapangan langsung. Metode deskriptif berguna untuk menjelaskan secara umum temuan-temuan pustaka yang penulis dapatkan terkait *cyberpolitics*. Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, komunitas, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>3</sup> Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengunjungi berbagai perpustakaan (*library research*) dan

mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk, yang diharapkan dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

## Mengenal *Cyberpolitics*

Sebelum membahas *cyberpolitics*, mari kita pahami dulu apa yang disebut dengan siber. *Cyberspace* (ruang siber) adalah sebuah ruang maya atau ruang elektronik, di mana sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer. Dengan kata lain, ruang siber adalah sebuah ruang yang tidak dapat terlihat, di mana terjadi hubungan komunikasi sehingga informasi menjadi tersebar, serta tidak ada jarak fisik dari masing-masing pengguna, dan juga tidak dapat dibatasi oleh kedaulatan suatu negara.<sup>4</sup>

Menurut David Bell yang dikutip dari Rulli Nasrullah, ruang siber adalah sekumpulan data, representasi grafik demi grafik, dan hanya bisa diakses melalui komputer. Istilah ruang siber muncul jauh sebelum teknologi internet berkembang. Kata ini muncul dari permainan video games, di mana pemainnya menyakini bahwa semua bangunan, ruang, interaksi, maupun benda-benda yang ada di permainan tersebut merupakan sebuah kenyataan, meski kenyataan tersebut tidak bisa dijangkau oleh mereka (*some place you can't see, but you know it's there*). Ruang siber lebih dekat dengan penggambaran "*consensual hallucination*" atau "*non-linear reality*", yang kurang lebih berarti realitas semu. Bell dalam Nasrullah, lebih lanjut menggunakan kata ruang siber untuk membawa pikiran menuju tingkat atau level selanjutnya dari kesadaran manusia.<sup>5</sup>

Menurut Stefan Fenz, ruang siber adalah sebuah metafora (kiasan) untuk menjelaskan sebuah wilayah atau medan yang tidak ada

2 Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

3 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), 63.

4 Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017), 19.

5 Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber* (Jakarta: Kencana, 2014), 20.

secara nyata, yang diciptakan oleh sistem komputer. Ruang ini merepresentasikan dunia nyata melalui objek dan komunikasi virtual yang terjadi diantara penggunaanya. Sistem daring, sebagai contoh, menciptakan sebuah ruang siber di mana setiap orang dapat saling berkomunikasi via email, melakukan penelitian, bahkan untuk sekedar melihat-lihat barang belanjaan.<sup>6</sup>

Istilah ruang siber secara sederhana digunakan untuk merujuk pada sebuah jaringan, yang saat ini dikenal dengan nama internet. Namun, jika kita memahami definisi ruang siber, maka ia didefinisikan melebihi daripada internet karena semua transaksi atau peristiwa yang tidak terjadi di dunia nyata, terjadi di ruang siber.<sup>7</sup> Internet, atau kita sebut juga *interconnection-networking*, adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.<sup>8</sup>

Siber dalam bahasa Inggris (*cyber*) menurut Eneken Tikk-Ringas, adalah kalau tidak kata sifat, atau sebagai *combining form*, yaitu sebuah istilah linguistik yang digunakan untuk menggabungkan satu kata dengan kata lain. Contoh *combining form* adalah *cyberpolitics*, sebuah kajian baru di bidang siber yang ingin penulis kupas di dalam buku ini. Di beberapa negara, ruang siber memiliki definisinya sendiri-sendiri. Internet dianggap sebagai inti dari ruang siber. Kita juga harus memahami bahwa istilah siber digunakan dalam berbagai jenis pengertian yang sangat tergantung pada konteksnya, seperti motivasi pribadi atau motivasi politik misalnya. Kemudian, amati apa sarannya, *server* atau komputer pribadi,

pemerintah atau dunia usaha.<sup>9</sup>

Di Jerman, ruang siber memiliki definisi, sebagai sebuah ruang virtual dari semua sistem *Information Technology* (IT) terhubung pada tingkatan data dalam skala global. Sistem IT dalam ruang virtual yang terisolir bukanlah bagian dari ruang siber. Di Perancis, ruang siber adalah ruang komunikasi yang diciptakan oleh interkoneksi di seluruh dunia dari perangkat otomatis yang memeroses data digital. Kemudian, di Inggris, ruang siber adalah domain interaktif terbuat dari jaringan digital yang digunakan untuk menyimpan, memodifikasi, dan mengkomunikasikan informasi. Terakhir, Selandia Baru mendefinisikan ruang siber sebagai jaringan global yang terdiri dari infrastruktur informasi independen, jaringan telekomunikasi, dan sistem pengolahan komputer, di mana komunikasi daring dilakukan.<sup>10</sup>

Ruang siber adalah sebuah fakta dalam kehidupan sehari-hari manusia saat ini karena sifatnya yang memiliki cakupan dan skala yang luas, serta praktis saat ini ruang siber dapat ditemukan di mana saja. Ruang siber, termasuk internet dan ratusan juta komputer yang tersambung jaringan internet, lembaga yang memungkinkan hal tersebut terjadi, serta pengalaman yang diberikannya, telah menjadi karakteristik dasar dari dunia di mana kita hidup saat ini. Kondisi ini telah menciptakan sebuah realitas baru kepada hampir semua manusia di dunia, baik belahan dunia maju, maupun dunia negara-negara berkembang. Realitas itulah yang nantinya akan membentuk *cyberpolitics*. Berikut adalah pembahasannya.

Politik siber sangat terkait dengan ruang siber, seperti yang dibahas sebelumnya. Untuk itu, sebelum penulis menjelaskan secara lebih detail tentang *cyberpolitics*, kita

6 Stefan Fenz, *Cyberspace Security: A Definition and A Description of Remaining Problems* (University Vienna and Institute of Government & European Studies, 2005), 2.

7 *Ibid*, 3.

8 Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, 17.

9 Eneken Tikk-Ringas, *Cyber Security: Solutions of Tomorrow, Experience of Yesterday*, dalam Bo Huldt, dkk (ed), *The Emerging Global Security Environment* (Vasteras: The Swedish National Defense College, 2013), 151.

10 *Ibid*, 152-153.

pahami dulu hubungan antara ruang siber dengan *cyberpolitics*. Secara umum, ruang siber dikategorikan dalam isu-isu “*low politics*”, sebuah terminologi yang menunjukkan latar belakang proses pengambilan keputusan oleh negara. Kebalikannya, isu-isu “*high politics*” biasanya terkait dengan keamanan nasional, institusi politik, keputusan strategis negara, kepentingan, dan nilai-nilai sebuah negara. Begitu pula nasionalisme, partisipasi politik, kontestasi politik, konflik, kekerasan, dan perang, yang sering juga dianggap sebagai isu-isu *high politics*.

Sekalipun demikian, isu-isu *low politics* tidak selalu berada dibawah permukaan. Apabila dinamika-dinamika, terutama terkait ruang siber dan politik, kerap terjadi, interaksi-interaksi yang biasa terjadi di ranah *high politics*, lama-lama akan tergantikan. Jika ini terjadi, maka isu-isu *low politics* akan menggantikannya. Dengan demikian, ruang siber akan menjadi pusat perhatian politik karena merupakan bagian dari isu-isu *high politics*. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir masalah-masalah yang terkait dengan ruang siber telah bergerak melampaui isu-isu *low politics*. Apa yang mampu dilakukan di ranah siber juga dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

Menurut Nazli Choucri, *cyberpolitics* adalah sebuah terminologi yang diciptakan, berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandai-andaian dan realitanya sendiri. Meskipun ada perbedaan dalam perspektif di seluruh dunia, namun tetap terdapat pemahaman ilmiah umum tentang arti “politik”. Kompleksitas yang muncul terkait awalan “*cyber*” itulah yang membedakan semantik yang baru dibangun ini.<sup>11</sup>

11 Choucri, Nazli. *Cyberpolitics in International Relations*.

Penulis berpendapat secara umum, bahwa *cyberpolitics* adalah sebuah kegiatan politik yang dilakukan melalui ruang siber. *Cyberpolitics* berkenaan dengan kegiatan-kegiatan politik, seperti pendidikan politik, komunikasi politik, kampanye politik, implementasi demokrasi, keamanan dan pertahanan, negara, serta kegiatan sosial, budaya, dan juga masyarakat. Dahulu, kegiatan-kegiatan seperti ini biasa dilakukan di dunia nyata, serta terkait dengan aktivitas-aktivitas politik. Namun saat ini, kegiatan-kegiatan ini mulai banyak dilakukan juga di ruang siber, karena lebih praktis dan memiliki cakupan dampak yang jauh lebih luas.

Atas dasar itulah, seperti yang dikatakan Choucri, ada semantik baru yang dibangun dalam terminologi politik. Semantik tersebut adalah *cyberpolitics*, di mana kegiatan-kegiatan politik yang memiliki signifikansi besar terhadap jalannya sebuah negara, pemerintahan, termasuk roda kehidupan masyarakat, dilakukan melalui ruang siber. *Cyberpolitics* berkembang menjadi sebuah istilah yang bisa dipakai untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas politik modern, yang tidak perlu lagi menggunakan ruang nyata, melainkan cukup ruang siber yang memiliki pengandai-andaian dan realitanya sendiri.

Di bidang pendidikan politik, *cyberpolitics* berperan memberikan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) politik kepada masyarakat umum, yang di dunia siber sering diistilahkan sebagai netizen. Netizen dikenal sering bertindak tanpa regulasi yang jelas di dunia siber, apalagi terkait dengan isu-isu politik. Hal ini terjadi karena tidak ada edukasi politik kepada mereka, sehingga mereka tidak paham mana yang boleh dan mana yang tidak. Pendidikan *cyberpolitics* akan menawarkan sebuah konsep yang bernama pendidikan politik siber untuk mencerdaskan netizen tentang konsep-konsep, serta masalah-masalah yang terkait dunia politik.

Cambridge: MIT Press (2012): 3.

*Cyberpolitics* juga sangat terkait dengan ilmu komunikasi, terutama turunannya, yaitu komunikasi politik. Ruang siber adalah medium komunikasi *netizen*. *Cyberpolitics* adalah medium komunikasi *netizen* untuk berkomunikasi tentang politik. Makanya, *cyberpolitics* akan sangat berkaitan dengan bagaimana kajian politik dimainkan di media-media baru, seperti media daring, media sosial, dll. Komunikasi *cyberpolitics* pun dapat dilakukan untuk pembentukan opini publik dan propaganda melalui media-media baru tadi.

Komunikasi dalam *cyberpolitics* kemudian menjadi bagian dari kampanye *cyberpolitics*. Di saat penggunaan dunia maya dan ruang siber makin luas dan gencar dilakukan masyarakat, kampanye politik akan lebih efektif dilakukan melalui medium tersebut. Melakukan *branding* politik terhadap para calon-calon legislatif, kepala daerah, sampai presiden dan wakil presiden pun dilakukan lewat ranah siber. *Cyberpolitics* akan menjadi masa depan kampanye politik bagi setiap *stakeholder* politik, terutama bagi mereka yang akan berkontestasi dalam kompetisi pemilihan politik.

Demokrasi sebagai sistem politik yang banyak digunakan di dunia adalah katalis yang sempurna bagi *cyberpolitics*. Implementasi *cyberpolitics* akan memiliki efek luas di wilayah-wilayah yang demokratis. *Cyberpolitics* membutuhkan ruang yang bebas berkreasi dan menjamin adanya pengakuan hak dan kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Sebuah konsep yang sangat demokratis. Itulah mengapa demokrasi dan *cyberpolitics* dapat berjalan seiringan, bahkan *cyberpolitics* dapat penulis katakan sebagai pelengkap demokrasi. *Netizen* pun semakin gemar menyuarakan opininya melalui ruang siber terkait masalah-masalah sehari-hari, di mana hal tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindakan politik. Aktivisme politik sudah mulai digantikan oleh bentuk komunikasi secara virtual.

Selanjutnya, sistem sosial dan budaya masyarakat dewasa ini, khususnya di kota, sudah mengarah ke arah budaya siber. Sistem budaya lokal saat ini menghadapi derasnya serbuan budaya asing, yang masuk melalui medium ruang siber. Di dalam sistem sosial dan budaya masyarakat saat ini, terjadi akulturasi, asimilasi, globalisasi, dan modernisasi lewat ranah siber. Perpaduan ini melahirkan sebuah generasi baru, yaitu generasi milenial. *Cyberpolitics* adalah alat yang tepat untuk memberikan kesadaran politik dalam bentuk pendidikan politik siber, kepada generasi milenial tersebut. Ke depan, masyarakat harus siap menghadapi budaya siber yang semakin mengglobal, serta menciptakan realitas sendiri kepada setiap individu.

Selanjutnya, *cyberpolitics* dan ruang siber adalah dua hal yang saling berkaitan. *Cyberpolitics* tidak akan bisa berjalan tanpa rel yang bernama ruang siber. Ruang siber akan berjalan hampa tanpa dibumbui oleh konten-konten politik di dalamnya. Ruang siber diciptakan melalui teknologi inovasi, ini adalah tempat yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam kegiatan yang *borderless* dan *bounderless*. Ruang ini menawarkan peluang baru untuk kompetisi, kontestasi, kekuasaan, pengaruh, persaingan, dan konflik, yang kesemuanya adalah elemen-elemen dasar dari politik itu sendiri.

Internet, yang adalah bagian dari ruang siber itu sendiri, telah menjadi bagian integral dari berkembangnya jaringan infrastruktur komunikasi global. Konten informasi menjadi sangat luas dan berkembang di tingkat yang sangat tinggi. Informasi-informasi baru diciptakan dan disebarluaskan, termasuk mekanisme-mekanisme baru diciptakan untuk memfasilitasi konten-konten yang dibagikan tersebut. Ruang siber yang sempat dianggap sebagai domain netral sebagai hasil inovasi teknologi saja, sekarang didominasi oleh konten-konten politik. Ruang siber menjadi

tempat berkompetisinya kepentingan-kepentingan, sekaligus arena konflik dan persaingan politik, pihak-pihak yang “bermain” di dunia politik, termasuk negara.<sup>12</sup>

Hubungan antara politik dan ruang siber telah memperkuat sejumlah konsep-konsep tentang politik yang dikemukakan David Easton, Harold Laswell, dan lain-lain. Ia telah memperluas manifestasi ilmu politik, meningkatkan potensi untuk berpartisipasi politik secara luas, menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya, menyuarkan posisi atau sikap politik, termasuk bergabung dalam aktivitas-aktivitas politik. Saat ini, malah sulit untuk mengidentifikasi bidang-bidang politik yang tidak berhubungan dengan siber. Ketika sulit, bahkan tidak mungkin untuk menggambarkan apa saja implikasi dari ruang siber bagi politik secara umum dan perilaku politik secara khusus, beberapa pengamat dan analis secara bertahap berkumpul untuk membahasnya.<sup>13</sup>

Sebagai contoh, politik di ruang siber digambarkan dalam buku Richard N. Rosecrance tahun 1999, berjudul: “*The Rise of the Virtual State*”. Esensi dari negara virtual terletak pada kemampuannya untuk mengumpulkan kekuatannya finansial dan gagasan, kemudian mengubahnya menjadi sumber pengaruh global. Sekalipun terlihat sederhana, namun memiliki implikasi yang luas. Konsep baru ini menantang fundamen dari politik tradisional yang berdasarkan pada kompetisi memperebutkan teritori, perdagangan, kekuatan militer, untuk menggantinya dengan parameter-parameter baru, seperti pendidikan, keahlian, pengetahuan, pengelolaan, serta berbagai bentuk dari kekuatan pikiran (*brain power*). Rosecrance berpendapat bahwa semua negara secara bertahap akan berjalan ke arah negara virtual, bahkan beberapa negara akan dengan cepat melakukannya dan lebih

menyakinkan daripada yang lain. Rosecrance menyarankan investasi pada pengetahuan adalah sumber dasar dari kekuatan nasional dan efektivitas sosial.<sup>14</sup>

Contoh lain digambarkan pada artikel yang terbit bulan Juli tahun 2000, berjudul: “*CyberPolitics in International Relations*”. Artikel ini menyoroti domain virtual sebagai bidang penelitian yang penting untuk politik internasional dan hubungan antar-negara. Berjalannya aktivitas politik siber di berbagai isu, sejalan dengan perubahan-perubahan di dalam diskursus dan interaksi politik, telah menimbulkan efek yang mendunia, serta menyebabkan munculnya artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan baru. *Cyberpolitics* juga mendorong terjadinya perdebatan-perdebatan terkait bagaimana memandang sebuah kebijakan politik. Di sini kita melihat bahwa *cyberpolitics* memiliki peranan untuk mengubah agenda-agenda politik, baik global maupun nasional.<sup>15</sup>

Kondisi di atas mengarahkan kita pada kemungkinan terjadinya sinergi antara *cyberpolitics* (arena baru interaksi politik) dan keberlanjutan (teori dan kebijakan). Dibentuk oleh konsep-konsep baru, seperti dematerialisasi, de-sentralisasi, de-nasionalisasi, dan de-teritorialisasi, akan muncul sebuah kondisi di mana ruang siber akan menjadi sarana penyaluran kepuasan dan ketidakpuasan dari masyarakat. Kemungkinan isu-isu politik berkembang di dalam sebuah ranah “politik baru” (*new politics*), sehingga membentuk sebuah sifat dasar yang akhirnya mengubah landasan dari kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*) yang selama ini dikenal dalam ilmu politik konvensional, sangatlah besar. Bersamaan dengan munculnya ruang siber, arena baru untuk berpolitik mulai terbentuk. Boleh jadi, ruang politik akan menjadi saksi dari munculnya bentuk baru dari politik, yaitu *cyberpolitics*. Karena itu, ranah siber haruslah

12 *Ibid*, 8.

13 *Ibid*, 10.

14 *Ibid*

15 *Ibid*, 10-11.

dilihat tidak hanya sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan politik, tetapi sebagai pengganda yang penting (*important multipliers*).<sup>16</sup>

Di negara-negara industri maju dengan sistem politik yang kompetitif, interaksi dan komunikasi di ruang siber telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan politik. Di AS sebagai contoh, penggunaan ruang siber untuk kepentingan politik menunjukkan beberapa pola yang khas. Dalam konteks politik sehari-hari, komunikasi lewat medium siber sudah berjalan optimal dan berkembang pesat. Masyarakat menggunakan email untuk mendiskusikan peristiwa-peristiwa politik, termasuk menyebarkan “*link*” yang berhubungan. Banyak dari mereka yang mencoba memengaruhi teman mereka untuk bersama-sama terlibat dalam diskusi politik di dalam *blog/blog* di mana penggunaannya dapat membagi pendapat mereka sesuai topik-topik debat yang diadakan.<sup>17</sup>

Kelompok-kelompok politik mengumpulkan donasi melalui situs mereka dan pendukungnya dapat mengirimkan sumbangannya melalui kartu kredit secara daring. Kelompok-kelompok politik pun dapat merencanakan pertemuan-pertemuan umum dengan menyebarkan informasi di internet agar semakin banyak orang yang hadir. Dengan menggunakan email dan situs, penyelenggara dapat mengordinasikan usaha mereka ke seluruh pelosok negeri.<sup>18</sup>

Pengamat mencatat bahwa partai Demokrat pertama kali menggunakan internet saat mereka sama sekali tidak menguasai Gedung Putih atau pun Kongres, namun medium siber memberikan mereka kesempatan baru untuk mengekspresikan pandangannya. Partai Republik juga menggunakan medium siber karena mereka percaya media massa konvensional (koran dan televisi) lebih bersimpati kepada partai saingannya. Mereka lebih menggunakan ranah siber sebagai cara

untuk menyampaikan opini dan pandangannya, daripada menggunakan *platform* partai yang resmi.<sup>19</sup>

Kampanye di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini dilakukan lebih masif melalui internet, sehingga menjadi bagian dari *cyberpolitics*. Sebuah *blog* atau situs, atau bahkan hanya sebuah akun Instagram atau Facebook, dapat dipergunakan untuk merekayasa suatu citra kelompok kepentingan politik tertentu. Hal ini kemudian berkembang dan dipergunakan untuk pengenalan sebuah gagasan atau ide politik tertentu kepada khalayak atau suatu kelompok tertentu yang diharapkan mendapatkan *feedback*, timbal balik, atau tanggapan. Kampanye melalui media daring saat ini merupakan bentuk kampanye yang paling banyak dikerjakan oleh hampir semua kelompok pemangku kepentingan politik. Format pengemasan informasinya pun beragam dan berlapis-lapis, dari penggunaan situs, *blog*, koran, dan majalah daring, serta dilengkapi juga dengan pembuatan akun media sosial. Semua hal ini adalah bagian integral dalam *cyberpolitics*.

Pesan-pesan dari suatu kampanye politik lazimnya memuat gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para kandidat atau partai politik kepada para khalayak calon pemilih. Pesan tersebut lazimnya berisi butir-butir pembicaraan mengenai berbagai persoalan kebijakan. Butir-butir pembicaraan yang memuat gagasan-gagasan utama kampanye tersebut penyampaiannya diulang berkali-kali agar menciptakan kesan akhir mendalam pada calon pemilih. Kebanyakan kampanye politik suka mempertahankan gaya kemasan pesan mencakupan luas agar khalayak calon pemilih paling potensial tertarik. Pesan yang dikemas dengan cakupan terbatas, apalagi sempit, dapat mengurangi minat calon pemilih, dan bahkan memperlambat pengenalan para kandidat.<sup>20</sup>

16 *Ibid*, 11-12.

17 *Ibid*, 142.

18 *Ibid*, 142-143.

19 *Ibid*, 143.

20 Solatun Dulah Sayuti, *Komunikasi Pemasaran Politik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 117.

Dalam kampanye politik, peran manajer kampanye (*campaign manager*) dan konsultan politik (*political consultant*) juga diperlukan, terutama jika bisa dilakukan secara siber. Hal ini karena kampanye politik memerlukan sebuah organisasi manajerial yang mampu secara profesional merumuskan, merancang, mengendalikan, serta mengimplementasikan atau mengoperasikan aktivitas kampanye politiknya. Oleh karenanya, seorang manajer kampanye profesional diperlukan untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengordinasikan operasi kampanye politik yang diminta kandidat atau partai politik kepadanya. Para manajer kampanye, beserta timnya, melakukan kampanye yang jauh lebih *feasible* dan lebih mengena dengan situasi calon pemilih audiens kampanye. Seorang manajer kampanye haruslah seorang yang mengerti visi, misi, tujuan, dan sasaran politik yang digagas kandidat atau partai politik yang diusungnya. Secara bersamaan, ia juga harus mampu memimpin manajerial pengelolaan kampanye politik untuk memenangkan kandidat dan partai politik tersebut.<sup>21</sup>

Teknologi komunikasi yang berbasis internet, seperti media sosial, dll, telah memungkinkan komunikasi dalam berbagai bentuknya menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Teknologi ini mampu menghubungkan dan melibatkan warga negara dalam jumlah yang massal dan mencapai audiens dalam jumlah besar. Teknologi ini juga dipergunakan untuk penggalangan biaya kampanye, mengumpulkan dan mengorganisasikan relawan kampanye, serta membentuk dan mengaktifkan komunitas yang menjadi pendukung partai politik dan kandidatnya.<sup>22</sup>

Konsultan politik tentu sangat penting fungsinya dalam pemasaran dan kampanye politik di negara-negara penganut demokrasi. Posisi dan peranan mereka terlihat dalam

pengembangan dan produksi isi kandungan publikasi politik. Konsultan politik juga mengolah informasi tentang situasi dan kondisi lawan politik, kemudian menggunakannya sebagai bahan rujukan tindakan dan aktivitas kampanye. Para konsultan politik juga tidak jarang bekerja untuk menata bagian organisasi partai politik tertentu, misalnya penataan publikasi, penataan keuangan, sampai penataan pengelolaan kaderisasi dan pendidikan politik. Mereka juga melakukan penelitian ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung program pemasaran politik partai dan kandidat mereka.<sup>23</sup>

Konsultan politik juga muncul dalam sosoknya sebagai pengelola sistem *polling* dan riset politik. Produknya kemudian menjadi bagian dari strategi kampanye partai politik dalam kontestasi pemilihan umum. Sebagian konsultan politik lainnya menawarkan diri dengan tampilan sebagai pengamat dan analis politik, yang oleh karena beberapa prestasinya di dalam menganalisis suatu rangkaian situasi politik dan ketepatan prediksi mereka. Karena sering tampil di media massa, terutama televisi, para konsultan politik berusaha memanfaatkan medium itu untuk meningkatkan popularitas mereka, untuk kemudian menawarkan jasa mereka kepada partai politik.<sup>24</sup>

Konsultan politik saat ini juga sudah mulai merambah ranah siber, dengan fokus pada kampanye-kampanye politik di ranah daring saja. mereka menyadari bahwa kampanye politik masa depan adalah sebuah kontestasi maha dahsyat karena menggunakan ruang siber dalam pelaksanaannya. Untuk itu, konsultan politik akan menyarankan pada kandidat yang akan bertarung dalam pilkada, pileg, maupun pilpres, agar memfokuskan kampanyenya di ranah siber. Di sinilah peran konsultan kampanye *cyberpolitics* sangat dibutuhkan. Selain hemat biaya, ruang siber sangat efektif untuk menjangkau khalayak luas.

---

21 *Ibid*, 118.

22 *Ibid*, 133.

23 *Ibid*, 124.

24 *Ibid*, 126.

Konsultan politik masa depan akan banyak bermain di *cyberpolitics* karena meniru dunia perdagangan (*commerce*), di mana pemasaran dan penjualan sebuah produk sudah menggunakan ruang siber (*e-commerce*). Konsultan politik juga menggunakan konsep yang sama dari pemasaran sebuah produk di dunia dagang, hanya produknya adalah entitas politik yang harus dipasarkan sedemikian rupa kepada khalayak umum. Penggunaan *cyberpolitics* dalam kerja-kerja konsultan politik adalah keharusan karena konsultan politik profesional tidak mungkin lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam mem-branding kliennya.

*Cyberpolitics* dengan demikian menjadi ranah dalam berinteraksi politik di masa depan. Semua *stakeholder* bidang politik akan menggunakan medium siber untuk mengejar kepentingannya masing-masing, baik untuk memilih maupun dipilih. Ruang siber akan menjadi jembatan antara dunia nyata dengan *constructive reality*, di mana politik akan menjadi “pihak” yang mengambil banyak keuntungan darinya. Realita ini membuat cakupan dari ilmu politik menjadi sangat luas, sehingga menawarkan perspektif baru dalam memahaminya.

### Keamanan dan Pertahanan Siber

Pada bagian terakhir ini penulis akan membahas tentang *cyberpolitics* dan kaitannya dengan keamanan dan pertahanan negara. Masalah keamanan dan pertahanan negara adalah bagian yang esensial dari *cyberpolitics* karena setiap kebijakan yang dibuat di sektor ini berasal dari pejabat publik, yang notabene adalah orang-orang politik. Untuk itu, politik era siber juga terkait dengan perumusan kebijakan negara di sektor keamanan dan pertahanan negara.

Mari kita bahas keamanan terlebih dahulu. Paradigma keamanan nasional telah bergeser kepada aspek yang lebih luas yaitu termasuk

jaminan keamanan pribadi warga negara. Kewajiban pokok dari suatu negara adalah memberikan keamanan terhadap warganya tersebut termasuk keamanan dari berbagai kejahatan siber. Setiap saat warga negara dapat merasa terancam pada aset yang dimilikinya. Privasi dan berbagai informasi rahasia dapat dengan mudah dihancurkan oleh para pelaku kejahatan siber ini, di mana bila eskalasinya semakin meluas, dapat membuat keresahan yang meluas pada masyarakat. Dalam jangkauan yang lebih luas, keterbatasan penguasaan teknologi negara dan belum adanya regulasi yang lebih tegas mengenai pertahanan siber dapat membahayakan negara secara nyata. Negara lain ataupun kelompok dengan kepentingan tertentu dapat dengan mudah memasuki ranah infrastruktur vital yang dimiliki negara kita.<sup>25</sup>

Ruang siber merupakan ruang virtual yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi. Teknologi yang dimaksud ialah teknologi informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu, ada banyak terminologi dan interpretasi yang dihubungkan dengan konsep keamanan dan pertahanan siber. Hal ini menyebabkan, konsep keamanan dan pertahanan siber tidak lagi hanya menyentuh wilayah teknologi tapi telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional (sekuritisasi). Sebelumnya, diskusi tentang keamanan nasional sangat jarang dihubungkan dengan teknologi. Namun, seiring dengan meningkatnya ancaman serangan siber domestik dan internasional, terutama pasca peristiwa 9/11, maka muncul kesadaran untuk mempopulerkan bahwa keamanan dunia maya bukanlah sekedar persoalan proteksi *password* yang sederhana.<sup>26</sup>

25 Bagus Artiadi Soewardi, “Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang tangguh bagi Indonesia”, *Media Informasi Ditjen Potan Kemhan*, (Maret 2013): 32.

26 Dewi Triwahyuni dan Tine Agustin Wulandari, “Strategi Keamanan Cyber Amerika Serikat”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2016): 110.

Keamanan siber lebih jauh membutuhkan serangkaian strategi karena menyangkut kepentingan nasional. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan perubahan signifikan mengenai konsep keamanan, kini ruang interaksi tidak bisa hanya dibatasi seara fisik, tapi juga meluas ke ruang siber. Konsekuensinya, negara harus beradaptasi dengan perkembangan ini, karena konsep keamanan siber sudah saatnya ditetapkan sebagai salah satu “wilayah” negara yang jaga keamanannya sebagaimana kewajiban negara mengamankan teritorialnya. Apalagi, serangan siber tidak hanya terjadi pada institusi publik saja, namun juga menyerang institusi pemerintah.<sup>27</sup>

Atas dasar itulah, keamanan siber saat ini dilihat sebagai bagian dari kebijakan yang dibuat oleh sektor keamanan negara, yang tidak lagi menggunakan kekuatan bersenjata (*use of force*), namun cara-cara non-koersif lainnya. Kebijakan keamanan siber digunakan untuk menghadapi risiko ekonomi dan kebebasan sipil, spionase, termasuk serangan militer atau teroris, yang kesemuanya dilakukan melalui medium internet. Menggunakan perspektif mazhab Kopenhagen terkait sekuritisasi, apapun yang membentuk ancaman terhadap sebuah kelompok, entitas yang memiliki nilai-nilai tertentu, cara hidup, atau ideologi, dapat dikategorikan sebagai masalah keamanan.<sup>28</sup>

Kemudian pertahanan siber. Pertahanan siber sendiri adalah langkah-langkah proaktif untuk mendeteksi atau mendapatkan informasi terkait gangguan siber, serangan siber, atau operasi siber yang akan datang, atau untuk menentukan sumber dari mana operasi tersebut berasal, termasuk meluncurkan serangan terlebih dulu, pencegahan, atau kontra-operasi siber terhadap sumber ancamannya (*A proactive measure for detecting*

*or obtaining information as to a cyber intrusion, cyber attack, or impending cyber operation or for determining the origin of an operation that involves launching a preemptive, preventive, or cyber counter-operation against the source*).<sup>29</sup> Pertahanan siber meliputi tugas-tugas, seperti melindungi, mendeteksi, merespon, dan memulihkan.

Terminologi pertahanan siber merujuk pada semua tindakan untuk mempertahankan ruang siber oleh militer melalui cara-cara yang tepat untuk mendapatkan tujuan strategis. Pertahanan siber adalah sistem yang terintegrasi, terdiri dari implementasi semua tindakan terkait ICT (*Information Communication Technology*), keamanan informasi, CNO (*Computer Network Operations*), termasuk bantuan fisik dari angkatan bersenjata. Karena itulah, pertahanan siber sering digunakan dalam konteks militer, sekalipun dapat pula dikaitkan dengan kriminalitas dan tindakan spionase. NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) mendefinisikan pertahanan siber sebagai kemampuan untuk mengamankan pengiriman dan pengelolaan layanan dalam operasional sistem informasi dan komunikasi sebagai respons terhadap potensi aktual kejahatan yang akan segera akan terjadi, yang bersumber di ruang siber.<sup>30</sup>

Di AS, upaya penanganan masalah keamanan dan pertahanan siber sudah jauh lebih komprehensif dan efektif. Undang-Undang Patriot (*Patriot Act*), setara UU Keamanan Nasional di sana, memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan secara maksimal di bidang siber, khususnya untuk masalah-masalah ancaman keamanan nasional. Pemerintahan Obama saat itu malah mampu membawa ruang siber ke dalam domain kebijakan nasional AS melalui aturan UU Patriot tadi. Kebijakan berorientasi ke

27 Solange Ghernaoui, *Cyber Power: Crime, Conflict and Security in Cyberspace* (Lausanne: EPFL Press, 2013): 126.

28 Tikk-Ringas, *The Emerging Global*, 155-156.

29 William H. Boothby, *Conflict Law: The Influence of New Weapons Technology, Human Rights and Emerging Actors* (The Hague: TMP Asser Press, 2014), 223.

30 NATO CCDCOE, “Cyber Definitions,” NATO CCDCOE, tanpa tanggal, diakses 12 Februari 2019, <https://ccdcoe.org/cyber-definitions.html>

siber (*cyber-centered public policy*) melahirkan *US Cyber Command* yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata AS, diluar angkatan darat, laut, dan udara. Komando Siber lahir dari kesadaran Departemen Pertahanan AS yang menyatakan bahwa ruang siber adalah medan perang yang kelima, setelah darat, laut, udara, dan ruang angkasa. Keputusan ini merupakan jawaban dari banyaknya insiden pencurian data dan teknologi militer AS.

Dijadikannya ruang siber sebagai matra perang keempat (darat, laut, udara, dan ruang siber) cukup beralasan, karena semua negara pasti ingin meningkatkan kemampuan untuk mengamankan diri dari serangan musuh. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini akan menjadi landasan penting bagi pengembangan doktrin militer di masa mendatang. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi akan sangat mempengaruhi perubahan strategi militer. Selanjutnya, Israel diketahui mempunyai sebuah unit khusus bernama Unit 8200 yang mempunyai spesialisasi *cyber warfare* dibawah *Israel Defense Forces* (IDF). Salah satu catatan keberhasilan yang fenomenal dari unit ini adalah ketika Unit 8200 berhasil menghentikan operasi radar senjata anti pesawat udara Suriah. Bahkan serangan *worm* Stuxnet terhadap sistem komputer fasilitas nuklir Iran pada awal tahun 2011 ini disebut-sebut merupakan hasil kerja dari unit ini.<sup>31</sup>

Saat ini Indonesia pun mulai mengarahkan corong meriamnya ke arah pertempuran dunia maya. Kementerian Pertahanan menyikapi perang dunia maya ini dengan mulai aktif menggelar seminar maupun lokakarya yang melibatkan Kementerian/ LPNK, Perguruan Tinggi, Pakar dan pihak lainnya untuk merumuskan sistem teknologi informasi terpadu dalam menghadapi perang teknologi informasi melalui dunia maya, yang dikemas dalam konsep Sistem Pertahanan

31 Soewardi, "Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber", 33.

Dunia Maya. Pada tanggal 23 Oktober 2012 menteri pertahanan telah membentuk Tim Kerja Pertahanan Dunia Maya, yang diketuai oleh Dirjen Pothan Kemhan dan beranggotakan unit terkait pada Satuan Kerja Kementerian Pertahanan, serta narasumber dari Kementerian/ LPNK, perguruan tinggi, para pakar maupun tokoh masyarakat dunia maya, dimana tim kerja ini secara garis besar bertugas merumuskan *roadmap* strategi nasional pertahanan negara yang berkaitan dengan ancaman siber, serta menyiapkan pembentukan organisasi pertahanan siber berskala nasional (*National Cyber Defense*). Demikian juga TNI, dalam konteks yang lebih luas dan modern, kedaulatan suatu bangsa pada saat ini tidak hanya dalam ruang lingkup tanah, air dan udara, tetapi juga memasuki kedaulatan di ruang siber, di mana TNI juga harus memainkan peranan yang signifikan.<sup>32</sup>

Serangan siber tanpa menghadirkan kekuatan militer secara fisik di negara lawan telah menjadi tren baru dalam perang modern di abad-21. Karenanya, Indonesia harus segera mempersiapkan kekuatan *cyber army* atau prajurit siber yang terdiri dari individu-individu terampil serta ahli dalam *cyber warfare*, yang dituangkan dalam konsep pembangunan nasional pertahanan siber sebagai garda terdepan dalam menjawab tantangan perang siber. Dengan terbentuknya *National Cyber Defense* (saat ini bernama Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN), diharapkan pembangunan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional terhadap berbagai ancaman dari ranah siber akan dapat lebih ditingkatkan. Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur perlu juga segera direalisasikan secara terintegrasi, khususnya di lingkungan Kemhan/TNI maupun lembaga negara lainnya. Kemampuan yang telah ada saat ini (lahirnya BSSN) dapat dianggap sebagai modal dasar dalam rangka penyiapan konsep dan pembangunan awal

32 *Ibid*, 34-35.

atau tulang punggung pertahanan siber yang komprehensif, mengingat sejauh ini pembangunan konsep pertahanan siber memang masih bersifat sektoral atau belum menyeluruh sebagai satu kesatuan.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, masalah-masalah keamanan dan pertahanan terkait juga dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat di ranah politik oleh negara. Ancaman terhadap keamanan negara, baik ancaman militer maupun non-militer, seperti ancaman siber misalnya, adalah bagian dari kajian *cyberpolitics* juga. Negara perlu memahami bahwa ranah siber saat ini, selain penuh dengan kesempatan, tetapi juga penuh tantangan dan ancaman. Negara harus hadir di ruang siber, tidak hanya dalam membentuk regulasi, tetapi juga mengawasi dan siap bertindak jika ada penyelewengan, terlebih ancaman terhadap keamanan dan pertahanan. Hadirnya BSSN sebagai lembaga negara setingkat kementerian adalah jawaban dari pentingnya *cyberpolitics* dalam pengelolaan masalah keamanan dan pertahanan di Indonesia.

## Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah “ruang baru” yang bersifat artifisial dan maya. Ruang baru ini telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya dan spiritual dari dunia nyata ke dunia maya yang dikenal dengan dunia tanpa batas. Apapun yang dapat dilakukan di dunia nyata, sekarang dapat dilakukan dalam bentuk artifisialnya di ruang siber. Ruang siber menciptakan sebuah kehidupan yang mungkin nantinya sebagian besar akan dibangun seluruhnya oleh model kehidupan yang dimediasi secara mendasar oleh teknologi. Ruang siber yang terbentuk oleh jaringan komputer dan informasi yang terhubung secara global telah menawarkan bentuk-bentuk komunitasnya sendiri (*cyber*

*community*), bentuk realitasnya (*virtual reality*), dan bentuk “ruang-nya” sendiri (*cyberspace*).

Terkait keamanan dan pertahanan siber, ruang siber merupakan ruang virtual yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi. Oleh sebab itu, ada banyak terminologi dan interpretasi yang dihubungkan dengan konsep keamanan dan pertahanan siber. Hal ini menyebabkan, konsep keamanan dan pertahanan siber tidak lagi hanya menyentuh wilayah teknologi tapi telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional (sekuritisasi). Atas dasar itulah, keamanan siber saat ini dilihat sebagai bagian dari kebijakan yang dibuat oleh sektor keamanan negara, yang tidak lagi menggunakan kekuatan bersenjata (*use of force*), namun cara-cara non-koersif lainnya.

Kebijakan keamanan siber digunakan untuk menghadapi risiko ekonomi dan kebebasan sipil, spionase, termasuk serangan militer atau teroris, yang kesemuanya dilakukan melalui medium internet. Menggunakan perspektif mazhab Kopenhagen terkait sekuritisasi, apapun yang membentuk ancaman terhadap sebuah kelompok, entitas yang memiliki nilai-nilai tertentu, cara hidup, atau ideologi, dapat dikategorikan sebagai masalah keamanan. Spektrum ancaman di era *cyberpolitics* ini berkembang menjadi sangat luas.

Politik siber sangat terkait dengan ruang siber. *Cyberpolitics* adalah sebuah terminologi yang diciptakan, berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandai-andaian dan realitanya sendiri.

Penulis melihat di masa depan, *Cyberpolitics* akan menjadi ranah dalam berinteraksi politik di masa depan. Semua *stakeholder* bidang politik akan menggunakan medium siber

---

33 *Ibid*, 35.

untuk mengejar kepentingannya masing-masing, baik untuk memilih maupun dipilih. Ruang siber akan menjadi jembatan antara dunia nyata dengan *constructive reality*, di mana politik akan menjadi “pihak” yang mengambil banyak keuntungan darinya. Realita ini membuat cakupan dari ilmu politik menjadi sangat luas, sehingga menawarkan perspektif baru dalam memahaminya. Untuk itu, penulis merekomendasikan bahwa kajian-kajian yang membahas tentang konsep *cyberpolitics* mulai lebih banyak dibahas dan diteliti di kalangan akademisi-akademisi ilmu politik, agar perpaduan antara ilmu politik dengan TI ke depannya dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boothby, William. H. *Conflict Law: The Influence of New Weapons Technology, Human Rights and Emerging Actors*. The Hague: TMP Asser Press, 2014.
- Choucri, Nazli. *Cyberpolitics in International Relations*. Cambridge: MIT Press, 2012.
- Vestberg, Hans. “Ericsson CEO to Shareholders: 50 Billion Connections 2020.” *Ericsson*, 13 April 2010. Diakses 7 Februari 2019. <http://www.ericsson.com/thecompany/press/releases/2010/04/1403231>.
- Fenz, Stefan. *Cyberspace Security: A Definition and A Description of Remaining Problems*. University Vienna and Institute of Government & European Studies, 2005.
- Ghernaoui, Solange. *Cyber Power: Crime, Conflict and Security in Cyberspace*. Lausanne: EPFL Press, 2013.
- Huldt, Bo, dkk (ed). *The Emerging Global Security Environment*. Vasteras: The Swedish National Defense College, 2013.
- Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Nasrullah, Rulli. *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*. Jakarta: Kencana, 2014.
- NATO CCDCOE. “Cyber Definitions.” NATO CCDCOE, tanpa tanggal. Diakses 12 Februari 2019. <https://ccdcoe.org/cyber-definitions.html>.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Sayuti, Solatun Dulah. *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Soewardi, Bagus Artiadi, *Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang tangguh bagi Indonesia, Media Informasi Ditjen Pothan Kemhan*, Maret 2013.
- Triwahyuni, Dewi dan Tine Agustin Wulandari. “Strategi Keamanan Cyber Amerika Serikat.” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2016): 110.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

# Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik

## *The Existence of The Political Parties in Public Perception*

Efriza\*

\*Dosen Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara  
email: efriza.riza@gmail.com

---

### ***Riwayat Artikel***

Diterima 15 Maret 2019  
Direvisi 21 April 2019  
Disetujui 2 Mei 2019

### ***Abstract***

*A democratic country needs political parties. They become the driving force in the implementation of democracy in Indonesia considering the important role that they play in various political processes in the legislature, government, and other state institutions. Given the importance of political parties in Indonesia in the Reform era, it turns out that most problems come from political parties. This paper aims to gain an understanding of the development and role of political parties in the Reform era based on the public perception of the existence of political parties. Based on the objective of the study, the significance of this study can hopefully be elicited, which is to provide an understanding and an input on the development and role of political parties in the Reform era. Results of the study suggests that public perception of the performance of political parties as political infrastructure was still poor and that political parties were also responsible for the poor performance of the political superstructure institutions. Therefore, the researcher recommends that political parties internally need to strengthen party institutionalization, while on the other hand, there needs to be an effort to simplify party systems in Indonesia.*

*Keywords: Political Parties; Democracy; Reform; Public Perception.*

### ***Abstrak***

Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab peran penting dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Mengingat pentingnya posisi partai politik di Indonesia pada era reformasi ini, malah ternyata letak permasalahan ada di partai politik. Penulisan ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan dan peran partai politik di era reformasi berdasarkan persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Dari tujuan itu diharapkan dapat dihasilkan kegunaan kajian ini, yakni memberikan pemahaman dan masukan terhadap perkembangan dan peran partai politik di era reformasi ini. Penulisan ini menemukan fakta bahwa persepsi publik atas kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik masih buruk dan partai politik juga dianggap bertanggung jawab atas masih buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik. Oleh karena itu, rekomendasi yang ditawarkan adalah partai politik secara internal perlu melakukan penguatan institusionalisasi partai, di sisi lain perlu adanya upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.

Kata Kunci: Partai Politik; Demokrasi; Reformasi; Persepsi Publik.

## Pendahuluan

Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik dan pemilihan umum (Pemilu). Keberadaan partai politik semakin penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan pemimpin. Tetapi partai politik dibuat tidak hanya untuk memerintah. Partai politik juga untuk menyalurkan *collective will*—mewakili kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat.<sup>1</sup> Terkait dengan kebijakan publik, maka ada batasan yang lengkap mengenai partai politik seperti dikemukakan oleh Mark N. Hagopian bahwa, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu.<sup>2</sup>

Begitu pentingnya Partai Politik, sehingga diasumsikan bahwa tak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini cukup sering dikemukakan. Ini didasari oleh fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar penting bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas.<sup>3</sup> Meski begitu pentingnya kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi, tetapi tanpa partai politik yang kuat maka tak akan ada demokrasi yang kuat.<sup>4</sup>

Partai politik pada awalnya dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai

kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diuraikan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dalam bentuk program yang akan dilaksanakannya dengan cara konstitusional untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.<sup>5</sup>

Penafsiran di atas, jelas mencerminkan bahwa faktor ideologi tak bisa diabaikan, sebab partai politik mesti memiliki ideologi yang berfungsi tak hanya sebagai identitas pemersatu,<sup>6</sup> serta juga memberikan karakter tersendiri yang dapat menjelaskan mengapa suatu partai harus ada, dan karakter perbedaan antar partai-partai politik, di samping itu ideologi juga sebagai tujuan perjuangan partai. Di banyak sistem demokrasi, keberadaan ideologi tersebut diturunkan dalam manifesto dan program partai yang tentu juga berbeda dengan partai lainnya. Perbedaan program kerja partai ini memudahkan masyarakat untuk menentukan pilihannya, program kerja mana yang sesuai dengan keadaan hidup masyarakat itu sendiri, dan program kerja partai tentunya akan menjadi sikap dasar partai dalam proses pengelolaan kebijakan negara.<sup>7</sup>

Penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa betapa pentingnya partai politik sebagai suatu sarana untuk manusia atau warga negara dalam membentuk suatu organisasi dengan tujuan mewujudkan aspirasinya, yang kemudian diwujudkan dengan fungsi-fungsi politik itu sendiri. Secara umum fungsi partai politik dapat dikelompokkan menjadi empat

1 Antonio Pradjasto, "Partai Politik tak Hanya Kemampuan Memerintah," *Jurnal Jentera*, no. 16, (Juni 2007), 26

2 Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), xv

3 Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 45

4 Sebastian Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia: Assemen terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2007), v

5 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 404

6 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), 115

7 Pramono Anung Wibowo, *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen* (Jakarta: Kompas, 2013), 272-273

fungsi utama. Keempat fungsi utama tersebut yakni: artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen. Antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya memiliki keterkaitan, dan memiliki pengaruh besar terhadap ekspektasi dan animo anggota maupun masyarakat umum terhadap suatu partai politik.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan partai politik di Indonesia pada awal runtuhnya Orde Baru, keran kebebasan politik masyarakat terbuka luas, sehingga diikuti menjamurnya partai politik sebagai akibat dari pembelengguan politik yang terjadi semasa rezim itu berkuasa. Menariknya hingga sekarang ini, kebangkitan partai politik masih menonjol, malah dianggap bahwa kita terjebak oleh perangkap *partyocracy* (kedaulatan di tangan partai) ketimbang demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). *Partyocracy* memungkinkan pengendalian atas minimal dua lembaga, yakni kepresidenan (termasuk kepala-kepala daerah) dan parlemen (nasional dan lokal). Dua lembaga itu memiliki hak konstitusional, mulai dari regulasi sampai implementasi, termasuk perekrutan sumber daya manusia.<sup>9</sup>

Nyatanya, kebangkitan partai politik di era reformasi malah menimbulkan paradoks. Di satu sisi, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan konstitusi bangsa telah menyiratkan peran partai politik sebagai institusi penentu keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Sebab di tangan partai politik, dan bukan institusi lain, sebenarnya siapa-siapa saja yang akan mengendalikan bangsa ini ditentukan. Misalnya, hanya pada partai politik terletak hak mengusulkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (2)) dan hanya institusi inilah yang menjadi peserta pemilu untuk mencalonkan para wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) seperti diatur dalam Pasal 22E ayat (3). Selain itu, secara yuridis, partai politik memiliki posisi kuat karena keputusan pembubaran sebuah partai politik tidak bisa sembarangan diputus pemerintah, melainkan harus melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 24C ayat (1).<sup>10</sup> Namun, di sisi lain, dalam hubungan dengan masyarakat, bahwa partai politik acapkali menjadi sebuah institusi yang dicurigai dan bahkan dijauhi. Perkembangan dewasa ini mengarah pada situasi yang mana sebuah institusi penentu yakni partai politik, nampak menjelma sebagai lembaga yang semakin tidak dipercayai oleh publik.<sup>11</sup> Asumsi itu menyumbulkan pertanyaan besar dalam penelitian ini, Bagaimana perkembangan dan peran partai politik pada era reformasi ini? Dan, Bagaimana persepsi publik terhadap peran partai politik di era reformasi ini?

## Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan sebuah kajian untuk memahami tentang perkembangan dan peran partai politik di era reformasi dalam persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Agar dapat memperoleh jawaban dari permasalahan dalam penulisan ini, maka penulisan ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, surat kabar, majalah, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah dalam kajian ini.<sup>12</sup> Dalam melakukan prosedur

10 Rully Chairul Azwar, "Partai Politik Di Tengah Ancaman "Virus" Oligarki dan Politik Kartel," *Jurnal Ketatanegaraan*, no. 5 (November 2017), 2

11 Firman Noor, *Quo Vadis Demokrasi Kita? Sebuah Respon Terhadap Konsolidasi Demokrasi Indonesia* (Jakarta: RMBooks, 2015), 3

12 Lihat, M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003); dan pelajari juga, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

8 Salang, *Potret Partai Politik*, 8

9 Indra J. Pilliang, "Kebangkitan 'Partyocracy,'" *Koran Jakarta*, 27 September 2014, 4

studi pustaka bahwa informasi-informasi yang dihimpun dari sumber kepustakaan adalah yang relevan dengan kajian dari penulisan ini, termasuk juga dalam penelitian ini akan diuraikan data-data yang dihasilkan dari lembaga-lembaga survei untuk menjelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap peran dari partai politik di era reformasi ini. Sehingga demikian, dari penulisan ini dapat diuraikan tujuan yang ingin dihasilkan yakni untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan dan peran partai politik di era reformasi berdasarkan persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Dari tujuan itu maka diharapkan dapat dihasilkan kegunaan kajian ini, bahwa kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan terhadap perkembangan dan peran partai politik di era reformasi ini. Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa dalam melakukan kajian ini diharapkan penulisan ini dapat dihasilkan temuan kebaruan dari hasil proses penulisan ini.

### Partai Politik Secara Konsep

Mendefinisikan partai politik tidaklah sederhana. Mendefinisikan partai politik umumnya bersifat normatif dan jawaban yang diberikan oleh para ilmuwan politik berbeda-beda dari waktu ke waktu. Tetapi, ada anggapan umum mengenai partai politik yang berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.<sup>13</sup>

Meski banyak definisi-definisi partai politik namun beberapa contoh dikemukakan sebagai berikut. Menurut Edmund Burke dikutip oleh Katz dan Crotty bahwa, "Partai politik adalah sekumpulan orang yang

bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka, berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakati".<sup>14</sup> Sedangkan, menurut Giovanni Sartori bahwa, "Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik".<sup>15</sup>

Dari hadirnya partai politik ini yang penting dipahami adalah meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir, dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Pernyataan itu, serupa dengan yang diungkapkan oleh Alexandra Cole bahwa, "Pembentukan partai politik pada umumnya dikaitkan dengan upaya memperluas kepentingan dan pemerintahan representatif".<sup>16</sup> Partai politik juga dianggap sebagai perwujudan atau lambang negara modern. Bahkan, arti penting partai politik diungkapkan Richard M. Merelman dalam kata-kata puitis dalam kata pendahuluan buku: "*Party Politics and Pressure Groups A Comparative*", yang ditulis Maurice Duverger. Bahwa, "dari semua alat yang pernah didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, barangkali tidak ada yang lebih ampuh dari partai politik. Memang benar, politik modern tanpa partai politik sama saja dengan ikan yang berada di luar air".<sup>17</sup>

Meski begitu, batasan yang lebih lengkap mengenai partai politik seperti telah dijelaskan di atas, yaitu dikemukakan oleh Mark N. Hagopian bahwa, "Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi

14 Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik* (Bandung: Nusamedia, 2015), 4

15 Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, 404

16 Alexandra Cole, *Perbandingan Partai Politik: Sistem dan Organisasi, di Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 1)*, ed. John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, (Jakarta: Kencana, 2013), 249

17 Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, penerj. Laila Hasyim, (Bina Aksara, 1984), v

13 Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, 403

bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan”.<sup>18</sup>

Batasan-batasan tersebut, tampak jelas bahwa basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Jika batasan ini diberikan penafsiran, maka misalnya, penulis menggunakan pendapat dari Ramlan Surbakti bahwa, ideologi merupakan hal terpenting bagi partai politik, setiap partai politik mesti memiliki ideologi yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas pemersatu, tetapi juga sebagai tujuan perjuangan partai.<sup>19</sup>

Dapat dikatakan bahwa partai politik itu merupakan salah satu bentuk organisasi politik di luar struktur negara dan mempunyai posisi sebagai struktur antara (*intermediate-structure*) di antara suprastruktur pemerintahan negara dengan infrastruktur kehidupan bersama dalam masyarakat. Fungsi partai politik juga sangat penting dalam kegiatan bernegara, yang biasa dirumuskan sebagai: pertama, sarana komunikasi politik dan penyerap aspirasi politik; kedua, sarana sosialisasi politik dan pendidikan politik; ketiga, sarana rekrutmen politik; dan keempat, sarana pengatur dan peredam konflik dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Namun dalam perkembangannya, sangat disayangkan, bahwa kebanyakan partai politik modern menurut Andrew Heywood,<sup>21</sup> masuk dalam kategori apa yang oleh Otto Kirchheimer diistilahkan sebagai ‘*catch all party*’ atau ‘partai tangkap semua’.<sup>22</sup> Istilah

‘*catch all party*’ ini menunjukkan bahwa partai-partai politik yang secara drastis mengurangi muatan ideologis mereka dalam rangka untuk memenuhi sebanyak mungkin jumlah pemilih dan kemenangan dalam pemilihan umum.

Partai *catch all* tidak lagi mendasarkan pada satu ideologi atau platform dalam menentukan sikap politik. Jika melihat kecenderungan tersebut pada partai *catch all*, maka spektrum legitimasi partai politik ini adalah pada pertimbangan rasional partai. Pusat-pusat kekuasaan dan kewenangan yang tersebar menjadikan pertimbangan rasional sebagai landasan penentuan keputusan-keputusan politik, dengan kata lain partai politik ini menempatkan pragmatisme di depan.

### Partai Politik Sebelum Era Reformasi

Demokrasi, mempunyai aturan main yang mempercayakan produk-produk berupa keputusan kolektif, hal mana organisasi mempunyai tempat khusus. Dalam demokrasi, keputusan kolektif yang mengikat hanya bisa diraih lewat partisipasi. Partai politik adalah organisasi yang memiliki kegandaan hak dalam demokrasi: sebagai pemerintahan untuk rakyat dan dipilih oleh rakyat. Partai politik adalah representasi “aktor kolektif” dan legitimasi keputusannya hanya dapat dicapai melalui partisipasi. Partai sebagai “aktor kolektif” memungkinkan terbentuknya satu visi atas satu kekuasaan atas nama rakyat. Itulah sebabnya, penguasa otoriter pun dalam melegitimasi kekuasaannya, turut menggunakan partai politik.<sup>23</sup> Perkembangan partai politik di Indonesia turut menjelaskan hal tersebut.

Dalam perkembangan sejarah, bahwa lika-liku perjalanan partai politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari realitas pemilihan sistem kepartaian multipartai. Awal pembentukan organisasi modern terjadi segera sesudah

18 Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, xv

19 Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), 115

20 Jimly Asshiddiqie, “Penguatan dan Penataan Partai Politik di Masa Depan,” *Jurnal Ketatanegaraan*, no. 5, (November 2017), 35

21 Andrew Heywood, *Politik (Edisi Keempat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 393

22 Otto Kirchheimer, *Transformasi Sistem-Sistem Kepartaian Eropa Barat, di Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, ed. Ichlasul Amal, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996)

23 Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Partai Politik* (Jakarta: Closs dan 7 Strategic Studies, 2003), 7-8

adanya perubahan dalam kebijakan kolonial pada permulaan abad ke-20. Tidak bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi dengan Hindia Belanda tanpa kehadiran partai politik pada awal abad ke-20 tersebut. Jika sejarah dipahami sebagai proses, sebagai perjalanan kehidupan berbangsa, maka partai-partai yang bermunculan pada masa itu (termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun) mempunyai andil besar dalam pembentukan negara dan bangsa ini.<sup>24</sup>

Pada era kolonial, partai-partai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu pihak, dan dalam rangka memperkuat perjuangan merebut kemerdekaan di lain pihak. Karena itu, tidak mengherankan jika ideologi-ideologi besar seperti Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme mendasari pembentukan partai pada periode kebangkitan nasional. Meskipun menjadi wadah aspirasi dari kelompok dan/atau golongan ideologis berbeda-beda, partai-partai pada era kolonial turut memberikan kontribusi bagi pencarian sekaligus “penemuan” identitas ke-Indonesiaan yang mendasari pembentukan republik.<sup>25</sup>

Perkembangannya peranan partai politik mengalami fluktuasi pada era setelah merdeka. Secara konvensional, era setelah merdeka atau sebelum Orde Baru Soeharto runtuh biasanya dibagi ke dalam tiga periode, yakni rezim Demokrasi Parlementer (1949-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan Demokrasi Pancasila atau yang dikenal dengan Orde Baru (1966-1998). Hal mana setelah kemerdekaan, partai-partai politik diberi ruang hidup seluas-luasnya sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 4 November 1945. Maklumat tersebut berisi bahwa “Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur

segala faham yang ada dalam masyarakat”. Selanjutnya, Maklumat itu memuat bahwa pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilakukan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Sejak keluarnya Maklumat itu maka berdirilah partai-partai politik. Umumnya partai-partai politik yang didirikan adalah kelanjutan dari organisasi-organisasi sosial dan partai politik yang sudah dibentuk pada masa kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan pendudukan Jepang. Di antara partai politik yang berdiri adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) untuk menyebut beberapa partai yang penting.

Dalam pembentukan partai-partai politik, pengaruh ikatan primordial tampak jelas dalam pengorganisasian. Pengaruh ikatan-ikatan primordial, seperti agama, suku, dan kedaerahan, semakin terlihat dalam memengaruhi pengorganisasian partai politik. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencari dukungan massa.<sup>26</sup> Dapat dikatakan bahwa masa Demokrasi Parlementer adalah periode awal eksperimen demokrasi dengan tingkat dinamika kehidupan partai yang tinggi, bahkan dikenal sebagai era pemerintahan partai-partai. Dalam era ini partai politik memiliki peran yang begitu besar dalam setiap proses politik, di parlemen maupun di kabinet. Meski begitu, sayangnya partai politik digunakan hanya semata sebagai instrumen perjuangan untuk perebutan kursi atau jabatan sehingga yang terjadi adalah pemerintahan tidak pernah bertahan lama dan kabinet berganti-ganti.<sup>27</sup>

Pemikiran Soekarno tentang partai politik telah cukup jelas. Soekarno adalah seorang yang anti sistem multipartai model Barat dan sistem multipartai parlementer. Dalam pandangan Soekarno, partai politik memperlemah perjuangan terhadap penjajah

24 Kartawidjaja dan Kusumah, *Kisah Mini Partai Politik*, 1

25 Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 21

26 Sebastian Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia*, 22

27 Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, 21

dan usaha-usaha mengisi kemerdekaan. Partai politik adalah sumber perpecahan. Pandangan yang berbeda-beda di antara partai politik akan memecah belah bangsa. Kecenderungan partai politik untuk merebut kekuasaan politik menghasilkan konflik politik yang hebat di dalam masyarakat.

Penggunaan kabinet parlementer semenjak Oktober 1945 dan sistem multipartai semenjak November 1945 tidak membuat Soekarno memprotes tindakan tersebut, padahal pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bahkan UUD 1945 tidak pernah dilakukan perubahan. Demikian juga dengan penggunaan kabinet parlementer dan sistem multipartai dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) tidak membuat Soekarno menentang semenjak awal. Setelah berjalan selama tiga tahun, barulah Presiden Soekarno mulai bersuara menuntut pembubaran partai politik.

Praktik-praktik kabinet parlementer dan sistem multipartai selama periode 1950-1957 telah menghasilkan ketidakstabilan politik karena konflik politik antar partai politik yang hebat. Hal tersebut kemudian ditambah dengan adanya pergolakan di daerah-daerah yang melahirkan konflik bersenjata. Oleh karena itu, ada alasan yang kuat bagi Soekarno untuk berkata bahwa kabinet parlementer dan sistem multipartai telah terbukti tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Karena itu konsep-konsep yang berasal dari Barat tersebut harus ditinggalkan.<sup>28</sup>

Seiring dengan melemahnya demokrasi konstitusional di Indonesia, Presiden Soekarno melaksanakan idenya untuk membentuk kekuatan politik non-partai politik yang akan digunakan untuk mengimbangi partai politik. Kekuatan politik non-partai politik adalah golongan fungsional (kemudian berkembang

menjadi Golongan Karya atau Golkar) dan militer yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Rencana untuk memperkuat kekuatan politik non-partai politik disertai dengan rencana yang sistematis untuk memperlemah partai politik sebagai organisasi dan sebagai bagian pembuat kebijakan politik (*decision maker*).

Peranan politik Presiden Soekarno yang semakin membesar semenjak 1957 mencapai puncaknya dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah dekrit tersebut, Soekarno dengan leluasa mendikte partai-partai politik dengan menjadi penguasa mutlak yang menentukan komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara). Partai-partai politik tidak berfungsi, bahkan jumlahnya dikurangi. Dari 28 partai politik, hanya tinggal 10 Partai yaitu: PNI, PKI, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Partai Indonesia (Partindo). Dengan demikian, kehidupan politik dan kepartaian mutlak dikuasai oleh Soekarno.<sup>29</sup>

Keberlangsungan Demokrasi Terpimpin ternyata tidak berumur panjang. Benar apa yang dikatakan oleh Hatta bahwa Demokrasi Terpimpin bagaikan rumah kertas, yang tidak akan berumur panjang. Akibat tragedi Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G 30S/PKI), Soekarno jatuh dari kursi kepresidenan. Meskipun oleh MPRS Soekarno telah diangkat menjadi Presiden seumur hidup, tetapi MPRS kemudian mencabut ketetapanannya. MPRS menolak pertanggungjawaban yang diberikan Soekarno. Dengan demikian maka mandat MPRS terhadap Soekarno dicabut. Dengan

28 Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia*, 23

29 Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia*, 23-24

diberhentikannya Soekarno maka tamatlah Demokrasi Terpimpin, terkubur bersama penggagasnya.<sup>30</sup>

Periode Demokrasi Terpimpin kemudian digantikan dengan Demokrasi Pancasila oleh Pemerintah Orde Baru. Meski begitu, Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto, sama-sama menunjuk pada era pemerintahan otoriter yang ditandai merosotnya peranan partai-partai dan menguatnya peranan militer. Pada era Demokrasi Terpimpin, peranan partai politik semakin termarginalkan, Soekarno mengatur pengakuan dan pengawasan terhadap partai politik. Jumlah partai politik di era Demokrasi Terpimpin ini dipangkas dan ideologi yang diperbolehkan hanya ada tiga yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Marginalisasi partai politik terus berlangsung hingga era Orde Baru, hal mana Soeharto hanyalah penerus visi Soekarno tentang partai politik. Kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap partai politik tetap dipertahankan oleh elite politik Orde Baru.<sup>31</sup>

Orde Baru melihat bahwa biang kekacauan yang mengganggu stabilitas politik, antara lain, adalah partai-partai politik. Partai-partai politik dianggap berperan mengganggu stabilitas. Hal ini karena berdasarkan pengalaman Demokrasi Parlementer hal mana pemerintah selalu berganti-ganti diakibatkan ulah partai-partai politik. Sehubungan dengan itu langkah yang dilakukan Orde Baru adalah melakukan penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam perkembangannya, kesembilan partai politik yang ada (Parmusi, NU, PSII, Perti, PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba) dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu: pertama, kelompok materiil-sprituil yang terdiri dari PNI, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, dan Murba; dan kedua, kelompok sprituil-

30 Lili Romli, Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan, *Jurnal Politika*, no. 2, (2006), 20

31 Maswadi Rauf, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan," *Jurnal Politika*, no. 2, (2006), 9, dan Eep Saefulloh Fatah, Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 194

materiil yang terdiri dari Parmusi, NU, PSII, dan Perti. Setelah Pemilu 1971, tepatnya tahun 1973, kedua kelompok tersebut diharuskan melakukan fusi. Kelompok pertama, yang terdiri dari partai-partai Islam, tergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok Kedua, yang terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen, membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan adanya fusi ini partai-partai politik yang ada menjadi tiga, yaitu, PPP, PDI, dan Golkar.<sup>32</sup>

Orde Baru, jauh lebih sukses dibandingkan Soekarno dalam hal memperlemah partai politik melalui deparpolisasi, massa mengambang (*floating mass*), dan memberlakukan azas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua partai politik (termasuk juga Organisasi Massa); tentu saja pemberlakuan azas tunggal itu memengaruhi eksistensi PPP sebagai partai berbasis Islam. Sementara itu, upaya Deparpolisasi dengan cara bahwa partai politik yang diistilahkan oleh Orde Baru adalah partai-partai politik selain Golkar. Golkar dianggap bukan partai politik. Deparpolisasi bertujuan untuk mengurangi pengaruh partai politik di dalam masyarakat dengan merusak citra partai politik di mata masyarakat, mempersulit warga masyarakat untuk menjadi anggota partai politik, dan mengucilkan serta tidak melayani masyarakat yang menjadi anggota atau bersimpati kepada partai politik. Secara lambat-laun, namun pasti, di dalam masyarakat terbentuk sikap antipati terhadap partai politik dan citra buruk tentang partai politik.

Kebijakan massa mengambang yang diterapkan oleh Orde Baru adalah kebijakan yang mengharuskan warga masyarakat di daerah pedesaan tidak bergabung dengan partai politik, hal mana gerak partai politik non-Golkar hanya sampai tingkat kecamatan, sementara Golkar yang diidentifikasi sebagai non-partai terlepas dari dampak itu. Meski begitu terjadi pengupayaan sistimatis yang

32 Romli, Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan, 21

dilakukan oleh aparat birokrasi untuk mengucilkan PPP dan PDI. Massa pemilih di pedesaan diusahakan dengan segala cara untuk tidak menjadi bagian dari partai politik dengan mencegah mereka untuk dipengaruhi oleh partai politik. Situasi ini memberi peluang bagi Golkar untuk menggarap massa pemilih di pedesaan karena Golkar hadir melalui Camat, Kepala Desa, dan perangkat desa lainnya. Massa 32 tahun kekuasaan Orde Baru telah menghasilkan budaya politik anti partai politik atau curiga terhadap partai politik yang kuat di dalam masyarakat. Orde Baru telah meninggalkan warisan menghambat perkembangan partai politik di Indonesia.<sup>33</sup>

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan dengan adanya kebebasan mendirikan partai politik, dan pilihan menerapkan sistem multipartai merupakan sesuatu yang jamak (natural) di dalam masyarakat Indonesia, meski sistem kepartaian yang memperoleh dukungan riil dari para pemilih pada dasarnya lebih mengarah kepada sistem yang bercorak multipartai moderat, jika dilihat dari segi jumlah. Argumen demikian didasari oleh fakta hasil lima kali pemilu secara demokratis yang pernah dilakukan, yaitu Pemilu 1955, Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Lima kali pemilu ini menghasilkan partai-partai yang memperoleh dukungan cukup berarti pada kisaran empat sampai sepuluh partai saja. Partai-partai lainnya hanya memperoleh dukungan sangat kecil.<sup>34</sup> Jadi, pasca reformasi pertumbuhan dan peran partai politik kian membesar dibandingkan dengan dua era sebelumnya yakni Orde Lama dan Orde Baru.

### Partai Politik di Era Reformasi

Setelah mengalami pengkerdilan peran partai pada masa Orde Baru, partai politik kembali bergeliat pada era reformasi yang membawa

angin segar. Runtuhnya pemerintahan Soeharto mengubah tatanan politik di Indonesia, termasuk di dalamnya sistem kepartaian. Jika pada masa Orde Baru Indonesia dikuasai oleh pemerintahan yang otoritarian dengan sistem partai tunggalnya, maka pada era reformasi demokrasi langsunglah yang berkuasa. Akhirnya, setiap individu di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, berserikat dan berekspresi. Euforia politik ditandai dengan kemunculan begitu banyak partai politik.

Kemunculan banyak partai politik pada era Reformasi ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintahan *interregnum* B.J. Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai. Dengan kebijakan ini, euforia politik, demokrasi dan kebebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban partai politik untuk menjadi Pancasila sebagai satu-satunya asas, seperti ditetapkan pada Undang-Undang Keormasan tahun 1985.

Masyarakat secara beramai-ramai mempersiapkan partai politik untuk ikut serta dalam pesta demokrasi atau pemilu yang akan berlangsung pada tahun 1999. Jika pada masa Orde Baru hanya terdapat dua partai dan satu golongan karya, pada tahun 1999 tercatat ada 141 partai politik dan 48 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II (DPRD II) yang jatuh pada bulan Juni 1999. Banyaknya partai politik pada masa ini membuat Indonesia secara mutlak menganut sistem kepartaian multipartai.<sup>35</sup>

Setelah tahun 1999, partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia. Partai tidak lagi hanya sebagai boneka dan perpanjangan tangan bagi penguasa seperti di masa Orde Baru, tetapi partai pemegang peranan penting

33 Rauf, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian," 9-10

34 Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), 66

35 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 99-100

hampir di semua lini kehidupan politik. Partai menjadi kendaraan politik satu-satunya dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), serta menjadi pengusung calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tidak hanya kendaraan politik, partai politik seperti telah dijelaskan di atas bahwa memiliki banyak fungsi lain, yakni untuk komunikasi politik, pendidikan politik, dan pengatur konflik.<sup>36</sup>

Selama 21 tahun Reformasi yang telah kita lalui, setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, pendirian partai politik masih tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Meski terjadi fluktuasi partai-partai politik sebagai partai politik peserta pemilu, seperti, partai-partai politik yang memasuki arena Pemilu 2004 lebih sedikit kalau dibandingkan dengan Pemilu 1999, tetapi Pemilu 2009 lebih banyak jika dibandingkan Pemilu 2004, sedangkan Pemilu 2014 lebih sedikit kalau dibandingkan dengan Pemilu 2019 mendatang.

Rinciannya adalah Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu, lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 1999 yang terdiri dari 48 partai politik sebagai peserta pemilu. Pemilu 2009 mengalami kenaikan drastis bahwa jumlah partai yang menjadi peserta pemilu di tingkat nasional sebanyak 38 partai dan 6 partai lokal di Aceh, tetapi mengalami penurunan pada Pemilu 2014 lalu bahwa jumlah partai yang lolos sebagai peserta pemilu hanya 12 partai nasional dan 3 partai lokal. Sekarang ini, menuju Pemilu 2019 jumlah partai yang lolos sebagai peserta pemilu adalah 16 partai nasional dan 4 partai lokal.

Melihat realitasnya, dalam pemilu-pemilu yang telah berlangsung bahwa partai-partai baru akan terus berdatangan dan dapat memasuki arena pemilu, ini tak lepas dari belum terlembaganya proses penyelesaian

konflik internal di dalam partai. Dalam banyak kasus, partai-partai baru itu tidak didirikan oleh para elite politik baru, melainkan oleh para elite politik lama, hingga sekarang ini memasuki Pemilu 2019. Ketika mereka kecewa dan tersingkir di dalam arena konflik, khususnya dalam perebutan kepemimpinan partai, mereka berusaha membentuk partai-partai baru. Partai-partai baru itu dibaratkan seperti *'old wine in new bottle'*.<sup>37</sup> Misalnya, partai-partai yang berasal dari partai Golkar, yang baru-baru ini hadir seperti: Hanura, Gerindra, Nasdem, dan Partai Berkarya merupakan sempalan partai Golkar.

Melihat realitas di atas, dan ditambah fakta setelah pemilu sebelumnya yang menunjukkan bahwa partai-partai baru dapat memperoleh kursi di lembaga DPR, maka memasuki Pemilu 2009, tampak bahwa partai-partai di Indonesia perlahan tetapi pasti secara drastis mengurangi muatan ideologis mereka dalam rangka untuk meraih sebanyak mungkin jumlah pemilih. Partai-partai politik cenderung memilih menjadi *catch all party*. Tampaknya pembentukan dan pemeliharaan konstituen tak lagi menjadi agenda kerja partai. Begitu pula dalam menjalankan fungsi partai, tampak sebagian baru akan terlihat gregetnya saat tibanya pemilu. Merawat konstituen dengan berbasis program jangka panjang tidak menjadi prioritas. Karena kebutuhan politik jangka pendek berupa mendulang suara, lebih mendesak, sehingga partai lebih menempuh langkah-langkah instan, tak terkecuali sikap tak acuh partai untuk membuat pola rekrutmen internal partai yang bagus, malah perilaku partai politik itu sendiri yang lebih memilih menempuh jalan pintas dengan melakukan rekrutmen anggota yang dilakukan secara transaksional dan tertutup.<sup>38</sup>

37 Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, 66

38 Syaifullah Ma'shum, *DPR Terhormat DPR Dihujat: Refleksi Lima Tahun di DPR Periode 2004-2009 (Catatan Sejarah Sang Wakil Rakyat)*, (Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2012), 3

36 Aisyah Putri Budiarti, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), xiii

Akibat dari perilaku politisi dan partai politik dalam rangkaian pileg, pilpres, dan pilkada – justru mengkonfirmasi terbangunnya watak “partai mengambang” (*floating party*), perwujudan partai politik tumbuh dengan kaki lemah atau malah tak berkaki di masyarakat.<sup>39</sup>

Harus dipahami bahwa, perubahan organisasi partai politik itu merefleksikan perubahan dalam masyarakat dan politik. Ketika partai politik lebih menekankan kemenangan pemilu, dengan mengurangi arti penting keanggotaan partai. Memang *catch all party* dapat memenangkan pemilihan dengan berupaya merebut sebanyak mungkin kalangan pemilih. Tetapi pada saat yang sama, para pemilih tampaknya kurang mengenali jati diri partai politik akibatnya pemilih mengubah pilihannya dari satu pemilu ke pemilu lain, sikap ini pada akhirnya dianggap suatu kewajiban, meski sebenarnya seperti diungkapkan di atas bahwa ini menunjukkan perwujudan partai politik dengan kaki lemah atau malah tak berkaki di masyarakat.<sup>40</sup>

Jika di masa Orde Baru, kita berhadapan dengan gejala “massa mengambang” (*floating mass*), masyarakat pemilih yang berkaki lemah atau malah tidak berkaki. Karena gerak partai politik dibatasi hingga tak bisa menjangkau basis pemerintahan terendah (di tingkat desa), tempat para pemilih sejatinya beraktivitas, masyarakat dipaksa untuk tidak beraktivitas di dalam dan berasosiasi dengan partai politik. Dalam “pemilu,” mereka menjadi massa mengambang yang diperebutkan. Lalu, Golkarlah yang merengguk keuntungan karena tak menyebut dirinya partai politik sehingga memiliki ruang gerak leluasa untuk menggalang calon pemilih.

Bagi Pemerintahan Orde Baru, partai politik telah menjadi sumber penyebab instabilitas politik dan kegagalan ekonomi

39 Eep Saefulloh Fatah, “Gejala Partai Mengambang,” *Kompas*, 18 November 2006, 42

40 Alexandra Cole, *Perbandingan Partai Politik*, di Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 1), ed. John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, 254

sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Sikap politik pemerintahan Orde Baru menginginkan adanya sistem kepartaian yang ramping dengan jumlah partai yang terbatas; dan terjaminnya hubungan legitimasi di antara masyarakat dengan pemerintahan. Maka, pembatasan peran partai politik dan hegemonisasi Golkar menjadi pilihan pemerintahan Orde Baru.<sup>41</sup>

Masa itu telah lama berlalu dan menjadi sejarah hitam politik semata. Demokratisasi semestinya menguatkan kembali kaki masyarakat dan mendorong kompetisi antarpolitical di atas lahan baru yang serba terbuka. Celaknya, yang kemudian tumbuh dari lahan baru ini adalah “partai mengambang”, bahkan efektivitas partai politik cenderung tidak bertanggungjawab dan tidak tanggap terhadap konstituennya, setidaknya menurut Eep Saefulloh<sup>42</sup> bahwa empat perilaku buruk partai politik secara institusi tampak mudah dicermati, yakni nir-ideologi, nir-identitas, tipe personalistik dan cenderung oligarkis, dan nir-konstituen; untuk memahaminya sebagai berikut.

*Pertama*, nir-ideologi. Partai mengambang tidak punya ideologi kecuali pragmatisme. Sepanjang masa Orde Baru, ideologi memang diberangus. Sepeninggal Soeharto, ideologi-ideologi tidak serta-merta bertumbuhan. Faktanya, hanya pragmatisme yang ternyata tersisa dari setiap puing ideologi lama. Pembumihangusan ideologi menyisakan pragmatisme sebagai kerak, abu atau ampasnya.

Bendera-bendera ideologi atau aliran memang dikibarkan, tetapi sejatinya hanya menggarisbawahi keseragaman pemihakan pada pragmatisme itu. Umumnya partai era reformasi pun nyaris seragam, bahkan partai-partai memilih untuk berusaha seragam, gejala ini mulai terlihat sejak Pemilu 2009 lalu, bahwa partai-partai berbasis agama misalnya: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Damai

41 Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*, 194

42 Fatah, “Gejala Partai Mengambang,” 42

Sejahtera (PDS), dan Partai Amanat Nasional (PAN); dengan kesadaran diri mendeklarasikan menjadi partai terbuka untuk rumah berbagai golongan yang ada di masyarakat. PKS yang awalnya mempunyai basis dari kalangan Islam yang akhirnya menyatakan gagasan untuk menjadi partai terbuka atau “PKS untuk semua” dengan alasan bahwa PKS adalah partai yang menjunjung tinggi pluralitas. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang mengklaim dirinya sebagai partai untuk semua. Hal tersebut terjadi karena partai-partai politik itu lebih mengikuti logika elektoral dengan menjadi partai yang mengincar segmen pemilih yang lebih luas (*catch all party*), agar ceruk pasar pemilih mereka nantinya secara statistik dapat lebih besar, dibandingkan masih tetap merepresentasikan basis sosial partai berdasarkan semangat pendirian partai diawal. Partai-partai itu akhirnya mengambang karena tak berkaki di tengah kemajemukan masyarakat kita.

*Kedua*, nir-identitas. Partai-partai kita di era reformasi ini, nyaris tanpa kecuali, tak punya ketegasan orientasi politik dan program. Sesungguhnya, ini terjadi sejak tahun 1999 hingga sekarang. Semua partai politik, berusaha mengurus semua hal, menjangkau semua dimensi persoalan. Mereka tak tertarik untuk mempertajam orientasi politik dan programnya ke sektor persoalan, atau isu spesifik yang hidup di tengah masyarakat. Konsekuensinya, secara fisik kita punya banyak partai, tetapi sulit membedakan identitas politik yang satu dengan yang lain. Nyaris semua partai yang nir-identitas ini pun gagal mewakili keragaman aspirasi masyarakat pemilih. Mereka mengambang karena menyikapi berbagai isu tanpa platform.

*Ketiga*, tipe personalistik dan cenderung oligarkis. Tipe kepartaian di Indonesia saat ini (bahkan menuju pemilu 2019) hanya terbagi menjadi dua, yakni tipe programmatik dan tipe personalistik. Tipe programmatik yang menitikberatkan pada aktivitas program-

program yang dibawa oleh kandidatnya seperti: Partai Golkar, PKS, dan PSI. Sedangkan tipe personalistik yakni partai yang bertumpu pada patronase yang kuat dengan adanya pemimpin yang dianggap kharismatik, seperti: PDI Perjuangan, PAN, PKB, Gerindra, Hanura, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Berkarya, PPP, Partai Garuda, PKPI, Partai Perindo, dan Partai Bulan Bintang. Meski begitu, umumnya partai politik bertahan pada karakter kepemimpinan dan organisasi yang oligarkis. Pusat kekuasaan tumbuh di sekitar sedikit elite utama di pucuk organisasi partai, sehingga sulit untuk diterapkannya sistem otonomi kepartaian. Kepentingan dan kenikmatan partai pun tak terdistribusikan ke luar lingkaran elite utama itu. Akhirnya, operasi partai terkendali di tangan segelintir pihak, ini sebuah realitas dari oligarkis partai. Bahkan, tentu saja aspirasi populis dari akar rumput, kerap sulit dikonversi menjadi kebijakan partai, ini menunjukkan bahwa secara normatif partai politik memang wadah berkiprahnya setiap kader, namun secara riil politik, partai politik adalah dunia kaum elite dengan watak otokratik.

Dalam nuansa ini maka tidak heran kalau kemudian berbagai peristiwa politik – di lingkungan partai maupun di luar partai, apakah yang berupa konflik maupun konsensus dan acara-acara hajatan besar yang diselenggarakan partai politik – lebih ditentukan oleh kekuatan eksklusif dari balik layar yang berasal dari aspirasi para elite. Bahkan, pelibatan massa dan kader sejatinya hanyalah bersifat semu. Tak lebih dari sekadar penggembira dan pemberi legitimasi atas kehendak para elite itu.

*Keempat*, yang utama, nir-konstituen. Secara umum, partai-partai era reformasi masih dicirikan oleh kemiskinan kemauan dan kemampuan profesional mereka dalam membentuk serta memelihara konstituen. Sebagian besar partai mendekati masyarakat

manakala mereka membutuhkan suara dukungan dalam pemilu. Partai politik mendekat manakala membutuhkan pemilih dan serta-merta menjauh lalu lenyap segera setelah kebutuhannya sukses (atau gagal) terpenuhi.

Reformasi sebetulnya memberi peluang bagi partai politik untuk melakukan penggalangan dan pemeliharaan konstituen. Tetapi realitasnya, contoh kecil saja, konstituen yang merupakan anggota partai, malah karakter keanggotaannya menggantung ke atas. Artinya, di dalam internal partai, anggota lebih banyak ditentukan dari atas. Akibatnya, dukungan konstituen terhadap partai politik setiap saat dapat berubah tergantung kepentingan sesaat konstituen, isu aktual yang berkembang di publik dan pemahaman konstituen terhadap situasi aktual partai.<sup>43</sup>

Celakanya, di tengah ruang manuver yang leluasa, partai masih menggunakan cara berpikir lama: berlibur manakala tak ada pemilu dan menjadi sibuk bukan kepalang kerap pemilu mendekat. Hubungan partai dengan pemilu pun bersifat *ad hoc*, sementara, dan bubar selepas pemilu, ini menunjukkan bahwa substansi pemilu hanya terjadi dalam hitungan delapan jam (07.00-15.00), setelah kelar *quick count*, lepaslah hubungan rakyat dengan partai politik dan wakil yang diharapkan mewakilinya.

Konsekuensinya, hubungan dengan dukungan konstituen yang akhirnya bersifat labil, situasi ini berpengaruh terhadap perkembangan partai politik, hal mana arah perkembangannya lebih banyak dipengaruhi dari faktor eksternal, seperti: media massa yang menguasai opini publik dan upaya politik transaksional (*money politics*) yang dianggap dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pragmatisme pemilih. Sedangkan, ideologi, program, kompetensi dan manajemen partai belum banyak berpengaruh terhadap arah kebijakan dan perkembangan partai.<sup>44</sup>

43 Fatah, "Gejala Partai Mengambang," 42-43; dan Noor, *Quo Vadis Demokrasi Kita?*, 23

44 Warsito Ellwin, dan Hari Subagyo, *Konstituen Pilar*

Jadi, pada era reformasi ini, partai politik seolah terlepas dari semua belenggu yang mengekang selama ini. Rezim Orde Lama dan Orde Baru yang otoriter kemudian berganti kepada rezim reformasi yang demokratis. Melalui kebijakan kembali kepada sistem multipartai, dan partai-partai politik juga diperkenankan untuk tidak harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi partai. Antusias masyarakat dalam berpolitik untuk membentuk partai politik masih cukup tinggi dengan munculnya partai-partai politik baru, sebut saja Pemilu 2019 yang merupakan pemilu kelima di era reformasi ini empat partai baru berhasil turut serta sebagai peserta pemilu yakni Perindo, PSI, Partai Berkarya dan Partai Garuda. Namun, kondisi partai politik pada masa ini tetap meninggalkan banyak catatan seperti dijelaskan di atas, salah satunya adalah masalah deideologi partai. Keasyikan partai politik untuk menghadapi pemilu membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi partai *catch all* dengan berusaha merangkul semua basis pemilu.<sup>45</sup>

### **Persepsi Publik terhadap Eksistensi Partai Politik dan Kinerja DPR**

Sangat disayangkan di orde reformasi ini jumlah partai politik boleh bertambah, tetapi tidak menunjukkan bahwa adanya korelasi kebebasan berpolitik ini dengan proses penyerapan aspirasi dan kepentingan masyarakat bahkan konstituennya. Malah kita terjebak pada kebangkitan *partyocracy*, yang menurut Indra J. Piliang bahwa diibaratkan seperti buah busuk yang dipetik dari tanah kering dan hama, akibat syahwat kekuasaan dan kemiskinan kesadaran dalam pengorganisasian kepartaian.<sup>46</sup>

Titik awal terjadinya kemerosotan demokrasi adalah sesaat setelah disetujuinya

*Utama Partai Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011), xvii

45 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, 105

46 Piliang, "Kebangkitan "Partyocracy", 4

rumusan kedaulatan rakyat yang ada di tangan rakyat tetapi dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Maksud dari rumusan hasil amandemen UUD 1945 bahwa telah ditinggalkannya rumusan dasar supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi. Sayangnya, sejak itu, demokrasi yang semestinya bertumpu pada apa maunya rakyat bergeser menjadi apa maunya partai politik. Pembentukan lembaga-lembaga negara sangat ditentukan oleh apa maunya partai melalui fraksi-fraksi di DPR, sebut saja misalnya, seleksi untuk anggota Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penentu akhirnya adalah apa maunya DPR – dalam hal ini partai politik yang ada di dalamnya. Kedaulatan rakyat pun menjadi kedaulatan partai.<sup>47</sup>

Situasi sekarang ini kita bisa mengatakan bahwa negara sedang berada dalam masa demokrasi yang defisit (*deficit democracy*). Defisit demokrasi ini tumbuh sejak kepercayaan publik terhadap politisi maupun institusi politik menurun, banyak partai dan wakil rakyat (*representative in democracy system*) yang kehilangan hubungan dengan yang diwakili (*represent*). Harapan masyarakat di masa-masa awal runtuhnya Orde Baru, yakni agar partai politik yang ada mampu membebaskan diri dari kebiru Orde Baru dan menjadi demokrasi yang mewakili kepentingan konstituen, tampaknya tinggal angan-angan.

Bagi suatu negara yang menganut prinsip keterbukaan dan berdemokrasi, untuk menyikapi kinerja partai politik maupun pemerintah dalam mengelola kekuasaan, biasanya pendapat umum sangat diperhatikan sebagai kekuatan kelima dari demokrasi (selain lembaga trias politika dan pers), dan tentunya juga diperhatikan oleh lembaga-lembaga negara. Namun, di era reformasi peran partai politik dalam persepsi masyarakat, bahwa skeptisme masyarakat yang terjadi, ini ditemukan dalam

47 Sulardi, "Kemunduran Demokrasi," *Koran Tempo*, 24 Mei 2017, 11

jajak pendapat yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia (SSI) pada 2012 lalu. Survei itu menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat lebih besar 52,6 persen terhadap kinerja partai politik selama ini dibandingkan dengan tingkat kepuasan yang lebih sedikit sebesar 30,0 persen. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai tentu linear dengan ketidakpercayaan masyarakat bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan rakyat yaitu 51,4 persen, sedangkan yang mempercayai jumlahnya lebih sedikit sebanyak 32,3 persen.<sup>48</sup> Celakanya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik malah semakin buruk. Hasil Survei Indobarometer mengkonfirmasi bahwa masifnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik juga berdampak terhadap tingkat kedekatan masyarakat kepada partai politik. Sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa tidak dekat dengan partai.<sup>49</sup> Untuk lebih mendalami materi mengenai Survei Kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga negara utamanya Partai Politik dapat dilihat dalam Tabel 1.

Apa yang menyebabkan masalah utama partai politik bagi masyarakat? Sehingga persepsi negatif diberikan publik terhadap partai politik, menurut Survei *Political Communication (Polcomm) Institute* yang di rilis 2014, bahwa krisis kepercayaan rakyat atas partai politik setidaknya dipicu oleh tiga hal: *pertama*, banyaknya kader partai politik terjerat kasus korupsi; *kedua*, konflik internal partai politik; dan *ketiga*, sejumlah pelanggaran etika yang dilakukan kader partai politik. Krisis kepercayaan rakyat pada partai politik ini dinilai memicu kekuatan rakyat (*people power*) dalam bentuk relawan politik non-partai pada Pilpres 2014 lalu.<sup>50</sup> Selain ketiga hal di atas,

48 Skala Survei Indonesia, "Hasil Nasional tentang Kinerja Partai Politik dan Anggota Legislatif", Oktober 2012.

49 Ahmad Faiz, "Survei: Partai Politik Tak Dipercaya Publik," *Koran Tempo*, 23 Maret 2017, 7

50 Rully Chairul Azwar, "Partai Politik Di Tengah Ancaman "Virus" Oligarki dan Politik Kartel," *Jurnal Ketatanegaraan*, no. 5 (November 2017), 3

Tabel 1. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik

| Lembaga Survei                     | Kepercayaan Masyarakat |                  |                           |
|------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
|                                    | Kepercayaan            | Ketidakpercayaan | Tidak Tahu/Tidak Menjawab |
| Skala Survei Indonesia (2012)      | 32,3%                  | 51,4%            | 16,3%                     |
| Indikator Politik Indonesia (2013) | 31%                    | 58%              | 11%                       |
| Indobarometer (2017)               | 35,3%                  | 48,8%            | 15,9%                     |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

masalah utama partai politik bagi masyarakat berdasarkan hasil Survei *Centre for Strategic International Studies* (CSIS) pada 2017 yakni: *pertama*, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebesar 44,2 persen; *kedua*, kepemimpinan partai yang bermasalah, sebesar 21,2 persen; *ketiga*, jenjang kader yang tidak terencana dengan baik, sebesar 11,1 persen; *keempat*, demokrasi internal partai yang tidak berjalan dengan baik, sebesar 9,8 persen; dan *kelima*, menguatnya politik dinasti di sejumlah partai, sebesar 7,2 persen.<sup>51</sup>

Efek dari ketidakpercayaan masyarakat sekaligus ketidakdekatan masyarakat dengan partai politik, tentu saja berdampak pula terhadap tidak percayanya masyarakat pada lembaga DPR. Hasil Survei SSI menjelaskan realitas bahwa masyarakat menganggap anggota legislatif tidak mampu dalam melakukan tugasnya, yaitu sebesar 45,3 persen, sedangkan yang menyatakan mampu sebesar 34,0 persen. Ketidakpercayaan masyarakat tentu diikuti ketidakpercayaan masyarakat bahwa anggota legislatif memperjuangkan kepentingan rakyatnya yakni sebesar 52,1 persen, sementara yang menyatakan peduli sebesar 28,5 persen.<sup>52</sup>

51 Laporan Survei di presentasikan pada 12 September 2017, yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), diakses 20 April 2019, [https://www.csis.or.id/uploaded\\_file/event/pemaparan\\_hasil\\_survei\\_opini\\_publik\\_tiga\\_tahun\\_pemerintahan\\_joko\\_widodo\\_\\_jusuf\\_kalla\\_kinerja\\_pemerintahan\\_dan\\_peta\\_politik\\_nasional\\_\\_notulen.pdf](https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/pemaparan_hasil_survei_opini_publik_tiga_tahun_pemerintahan_joko_widodo__jusuf_kalla_kinerja_pemerintahan_dan_peta_politik_nasional__notulen.pdf)

52 Skala Survei Indonesia, "Hasil Nasional tentang Kinerja Partai Politik dan Anggota Legislatif", Oktober 2012.

Mengkonfirmasi pembaruan hasil survei juga bisa kita pahami dari survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Agustus 2016 lalu, bahwa mayoritas publik yang mempercayai lembaga DPR hanya 53 persen, sedangkan 40 persen tidak percaya. Hasil survei ini juga turut menjelaskan bahwa dari sisi kepercayaan terhadap DPR dan Partai Politik adalah paling buruk dibandingkan dengan Presiden, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan KPK yang masing-masing berada di tiga besar paling dipercaya masyarakat. Bahkan, menurut Burhanuddin Muhtadi, bahwa tingkat kepercayaan terhadap partai politik dan DPR tidak pernah naik kelas sejak 2002 lalu.<sup>53</sup>

Seiring perjalanan waktu masyarakat nampaknya semakin merasakan jurang yang semakin lebar antara "agenda masyarakat" dan "agenda partai politik", pilihan sikap pragmatisme partai politik serta didukung juga oleh perilaku politik politisi, akhirnya membuat persepsi masyarakat umum, menurut Firman Noor bahwa, masyarakat melihat kerja-kerja politik sekadar sebagai soal pragmatis yang kering ala pedagang untuk berkuasa itulah yang telah secara efektif menyudutkan dan mengaburkan makna luhur kerja-kerja politik, termasuk meredupkan citra kaum politisi di dalamnya.<sup>54</sup>

Hingga sekarang ini, dapat dikatakan bahwa ternyata kinerja DPR juga belum

53 Faiz, "Survei: DPR dan Partai Tidak Dipercaya Publik," 9

54 Noor, *Quo Vadis Demokrasi Kita?*, 4

menunjukkan sesuai harapan publik yang diwakili. Penilaian ini terlihat dari integritas mereka menyuarkan aspirasi rakyat lewat kinerjanya. Mayoritas publik berdasarkan jajak pendapat “Kompas” tahun 2017 menyatakan bahwa, masyarakat masih menganggap tidak memuaskannya hasil kerja DPR sehingga buruk pula Citra DPR saat ini dengan prosentase sebesar 71,3 persen. Misalnya, terhadap kinerja legislasi, tampak bahwa 75,4 persen tidak puas dengan DPR, sementara perannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah bahwa ketidakpuasan masyarakat sebesar 66,9 persen, dan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat ketidakpuasan masyarakat sebesar 74,9 persen.<sup>55</sup> Bahkan, dalam relasi antara DPR dan Konstituennya, menurut hasil Survei *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) pada 2017, bahwa masyarakat tidak pernah mengikuti kegiatan reses DPR (95,2 persen), masyarakat merasa tidak pernah berkomunikasi dengan DPR (95,6 persen), dan menyampaikan pendapat secara langsung ke anggota DPR (94,6 persen).<sup>56</sup>

Perkembangan defisit demokrasi di Indonesia saat ini, malah dapat dikatakan sedang mengalami problematika kronis karena dua prasyarat demokrasi mengalami kemunduran. Jika sebelumnya DPR kembali menjadi sorotan berdasarkan hasil survei *Transparency International Indonesia* (TII) yang menyatakan DPR pada 2017 masih menjadi lembaga pemerintahan yang paling tinggi tingkat korupsinya dengan angka 54 persen, setelah terungkapnya kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik

(KTP-el) yang diduga menyeret sebagian besar anggota DPR periode 2009-2014 dan pejabat negara lainnya. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Survei ini juga semakin menegaskan jika lembaga DPR di era reformasi ini belum mengalami perubahan persepsi sebagai institusi terkorup di negeri ini, bahkan penelitian TII tersebut semakin meningkatkan citra buruk DPR seperti sesuai dengan surveinya di tahun 2013 dan 2005 lalu yang menempatkan DPR sebagai institusi terkorup kedua di negeri ini.<sup>57</sup>

Problematika korupsi juga masih terus menerus terjadi berulang-ulang dalam proses pencalonan Pilkada, meski berbau oligarkis. Tetapi realitas bahwa tak mungkinnya rekomendasi calon kepala daerah secara cuma-cuma, dengan idiom melekat khas penentuan calon kepala daerah bahwa “tidak ada makan siang yang gratis”, berdampak pada Pilkada serentak 2018 ini disinyalir oleh KPK bahwa 90 persen kepala daerah peserta Pilkada 2018 terindikasi terlibat kasus korupsi bahkan ada yang berstatus petahana.<sup>58</sup>

Menjelang Pemilu 2019 ini diprediksi bahwa citra partai politik semakin merosot tajam di mata masyarakat, sebab sekitar 34 hari menuju Pemilu 2019 dalam gelaran Operasi Tangkap Tangan (OTT), tim Satgas KPK menangkap Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, di Jawa Timur. Dalam periode reformasi ini menunjukkan bahwa selain Romahurmuziy, sebelumnya KPK sudah menjerat empat ketua umum partai politik yakni: Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq; Ketua Umum Partai Demokrat,

55 Susanti Agustina S., Toto Suryaningtyas, dan Litbang Kompas, “Jajak Pendapat “Kompas” Mencari Penanda Wakil Rakyat”, *Kompas*, 31 Juli 2017, 5

56 Laporan Survei di presentasikan pada 12 September 2017, yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), diakses 20 April 2019, [https://www.csis.or.id/uploaded\\_file/event/pemaparan\\_hasil\\_survei\\_opini\\_publik\\_tiga\\_tahun\\_pemerintahan\\_joko\\_widodo\\_\\_\\_jusuf\\_kalla\\_\\_kinerja\\_pemerintahan\\_dan\\_peta\\_politik\\_nasional\\_\\_notulen.pdf](https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/pemaparan_hasil_survei_opini_publik_tiga_tahun_pemerintahan_joko_widodo___jusuf_kalla__kinerja_pemerintahan_dan_peta_politik_nasional__notulen.pdf)

57 Umar Mukhtar dan Hazliansyah, “Survei TII: DPR Lembaga Terkorup,” *Republika*, 08 Maret 2017, diakses 26 Februari 2019, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/08/omgr7y280-survei-tii-dpr-lembaga-terkorup>

58 Widya Lisfianti dan Dani Dahwilani, “90 Persen Pilkada Berpotensi Jadi Tersangka,” *iNews*, 07 Maret 2018, diakses 25 Februari 2019, [http://www.inews.id/multimedia/read/90-persen-peserta-pilkada-berpotensi-jadi-tersangka?sub\\_slug=video](http://www.inews.id/multimedia/read/90-persen-peserta-pilkada-berpotensi-jadi-tersangka?sub_slug=video)

Anas Urbaningrum; Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali; dan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto; hal mana semuanya sudah divonis dan dijebloskan ke penjara.<sup>59</sup>

Realitas harus diakui bahwa, persepsi negatif publik terhadap partai politik dan DPR menjelang Pemilu 2019 ini tidak juga membaik. Hasil Survei ahli yang dilakukan LIPI, menunjukkan hal yang sama dengan persepsi publik, bahwa kinerja lembaga demokrasi seperti Partai Politik dan Polri memperoleh penilaian terendah sebagai institusi berkinerja baik, misalnya Partai Politik dan Polri memperoleh peringkat posisi buncit dari bawah sebesar 13,10 persen, diikuti oleh lembaga DPR di urutan ketiga dari bawah sebesar 23,45 persen.<sup>60</sup>

Dari sikap partai politik dan politisi dengan citra pencari kekuasaan *an sich*, salah satu dampaknya adalah semakin *enggannya* masyarakat untuk mengikuti pemilu hal mana jumlah total masyarakat yang ikut dalam pemilu semakin menurun pada level nasional dan lokal. Misalnya di tingkat nasional, pada Pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 90 persen lebih, setelahnya, Pemilu 2004 tingkat partisipasi pemilih merosot menjadi 76 persen, dalam Pemilu 2009 dan 2014 tingkat partisipasi pemilih terjun bebas menjadi 70 persen. Menuju Pemilu 2019 mendatang, ajakan untuk absen memilih mulai marak diungkapkan di sosial media, ancaman akan tingginya keenganan masyarakat memilih tentunya tak bisa dilepaskan karena kekecewaan masyarakat terhadap partai politik dan politisi sehingga dapat membuat tingkat

partisipasi pemilih rendah.<sup>61</sup>

Merosotnya citra Partai Politik ini terjadi karena tidak adanya ideologi partai, memang secara formal partai-partai mengungus ideologi tertentu. Tetapi, dalam realitasnya, partai-partai tersebut tidak bisa dibedakan dengan partai-partai yang menyatakan dirinya sebagai partai yang berasas kebangsaan, atau yang mengklaim dirinya sebagai nasionalis-religius. Ideologi partai politik sejak 2009, sudah mengalami distorsi, hal ini terlihat dari ketidakjelasan kaitan ideologi partai dengan sistem filosofi utama masyarakat dan negara, tidak kukuhnya ideologi sebagai landasan program partai, dan lemahnya peran ideologi sebagai pedoman umum dalam menentukan strategi perjuangan partai.

Dalam kondisi ini, ketika kekuatan partai tidak lagi terletak pada ideologi dan program yang dimiliki, maka yang terjadi adalah partai-partai bersandarkan pada kekuatan figur pimpinan partai, patron partai atau bahkan kekuatan uang, wajar korupsi juga tumbuh subur.<sup>62</sup> Buruknya pelembagaan partai politik merambah luas turut memengaruhi buruknya suprastruktur politik seperti institusi DPR. DPR tersandera oleh kepentingan elite partai atau kepentingan golongannya bukan kepentingan bangsa, seperti ketua umum partai langsung hadir di parlemen memberi arahan, memantau, memberi 'ancaman' kepada para wakil rakyatnya dalam proses pengambilan keputusan sesuai arahan elite itu. Sehingga tidak heran telinga kita sudah umum mendengar wakil rakyat dengan ringan dan tanpa *tedeng aling-aling* berkata belum ada instruksi partai. Para wakil rakyat tidak bisa bersuara atas nama rakyat secara personal mereka bersembunyi "diketiak" partainya.<sup>63</sup>

61 Rio Apinino, "Membedah Potensi Golput di Pilpres 2019," *Tirto.id*, 12 Agustus 2018, diakses 14 Maret 2019, <https://tirto.id/membedah-potensi-gelombang-golput-di-pilpres-2019,cRYi>

62 Lili Romli, *Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi*, (Jakarta: LIPI, 2017), 13-14

63 Efriza, "Reformasi Kepartaian di Indonesia," *Radar Sulbar*, 21 Oktober 2014, 6

59 Salman Madira, "Selain Ketum PPP Romi Ini 4 Pemimpin Parpol yang Pernah Ditindak KPK karena Korupsi," 15 Maret 2019, diakses 15 Maret 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/03/15/337/2030483/selain-ketum-ppp-romi-ini-4-pemimpin-parpol-yang-pernah-ditindak-kpk-karena-korupsi>

60 Esty Ekawati, "Pandangan Ahli: Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019," Makalah disajikan pada pertemuan untuk penyampaian rilis hasil Survei Ahli oleh LIPI, di Hotel JS Luwansa, 7 Agustus 2018

Dampak dari ketiadaan ideologi partai juga bermuara terhadap identifikasi partai (*party identification/Party ID*) yang lemah. Menurut Lili Romli<sup>64</sup> bahwa identifikasi partai merupakan kedekatan psikologis seseorang dengan suatu partai atau loyalitas terhadap suatu partai dan kesetiaan seorang pemilih terhadap partai tertentu. Hubungan psikologis antara pemilih dan partai inilah yang menjadi salah satu kelemahan institusionalisasi partai politik di Indonesia karena sebagian besar pemilih tidak mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan partai-partai yang ada.

Ini terlihat dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan bahwa 83 persen lebih pemilih di Indonesia tidak memiliki rasa kedekatan dengan partai. Dari pemilu ke pemilu, perilaku pemilih lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat non-ideologis sehingga para pemilih dengan mudah bisa berganti pilihan dalam setiap kali pemilu. Dampak dari hal itu, tidak heran apabila dari pemilu ke pemilu, pemenangnya selalu berbeda-beda. Pada Pemilu 1999 pemenangnya adalah PDIP, Pemilu 2004 Partai Golkar, Pemilu 2009 Partai Demokrat, dan Pemilu 2014 pemenangnya PDIP. Lemahnya identifikasi partai ini juga bisa dilihat dalam pemilihan, seperti Pilpres maupun Pilkada hal mana kandidat yang diusung oleh partai tertentu belum tentu didukung oleh pemilih tersebut.<sup>65</sup>

Kurangnya rasa empati partai politik terhadap persoalan rakyat, tentu melahirkan *swing voters* (pemilih yang berganti-ganti pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya) juga turut berpotensi memalingkan basis massa ke partai lain. Wajar akhirnya, banyak pemilih di era reformasi ini menentukan pilihannya pada hari pemilu (*undecided voters*). Jadi, sesungguhnya, selain kemerosotan partisipasi masyarakat dalam

memilih juga terjadi hingga sekarang ini bahwa masih banyak pemilih yang belum memiliki kepastian akan pilihannya.

Merosotnya citra partai politik itu, tentu saja akan berakibat buruk terhadap opini publik yang merupakan kekuatan politik penting dalam demokrasi. Opini publik yang buruk niscaya akan membuat citra demokrasi juga merosot, bahkan terjun bebas. Namun kepercayaan publik yang menurun itu, bukan pada demokrasi dalam tataran konsep, melainkan kepercayaan itu merosot terhadap aktor politik atau politisi. Aktor politik atau politisi itu, tentu tidak dapat dipisahkan dengan partai politik yang mengusungnya.<sup>66</sup> Kemerosotan institusionalisasi partai politik di era reformasi juga ditunjukkan oleh hasil kajian Lili Romli, bahwa institusional partai politik masih lemah di pasca reformasi karena faktor absennya ideologi partai, munculnya kepemimpinan personal/klientelistik, konflik internal partai, dan temuan baru yaitu pragmatisme politik.<sup>67</sup>

Memang harus diakui bahwa berbagai hasil survei telah berkali-kali dirilis dan hasilnya tetap sama hingga sekarang ini, dan hasil ini semestinya dijadikan tantangan bagi DPR dan utamanya partai politik untuk memperbaiki citra diri bahwa lembaga politik dipersepsi publik sebagai hulu semua permasalahan bangsa. Meski demikian, menurut Arifin Anwar bahwa, merosotnya citra partai politik itu, tidak berarti bahwa partai politik itu tidak lagi relevan dalam kehidupan demokrasi sekarang ini.<sup>68</sup>

Dapat dikatakan bahwa pasca reformasi belum memperlihatkan kemajuan malah cenderung mengarah pada defisit demokrasi yang disumbang oleh partai politik, yang berdampak terhadap lembaga DPR. Fakta bahwa perkembangan partai politik sekarang

64 Romli, *Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi*, (Jakarta: LIPI, 2017), 14

65 Romli, *Problematika Institusionalisasi Partai*, 14

66 Anwar Arifin, *Pencitraan dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik*, (Bandung: Pustaka Indonesia, 2006), 202-203

67 Romli, *Problematika Institusionalisasi Partai*, 21

68 Arifin, *Pencitraan dalam Politik*, 202-203

ini kurang responsif terhadap konstituen disebabkan partai-partai di Indonesia perlahan tetapi pasti secara drastis mengurangi muatan ideologis mereka dalam rangka untuk meraih sebanyak mungkin jumlah pemilih. Partai politik di Indonesia mengalami perkembangan mengidentikkan diri sebagai *catch all party*. Sehingga, pembentukan dan pemeliharaan konstituen melalui ikatan ideologis tidak lagi menjadi agenda kerja partai.

Pilihan tersebut malah mengakibatkan berkurangnya ikatan hubungan partai-partai terhadap pemilih atau konstituennya. Sehingga, tak ayal menyebabkan dua hal yakni: pertama, dari sisi para pemilih atau konstituen semakin *enggan* untuk mengidentifikasikan diri (memudarnya *Party ID*) dengan partai yang sama selama dalam suatu siklus pemilihan, dan terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengubah identifikasi mereka dari pemilihan ke pemilihan berikutnya, tentunya menguntungkan partai-partai baru tidak hanya sebagai peserta pemilu semata tetapi kemungkinan besar dapat memperoleh kursi di DPR meski diberlakukan aturan ambang batas parlemen, seperti fenomena partai politik Demokrat, Nasdem, dan sebagainya; maka hal ini tentu saja menunjukkan lemahnya ikatan antara partai dan konstituennya. Kedua, celaknya, yang kemudian tumbuh di era pasca reformasi ini adalah “partai mengambang,” bahkan efektivitas partai politik cenderung tidak bertanggungjawab dan tidak tanggap terhadap konstituennya.

Ini pula yang turut mengkonfirmasi berbagai penafsiran bahwa institusionalisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi adalah masih lemah. Sehingga, yang terjadi adalah perkembangan dan peran partai politik secara internal sebagai infrastruktur politik belum dapat berkontribusi maksimal, akhirnya persepsi masyarakat terhadap kinerja partai politik tidaklah positif, masyarakat merasa tidak puas akan kinerja dari partai politik.

## Kesimpulan

Perkembangan dan peran partai politik pada era reformasi ini mengalami dilematis. Di satu sisi, eksistensi partai politik semakin diakui sangat penting dalam UUD 1945 hasil amandemen, utamanya dalam soal rekrutmen penyelenggaraan negara. Namun, partai politik yang memiliki peran signifikan itu sebagai infrastruktur politik justru mengalami permasalahan. Sebab, pasca reformasi ini belum memperlihatkan kemajuan malah cenderung mengarah pada defisit demokrasi yang disumbang oleh partai politik, yang berdampak terhadap lembaga DPR. Perkembangan dan peran partai politik sekarang ini kurang responsif terhadap masyarakat maupun konstituen partainya, disebabkan partai-partai di Indonesia perlahan tetapi pasti secara drastis mengurangi muatan ideologis mereka dalam rangka untuk meraih sebanyak mungkin jumlah pemilih. Partai politik di Indonesia mengalami perkembangan mengidentikkan diri sebagai *catch all party*. Sehingga, pembentukan dan pemeliharaan konstituen melalui ikatan ideologis tidak lagi menjadi agenda kerja partai.

Pilihan menjadi partai *catch all* malah mengakibatkan berkurangnya ikatan hubungan partai-partai terhadap pemilih atau konstituennya. Fakta dan persepsi publik terhadap partai politik adalah rakyat merasa tidak dekat dengan partai politik. Ini terjadi dikarenakan institusionalisasi partai politik yang lemah, sehingga pola rekrutmen partai politik dilakukan dengan tidak transparan dan transaksional hanya untuk mengejar kepentingan elektoral semata, hal ini menyebabkan risiko terjadinya krisis kepercayaan rakyat atas partai politik disebabkan oleh jenjang kader yang tidak terencana dengan baik, sehingga banyaknya kader partai politik terjerat kasus korupsi; dan sejumlah pelanggaran etika yang dilakukan kader partai politik. Di sisi lain, pengelolaan institusional

kepartaian yang lemah menyebabkan terjadi lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik; kepemimpinan partai yang bermasalah; demokrasi internal partai yang tidak berjalan dengan baik; dan menguatnya politik dinasti di sejumlah partai politik. Itulah beberapa hal sorotan atau persepsi masyarakat terhadap perkembangan dan peran partai politik di era reformasi ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mewujudkan suatu kesadaran bersama utamanya para pemimpin partai pada era reformasi dewasa ini untuk segera membenahi diri. Para politisi dan elite partai tidak boleh malah terkesan berupaya melestarikan problematika struktural partai-partai dan “menikmati” situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi dan/atau kelompoknya semata. Penguatan institusionalisasi partai menjadi pekerjaan rumah bukan saja elite partai dan anggota internalnya tetapi juga harus adanya dorongan yang kuat dari masyarakat sipil, kita harus mulai mendorong bahwa penguatan institusionalisasi partai politik dengan cara: menuntut partai politik untuk menjadikan ideologi partai sebagai dasar penentu program dan strategi perjuangan partai tersebut; melembagakan kaderisasi dan rekrutmen politik yang transparan dan berdasarkan *merit system*; melembagakan aturan main partai politik yang konsisten dalam regulasi secara internal dan regulasi dari negara; dan mendorong terciptanya partai politik yang terbuka dalam regenerasi di tingkat internal partai politik tersebut.

Di samping itu, upaya pembenahan juga dalam konteks sistem kepartaian, pasca Pemilu 2019 ini, mulai dipikirkan bahwa harus disudahi tak ada jelasnya arah dan format, dalam perdebatan serius di kalangan elite-elite partai di Senayan, sudah semestinya dipikirkan dan diperdebatkan bahkan dirumuskan ke mana sesungguhnya arah

sistem kepartaian pasca Orde Baru yang kita inginkan bersama. Jangan sampai terlalu lama dibiarkan, sehingga yang muncul seperti sekarang ini adalah upaya-upaya pragmatisme partai politik saja dalam mendulang suara dalam pemilu, hal ini malah menunjukkan bahwa partai politik hanya mengenai urusan memerintah semata dan/atau merebut dan mempertahankan kekuasaan politik, hasilnya adalah defisit demokrasi ini tumbuh sejak kepercayaan publik terhadap politisi maupun institusi politik menurun, banyak partai dan wakil rakyat (*representative in democracy system*) yang kehilangan hubungan dengan yang diwakili (*represent*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul, ed., *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996.
- Apinino, Rio, “Membedah Potensi Golput di Pilpres 2019,” *Tirto.id*, 12 Agustus 2018, diakses 14 Maret 2019, <https://tirto.id/membedah-potensi-gelombang-golput-di-pilpres-2019,cRYi>
- Asshiddiqie, Jimly, “Penguatan dan Penataan Partai Politik di Masa Depan,” *Jurnal Ketatanegaraan*, no. 05, (November 2017).
- Arifin, Anwar, *Pencitraan dalam Politik (Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik)*, Bandung: Pustaka Indonesia, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Rully Chairul, “Partai Politik Ditengah Ancaman “Virus” Oligarki dan Politik Kartel,” *Jurnal Ketatanegaraan*, no. 05, (November 2017).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia, 2008.

- Budiarti, Aisyah Putri, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.
- Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, penerj. Laila Hasyim, Bina Aksara, 1984.
- Efriza, "Reformasi Kepartaian di Indonesia," *Radar Sulbar*, 21 Oktober 2014.
- Ekawati, Esty, "Pandangan Ahli Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019," makalah disajikan pada pertemuan untuk penyampaian rilis hasil Survei Ahli oleh LIPI, di Hotel JS Luwansa, Selasa 7 Agustus 2018.
- Ellwin, Warsito dan Subagyo, Hari, *Konstituen Pilar Utama Partai Politik*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011.
- Faiz, Ahmad, "Survei: DPR dan Partai Tidak Dipercaya Publik," *Koran Tempo*, 15 Agustus 2016.
- Faiz, Ahmad, "Survei: Partai Politik Semakin Tak Dipercaya," *Koran Tempo*, 23 Maret 2017.
- Fatah, Eep Saefulloh, "Gejala Partai Mengambang," *Kompas*, 18 November 2006.
- Fatah, Eep Saefulloh, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Haris, Syamsuddin, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Heywood, Andrew, *Politik (Edisi Keempat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Ishiyama, John T., dan Breuning, Marijke, ed., *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 1)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kartawidjaja, Pipit R., dan Kusumah, Mulyana W., *Kisah Mini Partai Politik* (Jakarta: Closs dan 7 Strategic Studies, 2003).
- Katz, Richard S., dan Crotty, William, *Handbook Partai Politik*, Bandung: Nusamedia, 2015.
- Labolo, Muhadam, dan Ilham, Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Laporan Survei di presentasikan pada 12 September 2017, yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), diakses 20 April 2019, [https://www.csis.or.id/uploaded\\_file/event/pemaparan\\_hasil\\_survei\\_opini\\_publik\\_tiga\\_tahun\\_pemerintahan\\_joko\\_widodo\\_\\_\\_jususuf\\_kalla\\_\\_kinerja\\_pemerintahan\\_dan\\_peta\\_politik\\_nasional\\_\\_notulen.pdf](https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/pemaparan_hasil_survei_opini_publik_tiga_tahun_pemerintahan_joko_widodo___jususuf_kalla__kinerja_pemerintahan_dan_peta_politik_nasional__notulen.pdf)
- Lisfianti, Widya, dan Dahwilani, Dani, "90 Persen Pilkada Berpotensi Jadi Tersangka," *iNews*, 07 Maret 2018, diakses 25 Februari 2019, [http://www.inews.id/multimedia/read/90-persen-peserta-pilkada-berpotensi-jadi-tersangka?sub\\_slug=video](http://www.inews.id/multimedia/read/90-persen-peserta-pilkada-berpotensi-jadi-tersangka?sub_slug=video)
- Madira, Salman, "Selain Ketum PPP Romi Ini 4 Pemimpin Parpolyang Pernah Ditindak KPK karena Korupsi," 15 Maret 2019, diakses 15 Maret 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/03/15/337/2030483/selain-ketum-ppp-romi-ini-4-pemimpin-parpolyang-pernah-ditindak-kpk-karena-korupsi>
- Ma'shum, Saifullah, *DPR Terhormat DPR Dihujat: Refleksi Lima Tahun di DPR Periode 2004-2009 (Catatan Sejarah Sang Wakil Rakyat)*, Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2012.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mukhtar, Umar, dan Hazliansyah, "Survei TII: DPR Lembaga Terkorup," *Republika*, 08 Maret 2017, diakses 26 Februari 2019, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/08/omgr7y280-survei-tii-dpr-lembaga-terkorup>

- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noor, Firman, *Quo Vadis Demokrasi Kita? Sebuah Respon Terhadap Konsolidasi Demokrasi Indonesia*, Jakarta; RMBooks, 2015.
- Pilliang, Indra J., “Kebangkitan ‘Partycracy,’” *Koran Jakarta*, 27 September 2014.
- Pradjasto, Antonio, “Partai Politik tak Hanya Kemampuan Memerintah”, *Jurnal Jentera*, no. 16, (Juni 2007).
- Romli, Lili, *Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi*, Jakarta: LIPI, 2017.
- Romli, Lili, Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan, *Jurnal Politika*, no. 2, (2006).
- S., Susanti Agustina, Suryaningtyas, Toto, dan Litbang Kompas, “Jajak Pendapat “Kompas” Mencari Penanda Wakil Rakyat,” *Kompas*, 31 Juli 2017.
- Salang, Sebastian, *Potret Partai Politik di Indonesia: Asesmen terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2007.
- Skala Survei Indonesia, “Hasil Nasional tentang Kinerja Partai Politik dan Anggota Legislatif,” Oktober 2012.
- Sulardi, “Kemunduran Demokrasi,” *Koran Tempo*, 24 Mei 2017.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Wibowo, Pramono Anung, *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*, Jakarta: Kompas, 2013.

# Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation between West Java, Indonesia and South Australia

Desentralisasi Kerja Sama Luar Negeri: Studi Kasus Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Indonesia dan Australia Selatan

Andriani Florencia Dharmajaya\*, Anggara Raharyo\*

\*President University, Lecturer of International relations of President University  
email: andrianiflorenciaa@gmail.com, anggara.raharyo@president.ac.id

---

## Riwayat Artikel

---

Diterima 9 Maret 2019  
Direvisi 8 April 2019  
Disetujui 2 Mei 2019

## Abstract

---

Cooperation between cities and states/provinces has gained its attention in contemporary global affairs. Most scholars refer to it as *para-diplomacy*, which can be defined as cooperation between sub-national actors for the benefit or the interest of the national governments. This research focuses on the practice of *para-diplomacy* between West Java Province of Indonesia and South Australia. It aims to explain the progress of the sister province cooperation out of the renewal of its agreement in 2015 and their progress of cooperation until 2017. This research utilizes annual reports of the cooperation from both sides of the parties to identify the practices and progress of the cooperation. From the analysis, cooperation in agriculture, fisheries, and tourism, including culture and education are still in the developing progress. Nevertheless, several sectors have shown an improvement on the West Java's side.

*Keywords:* Para-diplomacy; West Java; South Australia; Indonesia – Australia, Sister Province.

## Abstrak

---

Kerja sama antar Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi telah menjadi salah satu perhatian di studi Hubungan Internasional. Mayoritas peneliti menamakan hal ini sebagai aktivitas paradiplomasi yang berarti kerja sama yang dilakukan oleh aktor sub-nasional untuk mendapatkan manfaat atau mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini berfokus pada praktik paradiplomasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Australia Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dari kerja sama provinsi yang telah dilaksanakan dari pembaharuan perjanjian kerja sama pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan dari kedua belah pihak sebagai sumber utama. Dari analisis ini, kerja sama dalam bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata serta kebudayaan dan pendidikan masih dalam tahap perkembangan awal. Walaupun, beberapa sektor telah menunjukkan perkembangan yang baik, terutama bagi Jawa Barat.

*Kata Kunci:* Paradiplomasi; Jawa Barat; Australia Selatan; Indonesia – Australia; Sister Province.

## Background

The cooperation between cities and states/provinces has gained its attention in contemporary global affairs. Most scholars refer it as para-diplomacy, where it could be defined as the cooperation which could be done by the sub-national actor in order to gain the benefit or reach the interest of the national government.<sup>1</sup> Through para-diplomacy, the sub-national actor could involve in international affairs and could reach the national interests from its involvement in international affairs. The concept was established in Europe at the post-second world war global circumstances.<sup>2</sup> The first idea behind the establishment of para-diplomacy is because of the local government was finding a solution for global peace. Nowadays, within the development of globalization and the need every region to internationalize their region in international affairs, the concept is spread all over the world, also no exception in Indonesia. The practice of para-diplomacy in Indonesia supported by the statement of President Susilo Bambang Yudhoyono. In 2010, at the meeting of Australia's Businessmen in Canberra, President invited them to make a relation by directly contact to the local government both regency/city and province, including the Governor in Indonesia for doing the investment in Indonesia.<sup>3</sup>

One of the authorities that given to the local government is framed under the Law (*undang-undang*) no. 22 of 1999 about local government, where the law ruled about the local government that could do the cooperation with foreign parties. In article 88, stated that regions could conduct mutually beneficial cooperation with foreign institutions or agencies, which are

governed by joint decisions.<sup>4</sup> The law becomes the cornerstone for the local government to have the authority in conducting cooperation with the foreign parties. Strengthened by law article 18 about the duties and authority of the Regional House of Representatives, where it is stated that one of the duties of the House of Representatives is to provide opinions and considerations to the Government regarding the plan of an international treaty that related with the regional interests. Also, the law no. 32 of 2004 Article 42 also explain about the duties of the Regional House of Representatives.

The local government who conduct the cooperation with foreign parties needs to discuss and receive the recommendation from the Ministry of Foreign Affairs as well as the Ministry of Home Affairs as well as the related institution.<sup>5</sup> Next, the local government together with the Ministry of Foreign Affairs conduct the exploratory via the Indonesian representative in that country to see the possibility and potential to do the cooperation with the foreign parties, including the local government at a foreign country.

According to the cooperation with the foreign parties, every region has the same authority to do the cooperation with foreign parties, not exclude West Java Province. West Java has started their sister province cooperation with South Australia which started in 1997.<sup>6</sup> In 2015, they revitalized their MoU for sister province cooperation. The signing of the revitalized MoU was done in the Adelaide Festival Center on September 24, 2015, by the Vice Governor of West Java, Deddy Mizwar and the South Australian Premier, Jay

1 Marten Kooistra, *Paradiplomacy in Practise: The Development of Paradiplomacy in Quebec, Scotland, and California* (2017), 3

2 Rakhahari Chatterji and Swagata Saha, "Paradiplomacy: Concept and the Context," *India Quarterly* (2017): 376

3 Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013), 2

4 Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999*, Jakarta: 1999.

5 Kementerian Luar Negeri Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah* (Jakarta: 2006), 26

6 Masaki Minami, *The Role and Policy of the South Australian Government in the Development of Economic Ties with Asian Nations* (Adelaide: 1997), 42

Weatherill. The signing also accompanied by the Consul General Yayan Mulyana and also the Governor of South Australia.<sup>7</sup>

In the MoU, there are six areas that are included in the cooperation, which are: agriculture, tourism, education, health, government, and promotion and facilitation of commercial opportunities.<sup>8</sup> In implementing the MoU, both parties could make the working group, which the function of the group is to manage to the plan and work programs of the MoU. The working group responsible to evaluate activities that have been conducted as well as giving recommendation for the next programs and activities. The working group's members consist of the selected government officials or the selected private sector representatives. In here, the working group could conduct the annual meetings when it is necessary, where the meeting could be conducted in Bandung or Adelaide. The duration of the MoU would be 5 years and both parties could extend the period for one or more period.

This research focuses on the practice of para-diplomacy between West Java Province of Indonesia and South Australia. It aims to explain the progress of the sister province cooperation that renewed its agreement in 2015 and their progress of cooperation until 2017. This research utilizes annual reports of the cooperation from both sides of the party to identify the practice and progress of the cooperation. The first part of this research will analyze factors that influence the cooperation between both parties, it then will analyze

7 KJRI Sydney, "Signing of MoU on Sister Province / State Cooperation between West Java and South Australia," *KJRI Sydney*, 24 September 2015, accessed February 20, 2019, <https://www.kemlu.go.id/sydney/en/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Signing-of-MoU-on-Sister-Province-State-Cooperation-between-West-Java-and-South-Australia.aspx>

8 Government West Java and South Australia, *Memorandum of Understanding Between the Government of West Java Province of the Republic of Indonesia and The Crown in Right of the State of South Australia Concerning Sister Province - State Cooperation* (Adelaide: 2015).

the practice and progress of the cooperation conclusion in the final part.

### Para-diplomacy

According to Andre Lecours, para-diplomacy, as conducted by the sub-state governments in developed societies, can have many different focuses where not all regional governments have approached international relations in a similar way thus divided para-diplomacy into several layers.<sup>9</sup> First, the relation and cooperation of the sub-state which the orientation only in the scope of economic issues where the aims of the cooperation related with the economic matters such as attracting foreign markets, enlarging the number of investors, and explore for the new exports markets. In the layer of economic issues, there is no explicit to the political dimension, and also nor to the cultural issues which will be included in the cooperation. The second layer consists of the multidimensional where the para-diplomacy not only limited to one sector, but it consists of many sectors such as cultural, educational, technical, technological, and so on. The third layer is the complex layer where the political matters are involved in the para-diplomacy. Para-diplomacies in the third layer belong to the country who develop the international relations ambitiously in order to express their specific national identity and they're autonomous which differs from most of the regions in their state. In other word, they seek attention from other regions in other countries and to influence their neighborhood regions' behavior.

In practice the para-diplomacy, there are several steps which need to be fulfilled by the local government. According to Rodrigo Tavares, the first step is the establishment of umbrella foreign affairs policy, which as known as White Papers or government plans thus will become the guide in achieving the goals

9 Andre Lecours, *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World* (Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2008), 3

of the project.<sup>10</sup> Following the guidance, the local government needs to distinguish between programs, projects, and actions where it will help the local government in managing the project. Furthermore, in preparing and managing the project, there are five components which need to be fulfilled, those are: initiation, planning and design, execution and construction, monitoring and controlling systems, and completion.<sup>11</sup>

### Internal and External Factors

In the practice of para-diplomacy, there are internal and external factors which could boost the initiation of the cooperation of local government with the foreign parties. In the case of the sister province cooperation in West Java, the internal factors come from the potentials inside West Java Province. In here, the author focuses on three main sectors, which are agriculture, fishery, and tourism including culture and education. Meanwhile, the external factor comes from the diplomatic relationship between Indonesia - Australia.

#### *Agriculture in West Java*

West Java is one of the provinces in Indonesia that has a fairly extensive of land for agriculture, where it could become a big potential for the national food. There is three biggest potentials of agriculture in West Java, which are rice, corns, and soybeans.<sup>12</sup> *Gedong Gincu* mango is one of the local products from West Java that entered the foreign market. There are a lot of countries that import this kind of mango from this province, which are Singapore, Japan, Korea, and the Middle East. Based on the interview that showed in the article, one of the farmers of this mango stated

10 Rodrigo Tavares, *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players* (New York: Oxford University Press, 2016), 120

11 *Ibid.*

12 Zuli Istiqomah, "Jabar Potensi Kedaulatan Pangan Nasional," *Republika.co.id*, 23 January 2017, accessed February 20, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/22/ok6nwg370-jabar-potensi-kedaulatan-pangan-nasional>.

that the product of *Gedong Gincu* mango from Majalengka, West Java has a high in quality and it makes this mango is attractive to be imported.<sup>13</sup> *Gedong Gincu* mango with the export quality has a higher price rather than the normal quality, where the range of the price is from 50,000 rupiah to 100,000 rupiah per kilograms.<sup>14</sup>

#### *Fisheries in West Java*

There are many provinces in Indonesia that could support the development of the fisheries sector. West Java is one of them with the big opportunities and potentials in supporting this sector. The Vice Governor of West Java Province during period 2013 - 2015, Deddy Mizwar, currently the potentials in fisheries sector of this province still cannot be maximized.<sup>15</sup> This comes from the yearly report in 2016, where from this report could get data that the production of fisheries in West Java are 276.000 ton, increased about 1.95 percent compared with the production in 2015.<sup>16</sup> Meanwhile, the production is increasing from 2015 to 2016 but, the increase is only about 13.35 percent from all of the fisheries potentials that this province had.<sup>17</sup>

#### *Tourism, including Culture and Education in West Java*

According to the Chairperson of Indonesian Chamber of Commerce and Industry in West Java region, Agung Suryamal, there are 309 potentials of tourist destination in this province,

13 Yudha Manggala P Putra, "Mangga Gedong Gincu Diminati Pasar Timur Tengah," *Republika.co.id*, 5 May 2014, accessed February 20, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/05/05/n53prj-mangga-gedong-gincu-diminati-pasar-timur-tengah>.

14 *Ibid.*

15 Tempo.co, "Deddy Mizwar: Potensi Perikanan Jabar Belum Optimal," *Tempo.co*, 17 December 2017, accessed February 20, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1043043/deddy-mizwar-potensi-perikanan-jabar-belum-optimal>.

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*

but the government still not maximize all of the potentials that could be impact positively to the regional economy.<sup>18</sup> Agung Suryamal also stated the high potential of tourism in West Java, around 60 percent the development still not maximized that cause by the limit of infrastructure. On the other hand, West Java Province also has a lot of arts and cultures. The culture of West Java is dominated by Sundanese culture. The uniqueness of the culture could be a characteristic for the province. The local government is put more effort and focus on maintaining the culture of this province.<sup>19</sup> To continue the conservation of culture in this province, the local government in West Java choose several villages in this province to being set as the culture village, which could be managed as a place to conserve the culture in the form of culture house that becomes as one of the identities of this province.

Moreover, the quality of education in West Java also need to be improve.<sup>20</sup> The quality of the teachers is very important for the quality of the education, where it is very impactful to the result of the education of the students. According to the statement of the regional secretary of Bandung, Yossi Irianto, to improve the quality of the education, it needs to organize the equitable education for the better quality of education as well as improve the educational facilities and infrastructure.<sup>21</sup> On the other hand, to improve the quality of education, not only limited to the improvement

of the quality of the teachers but also need to improve the character building of the society and support from the government in order to improve the quality of education for fulfilling the employment needs.

#### *Indonesia – Australia Bilateral Relations*

In describing the relation between Indonesia and Australia, according to the former Indonesian Consul General in Sydney, Yayan GH Mulyana, describe this relation with the Indonesian song titled “*Benci tapi Rindu*” or hate-love relationship.<sup>22</sup> The relation between both countries could be described with that title because of both countries have ups and downs in this relation. This relation has been establish since the independence of Indonesia, where in that occasion Australia is one of countries that give the political support and acknowledge the sovereignty of Indonesia after its independence.<sup>23</sup> One of the cooperation of Indonesia and Australia is the Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia signed by the Australian Prime Minister and Indonesian President in Canberra on April 2005. Both Australia and Indonesia agreed to commit with this cooperation in order to gain a peaceful situation and condition, as well as prosperous in Indo – Pacific Region, where here both of them are put ASEAN as the central of its vision, and respect the rights of all states, and based on the international rules and norms.<sup>24</sup>

18 Astri Agustina, “Pengembangan pariwisata di Jawa Barat belum maksimal,” *Merdeka.com*, 1 August 2018, accessed February 20, 2019, <https://bandung.merdeka.com/pariwisata/pengembangan-pariwisata-di-jawa-barat-belum-maksimal-180801t.html>.

19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, “Potensi Seni dan Budaya Jawa Barat”, *Pemerintah Provinsi Jawa Barat*, 2006, accessed February 20, 2019, [http://www.jabarprov.go.id/index.php/potensi\\_daerah/detail/20/4](http://www.jabarprov.go.id/index.php/potensi_daerah/detail/20/4).

20 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, “6 Misi Tingkatkan Kualitas Pendidikan,” *Pemerintah Provinsi Jawa Barat*, 29 March 2017, accessed February 20, 2019, <http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/22180/2017/03/29/6-Misi-Tingkatkan-Kualitas-Pendidikan>.

21 *Ibid.*

22 Guzrizal Dt Salubuak Basa, “Bridging the Gap Between Indonesia and Australia,” *Australian Institute of International Affairs*, 28 May 2018, accessed February 20, 2019, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/bridging-the-gap-between-indonesia-and-australia/>.

23 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, “Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and Republic of Indonesia,” *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*, 31 August 2018, accessed February 20, 2019, <https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia.aspx>.

24 *Ibid.*

By doing this, both of them could open markets that lead to the free flow of trade, capital and ideas where it makes both parties could work closely that provide the strengths and opportunities for both countries in benefit for the peoples by giving contributes in give the resolution of traditional and traditional treats as well as the challenges infacing them and the future of those treats. Besides that, this partnership also opens opportunities for Australia and Indonesia to strengthen their trade, investment, and also business relations. From here, it could boost the relation in cultures and communities and make links between people to people from both countries.

### Analysis

Based on the research and analysis regarding the para-diplomacy in Indonesia based on the three layers of para-diplomacy by Andre Lecours, the practice of para-diplomacy in Indonesia both in province or Regency/city could be described by the type of para-diplomacy in the second layer.<sup>25</sup> The cooperation in the second layer of para-diplomacy is not limited to only one sector, but it consists of many sectors. Same with the cooperation of the sister province cooperation between West Java and South Australia which consists of many sectors, thus proved the second layer of para-diplomacy is the most suitable in describing the type of Indonesia's para-diplomacy. Most of the relations and cooperation which made by the local government in Indonesia are using the MoU as the legal document of the existence of the cooperation between local government with the foreign parties, where both parties cooperate in many sectors.

According to Tavares, there are steps which should be fulfilled by the local government as well as the foreign parties in conducting the para-diplomacy, which are initiation, planning and design, execution and construction,

monitoring and controlling systems, and completion.<sup>26</sup> From the first step, initiation, there is discussion and preparation which had been done by both parties. Few years before the signing of MoU, both parties had visited each other in order to discuss and find the potentials which could be developed as well as included in the cooperation. From several visits, it comes up to the making of MoU which had been signing in 2015. Following with the signing of MoU, both parties arranged the joint working group as the group who responsible and manage for the planning and implementation of the cooperation. As the start of the cooperation, the joint working group conducts a meeting in order to arrange for the work plan and cooperation planning. In here, the joint working group set the programs for every sector which included in the cooperation.

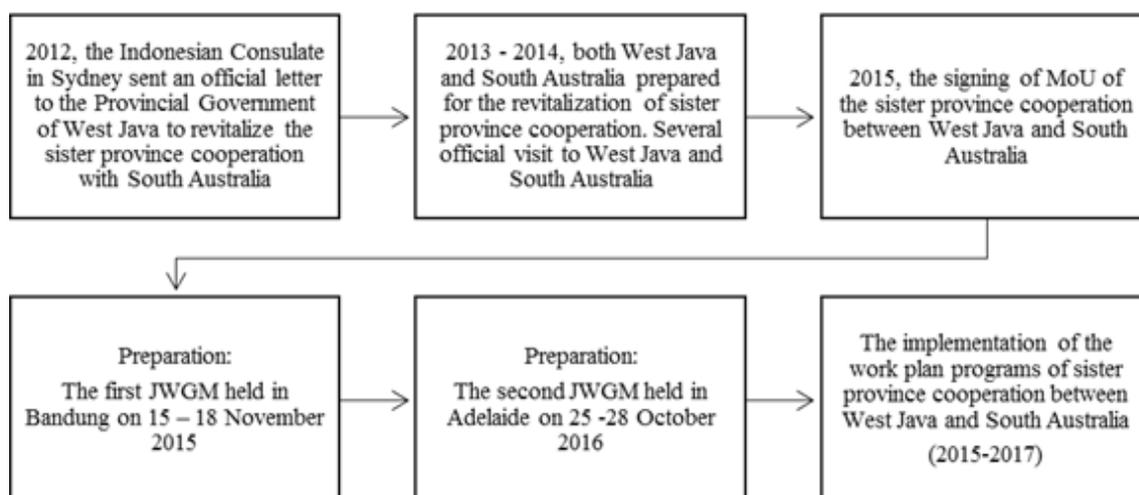
The next step is execution and construction, where the programs had been running and implementing by both parties. The working plan of sister province cooperation between West Java and South Australia which had been conducted and implemented still need to be monitoring and controlling by the responsible parties which join in the programs. From there, it could be seen how the progress of the programs as well as the evaluation which need in order to maximize and improve the programs. The last step in conducting the para-diplomacy is the completion. The sister province cooperation between West Java and South Australia cannot be said complete, since the cooperation is still running until 2020.

Based on the guidance for the local government in conducting the cooperation with the foreign parties, the Provincial Government of West Java had conducted the sister province cooperation with South Australia based on it. In the making process of the cooperation, West Java also doing the communication and discussion with the Indonesian Consulate in

---

25 *Ibid.* no. 9

26 *Ibid.* no. 10



**Graphic 1. The path of sister province cooperation between West Java and South Australia constructed by the writer from the annual report of the cooperation**

Sydney regarding the potentials and the future of the sister province itself. The next step, the representative of both West Java and South Australia conduct the first meeting in order to set and negotiate about the LoI. After the agreement of LoI, both parties could arrange the draft of MoU where it including the sectors which will be cooperated, the Joint Working Group, as well as the related agency which will be responsible with the working program. After the signing of MoU, the Joint Working Group could start to discuss the working plan as well as the implementation of the sister province cooperation through the working plan which had been set. During the process of the implementation, the Joint Working Group also need to conduct a meeting for the evaluation regarding the progress of the cooperation and the future planning of the implementation.

The twinning province cooperation between West Java and South Australia which has been agreed by both parties since September 2015 marked by the signing of MoU by both parties, is one of the examples of the implementation and the practice of Indonesia's para-diplomacy towards the sister province cooperation. In the sister province cooperation, the provincial government could conduct the cooperation in several sectors,

such as trade and investment, education, agriculture, tourism, arts and culture, and so on. Based on the MoU which being signed by West Java and South Australia, the writer focus in three sectors included in this cooperation, which are agriculture, fisheries, and tourism including culture and education.

Since 2015 until 2017, there are several programs and agenda that has been done by West Java and South Australia. After the signing of MoU, both West Java and South Australia set the joint working group for this cooperation in order to manage and monitor the progress of this cooperation, as well as to give suggestion and evaluation regarding the progress and the report of the programs that have been doing by both parties. From 2015, there had been done several joint working group meeting (JWGM) in order to evaluate and discuss the future planning regarding the work plan of this cooperation. The first JWGM held in Bandung on 15 - 18 November 2015. According to the opening speech of Governor of West Java Province in the period of 2015 - 2018, Ahmad Heryawan, in the first meeting, the team of Joint Working Group from both parties has discussed regarding the work plan as the implementation of the MoU that has been arranged before. The work plan is consists of nine sectors, which are agriculture,

fisheries, tourism, art and culture, education, government, industry and trade, investment, as well as health.

The second JWGM held in Adelaide on 25-28 October 2016. Following with the result of the first meeting previously, the second meeting discusses about the progress as well as the evaluation of the cooperation after the first meeting and also to give the future plan and the suggestion for the betterment of the progress in the sister cooperation of West Java and South Australia. In the second meeting, both West Java and South Australia also discuss and identify regarding the future work plan that had been done before by them, as well as the plan to enlarging the cooperation in the

sectors that included in the cooperation. The third JWGM held in Bandung and supposed to be in November 2017, but because of several conditions, it should be postponed.

As explained above are steps which had been fulfilled by the Provincial Government of West Java. West Java had been follow the guidance as well as the rules and regulation which set by the related Ministries who have authorization inorganize and monitor the cooperation of local government with the foreign parties. The future of the sister province itself could be seen from the implementation of the working plan which been set by the Joint Working Group, as well as the progress which been done by West Java and South Australia.

**Table 1. The work plan of Sister Province between West Java and South Australia in Agriculture, Fisheries, and Tourism, including culture and education sector**

| Field                                    | Program activity  |
|--|---|
| Agriculture                              | <p>Agriculture cooperation including sharing of knowledge and technology and provision of products and services:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• South Australia to share its knowledge and systems in regards to horticultural management practices and quarantine and pest control</li> <li>• West Java Government participation at the Royal Adelaide Show</li> </ul>   |
| Fisheries                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internship for fisheries vocational schools graduates or young potential fishermen and university postgraduates from West Java in South Australia's fisheries industry</li> <li>• South Australian government to share with West Java knowledge related to the development of aquaculture industry (in particular abalone, lobster, tuna, and others farming)</li> </ul>   |
| Tourism, including culture and education | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Two way tourism promotion and facilitation: Meeting between West Java and South Australia tourism agencies to discuss and agree on activities aimed at two way tourism promotion and tourism cooperation</li> <li>• Arts and Culture exchanges</li> <li>• Facilitation of education collaboration and exchanges at primary, secondary, vocational and tertiary level through sister school relationships and support in South Australia for teaching of Indonesian language in South Australian government schools</li> <li>• Proposed advisor of Indonesian language and culture to support teachers of Indonesian language and culture in South Australian schools under proposed MoU with Indonesian and the MECD</li> <li>• INDOfest schools program, for the development and presentation of language and cultural related activities by students of Indonesian in South Australia</li> <li>• Proposed language teachers exchange (to and from Indonesia)</li> <li>• Proposed Reading Challenge program or activities exchange to encourage reading students' interest (in the frame of West Java Leader's Reading Challenge / South Australia's Leader Reading Challenge)</li> <li>• Short course for bankers from West Java in South Australia</li> </ul> |

Agriculture, fisheries, tourism including culture and education are three sectors which become the main focus in the sister cooperation between West Java and South Australia, where both parties have the potentials in enlarging and develop those sectors. In here, the writer would like to explain those sectors separately which is according to the work plan and implementing arrangement that have been set by the Joint Working Group.

### *Agriculture*

Agriculture becomes one of the main focus sectors in the sister cooperation between West Java and South Australia. In this sector, there are several work plan that had been set by the Joint Working Group in order to develop and maximize the potential of agriculture sector in both region. As mentioned previously, West Java has a good potential in the agriculture sector. There are a lot of benefits that could be gain from this sector, including the development of regional economic. The agriculture products of West Java Province has a good position in the export market. Otherwise, in order to enter to the foreign market, the agriculture products from West Java need to increase its export quality.

Following with this, in the sister province cooperation with South Australia, West Java Province would like to enlarge the knowledge in the agriculture sector as well as to learn how to maximize the potential in the agriculture sector for the better quality of the products. One of the programs that has been set in the work plan is the sharing of knowledge and technology and provision of products and services, where in here South Australia will share its knowledge and systems towards the horticultural management practices and quarantine and pest control.<sup>27</sup>

---

27 Governmental and Cooperation Bureau of West Java Province, *Achievement of the Implementation Sister Province – State Cooperation between West Java and South Australia* (Bandung: 2017)

Regarding with the agricultural matters, West Java would like to get the sharing knowledge from South Australia about how to eradicate the fruit fly on the plant of *Gedong Gincu* Mango as well as mangosteens. West Java Province has a good potential within its *Gedong Gincu* Mango as well as the mangosteens, while the quality still not good enough for the export quality because of the fruit fly. Thus, it makes West Java would like to remove the fruit fly from the *Gedong Gincu* Mango as well as the mangosteens in order to maximize the export of those fruits to other countries.

According to the progress of the programs in the agriculture sector, the implementation of work plan in this sector still not yet running. The cause of the delay of the implementation in this sector is because of the lack of communications between the parties who responsible in this program, which are West Java Agency of Agriculture and Corps and West Java Agency of Fisheries and Marine/ Primary Industries and Regions South Australia (PIRSA).<sup>28</sup> Otherwise, the need of West Java Province for this knowledge and technology is high, where the export market of South Australia only could be reached if the *Gedong Gincu* Mango come from West Java is free from the fruit fly.

### *Fisheries*

Following the work plan of the sister province cooperation between West Java and South Australia, fisheries also become one of the sectors including in the cooperation. West Java Province has potentials in the fisheries sector, where a lot of fisheries products that could be added to the export market and become the booster for the regional economy in West Java Province. Both West Java and South Australia also would like to improve and develop the knowledge as well as the potential

---

28 *Ibid.*

for this sector in order to enlarge the potential of this sector as well as to increase the quality for the products.

According to the work plan of sister province cooperation between West Java and South Australia, both parties would like to cooperate for the internship programs that will be given to the fisheries vocational schools graduates or for the young potential fishermen and university postgraduates from West Java to South Australia's fisheries industry.<sup>29</sup> The program will be taken by the West Java Agency of Fisheries and Marine or Primary Industries and Regions South Australia. Regarding with the internship program, South Australia will help in bridging for West Java Province in order to propose for the internship program with several private enterprises that related with the aquaculture industry. Also, South Australia could help the internship in joining the research in aquaculture which conducts by the government of South Australia, and also the Australian Maritime and Fisheries Academy also could help in arranging for the placement for West Java students who would like to have an internship in South Australia.

Both parties also will conduct the sharing knowledge regarding the development of the aquaculture industry, including in the industry of abalone, lobster, tuna, and many other farming. The sharing knowledge will conduct in South Australia and West Java thus it makes this program will mutually beneficial. West Java Agency of Fisheries and Marine planning to conduct the house training for sharing knowledge regarding the farming of lobster. In the implementation of the work plan, West Java and South Australia had been done the sharing knowledge and technology transfer on massive development production of Abalone.<sup>30</sup> West Java Agency for Fisheries and Maritime hosting by the PIRSA and Australian Maritime and Fisheries Academy (AMFA) get the sharing

29 *Ibid.*

30 *Ibid.*

knowledge regarding how to improve the fisheries sector in West Java. In this program, West Java Province get the detail knowledge about the practices of fisheries in South Australia in order to achieve the wealthiness of community by optimizing the potential in the fisheries and maritime sector for the development of this sector. Besides that, West Java Province also gets the knowledge transfer regarding the seed mass production, especially the detail knowledge and technology about the cultivation of Abalone. Also, more exploring for the chances to cooperate in the fisheries and maritime sector.

At the second JWGM, the Assistant for Law and Human Rights Administration West Java Regional Secretary, Achadiat Supratman, the increase of production in the fisheries and maritime sector of West Java becomes one of the focuses of the Provincial Government of West Java, comes up from the big potencies of fisheries and maritime sector in West Java.<sup>31</sup> From the meeting it also could be known that South Australia has a good management in managing the potency of fisheries and maritime sector where one of them is in managing the cultivation of Abalone. In 2012-2013, the production of Abalone in South Australia reached 236 ton or equal with AUD 8.6 Million.<sup>32</sup> There are two kinds of cultivation which applied by the South Australia since 2014, which are sea cage technology and benthic structures. Furthermore, West Java would like to learn about the management of fisheries sector in order to maximize the potentials which could be reached by the province.

In the implementation of this program in West Java, the agency of fisheries and maritime in West Java try to identify the

31 KJRI Sydney, "Pengembangan SDM di Bidang Kelautan dan Perikanan dan Budidaya Kerang Abalone di Jawa Barat," *KJRI Sydney*, 9 November 2016, accessed February 20, 2019, <https://www.kemlu.go.id/sydney/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pengembangan-SDMdi-Bidang-Kelautan-Perikanan-Budidaya-Kerang-Abalone-di-Jabar.aspx>.

32 *Ibid.*

facilitation which will be needed in the fisheries and maritime sector. Following with the identification, it comes up with the plan in order to fulfill the facilitation with construct the infrastructure which will be needed by the related stakeholders in West Java. Besides that, the government also planning with the parenting and domestication, as well as prepare the production of small seed for the prototype.<sup>33</sup> Regarding with this, the government also prepare the pilot project location for develop the cultivation, where in this step, the planning started with the establishment of location for Development and Cultivation Center of Freshwater and Sea Southern Region of West Java or as known as *Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut Wilayah Selatan* (BPBAPLWS).

In response to the seriousness of West Java Province regarding the sharing knowledge and technology for the development of fisheries sector in this province, South Australia under the leading from Australian Maritime and Fisheries Academy (AMFA) do the official visit to West Java Agency of Fisheries and Maritime. In the official visit, AMFA is sharing the knowledge about the existing conditions of fisheries and maritime in West Java Province, which is including the coastline, the management of fish bidding, technology capacity as well as the human resources quality.<sup>34</sup> At the same time, AMFA also discusses with the West Java Agency of Fisheries and Maritime regarding the internship and training program for the students from West Java in South Australia. From the discussion, AMFA got the deeper understanding about the objectives and comprehensive knowledge related with the need of West Java in doing the internship and training program. By the visit, both AMFA and West Java Agency of Fisheries and Maritime make the draft of cooperation proposal for the internship and training program.

<sup>33</sup> *Ibid.* no. 27

<sup>34</sup> *Ibid.* no. 27

There is a progress from the program of sister province cooperation in fisheries sector. As explain above, West Java is in the process for enlarging the potential of its fisheries sector, especially in the Abalone cultivation. The sharing knowledge and technology transfer from AMFA to the fisheries sector in West Java Province is very beneficial and useful which this is very important for the development of fisheries sector of West Java and it could support and give suggestion for the betterment of fisheries sector in this province. Furthermore, West Java Agency of Fisheries and Maritime could prepare for the facilitation as well as the construction of infrastructure which will support the better development of fisheries sector in West Java. The result of the program could be seen if the West Java Province is put attention about the result that could be reach by implementing the knowledge that had been share by AMFA. Moreover, the fisheries products from West Java also could entry the export with a better quality, thus it will make more country that will be attracted by the fisheries products of West Java Province.

However, according to all the programs in fisheries sector which been set in the work plan of sister province cooperation between West Java and South Australia, the internship and training program for the students of West Java in South Australia still cannot be proceed because of the lack of fund that faced by the West Java Province. The government still finding for the sponsor or the third party who would like to sponsor the funding for the internship and training program.

#### *Tourism, including culture and education*

Tourism is also one of the sectors which include in the sister province cooperation between West Java and South Australia. The including of the tourism sector in the cooperation, also makes culture and education

become the part in the cooperation. For them, those sectors have potentials in enlarging the mutual beneficial for both region. At the same time, West Java also has potentials in the tourism, culture, and education sector. West Java has a lot of tourism destinations, which those could be beneficial for the economic region. With the maximal efforts do by the Tourism and Culture Agency of West Java, a lot of tourism will be attracted by the tourist.

In the sister province cooperation between West Java and South Australia, the Provincial Government of West Java put tourism, including the culture and education as one of the sectors which cooperated in the cooperation in order to improve and develop the potentials in this sector. According to the work plan which been set for the tourism sector in the cooperation, there are several programs that setting by the Joint Working Group, where both region could gain the mutual benefit for this sector by doing the programs in the cooperation.<sup>35</sup> For the tourism and culture sector, West Java and South Australia using the two way in promoting and facilitating the tourism sector, which consists with the discussion of both parties in agreed regarding the activities that lead to the two-way tourism promotion and cooperation, and also the exchanges of arts and culture. The cooperation into tourism sector is under the responsibility of the West Java Agency of Tourism and Culture and South Australia Tourism Commission. At the same time, West Java and South Australia also agreed to do the collaboration program of Department for Education and Child Development (DECD), Flinders University, and Indonesian Government where they will make House of Culture or *Rumah Budaya* in South Australia.

In the education sector, there is also collaboration program for the primary, secondary, vocational and tertiary level. The collaboration also included the exchange of

students and teachers, where the programs are under the responsibility and collaboration of West Java Agency of Education and South Australia Department for Education and Child Development, as well as Indonesian Minister for Education and Culture and South Australian Minister for Education and Child Development (MECD). For this program, there will be sister school relationships and support in South Australia where it corporates for the teaching of Indonesian language in South Australian government schools. At the same time, also including the proposed advisor for the Indonesian language and culture in order to support the teachers of Indonesian language and culture in South Australian schools within the proposed MoU of Indonesia and MECD.

On the other hand, the Australian Indonesian Association also participates in the sister school relationship between West Java and South Australia. In here, there is INDOfest schools program where the purpose of this program is for the development and also the presentation regarding the language and cultural activities by students of Indonesian in South Australia. Besides that, there will also a professional training for the West Javanese teacher and tutor in South Australia, where teachers from DECD will participate in the exchanges program to Indonesian schools. The purpose of the exchange program is for DECD teachers to learn about the Indonesian curriculum as well as the local educational culture. From the program, the teachers of DECD expected to develop and maintain the Indonesian language proficiency. For the Indonesian teachers, they will do the exchange program to the South Australian schools. Same with the DECD teachers, the Indonesian teachers also will cooperate with the South Australian teachers and experience regarding the Australian Curriculum. Not only teacher exchange, the students to and from Indonesia also will do the exchange program.

Same with the teacher exchange program, the students from West Java will do the exchange program to South Australia and the students from South Australia will do the exchange program to West Java. The aimed of this program is to make every student of West Java and South Australia learn about the language and culture of both countries.

West Java Agency of Education also proposes to implement one of the education program from South Australia, which is Reading Challenge Program. The program is also known as the exchange in encouraging the interest of students in reading. Moreover, there also a short course in South Australia for the Bankers from West Java. For the short course, it will be under the responsible from West Java PT Bank Jabar Banten with the South Australian Department of State Development. In here, South Australian Department of State Development will facilitate the delegations of Bankers from West Java in negotiating with the education institution in South Australia which related with the program. At the same time, there is also a program of education, internship, and work placement for the nursing and midwifery from West Java students to South Australia. For this, West Java Agency of Health and South Australian Department of State Development will responsible for the program. Same with the short course for Bankers, the South Australian Department of State Development also facilitating with the related education institution in South Australia.

In the implementation of the programs for tourism, culture and education sector, there are several programs which had been done by West Java and South Australia. First, West Java participates in arts and culture exchange in the OzAsia Festival 2015.<sup>36</sup> At this program,

36 Nograhan Widhi Koesmawardhani, "OzAsia Festival 2015: Melihat Indonesia yang Bukan Cuma Bali," *Detik News.com*, 26 September 2015, accessed February 20, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-3028554/ozasia-festival-2015-melihat-indonesia-yang-bukan-cuma-bali>.

West Java under the responsibility of West Java Agency of Tourism and Culture introduces the traditional art from West Java to the public in South Australia. OzAsia Festival is the biggest annual event of art and culture in Adelaide, South Australia. The event could be a strategic way for West Java in promoting the traditional art and culture of West Java. Contemporary Music of *Sambasunda*, performance of traditional games of West Java by Hong Community, and the exhibition of Cirebon Mask, as well as the Topeng Dance from Cirebon, are the performances that performed in the event, where those performances got the positive enthusiasm from the audiences.<sup>37</sup> By the participation of West Java's traditional art and culture in OzAsia Festival, it makes several event organizers in South Australia which offer to perform the traditional art and culture of West Java in South Australia's event.

There is also an internship and training program in South Australia for the Art Manager and Event Organizer from West Java. The program is hosting by the Adelaide Festival Center Trust. From the internship and training program, there are several results which could be gain by the delegates of the program from West Java. At first, the program improves the capacity of Art Manager and Event Organizer in West Java in achieving the mission for West Java Province to become as the Festival Province in Indonesia. Besides that, the training gives knowledges for the Art Manager to become the Event Organizer for the festivals or events which held by West Java Province. The program is coming from the offers which offered by several Event Organizers in South Australia who want to put the performance of traditional art and culture of West Java in South Australia's events.

On the other hand, there is also an internship and training program for the Teachers and Principals from West Java Province. West Java Agency of Education is

37 *Ibid.*

responsible for the program. Hosting by the DEDC, the internship and training program give a lot of feedback and knowledge for the teachers as well as the principals in develop the education system in West Java Province. By the program, it improves not only the knowledge but also the global knowledge and professionalism of West Java's teachers and principals, where it expected could be implemented and improve the education system in the West Javanese schools. From this program also could become the beginning for the establishment of West Java Leader's Reading Challenge (WJLRC) where it could help the literacy of South Australia's movement in West Java Province.<sup>38</sup> As the implementation of the internship and training program in West Javanese schools, most of them are getting better in the management system where the schools are become more professional in doing their duties as the education institution.<sup>39</sup> Moreover, most of the schools also change from teacher centered to student centered.<sup>40</sup> Also, the program becomes the establishment of literacy of South Australia's movement in West Java, where the WJLRC is massive and adaptable in the education environment of West Java.<sup>41</sup>

Following with the literacy of South Australia's movement in West Java, the WJLRC started to introduce by the West Javanese schools to the West Javanese students. The movement is massively promoted in the community of West Javanese students, as well as the West Javanese students. At the same time, the movement also expected to build up the potency of young generation in West Java in authoring the friendship of West Java and South Australia. In the implementing

38 *Ibid.* no. 27

39 *Ibid.* no. 27

40 *Ibid.* no. 27

41 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, "Kilasan Sejarah West Java Leader's Reading Challenge," *Gerakan Literasi Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat*, 2016, accessed February 20, 2019, <http://literasi.jabarprov.go.id/index.php?class=sejarah>.

of the movement in West Java, there will be a medal exchange program from the West Java Governor and also the Premier of South Australia as the award for the participants. Other than that, there is also a book published, where the book is written jointly by the West Java and South Australian students who are participated in the program. Also, there is camp or jamboree which held in West Java as the frame of WJLRC program.

Moreover, there is also the internship program in West Java for the South Australian teachers who teach the Bahasa Indonesia subject. By the internship program, the South Australian teacher expected to gain a better knowledge regarding the subject of Bahasa Indonesia as well as the West Java culture. After the internship program in West Java, the South Australian teachers could bring the positive impacts to the students in South Australia, as well as to more familiarize the West Java culture and also the Indonesian culture by teaching and learning about the Indonesian language. In the program, the South Australian teachers got the placement for two years in the West Javanese schools for get a better understanding and develop their knowledge regarding the culture of West Java and Indonesia as well as the Indonesian language.

Therefore, from the progress of the sister province between West Java and South Australia, it could be seen that the cooperation could be more beneficial for both regions. In order to maximize the potentials of this cooperation, both regions could be more intense in doing the communication regarding the programs as well as the progress of the running program in the cooperation. Furthermore, the responsible parties from both regions also could be more focus on the programs which had been set before. The cooperation also could closer not only the government to government relationship,

but also the people to people relationship. In here, both governments should be more facilitate to enlarge the relationship between West Javanese with South Australians, as well as involving them in the running of the cooperation.

## Conclusion

From the explanations above, it could be seen how the practice of Indonesia's para-diplomacy towards the sister province of West Java and South Australia. Through the implementation of the work plan in the sister province, it shows that there are still a lot of opportunities and benefits which could be gain by both regions. The Joint Working Group could discuss more in order to running the programs which still delayed, and for the programs which in running could be more intense for maximizing the benefits for both regions.

From the analysis of the progress of the sister province cooperation between West Java and South Australia, there are several challenges and struggles which faced by both regions. One of the struggles is the lack of communication. As could be seen from the progress of the programs in the cooperation, it could be seen some of the programs are cannot be running because of both regions that lack communication with each other. Moreover, the role of the person in charge also become an important parts to smooth the running of the cooperation. To develop the progress of the cooperation, the person in charge should be focus and maintain the communication with the partner in order to progressing the programs which had been set before.

The result of the para-diplomacy cannot be the same from one region to another region. Every sub-national government who cooperate with foreign parties will have a different result and benefit which gain from the cooperation itself. Even though the case

of para-diplomacy of a region is similar with the case of para-diplomacy from another region, but the implementation as well as the result probably different one with another. Every region has their own goals in doing the cooperation. At the same time, the different partner in the cooperation also cause to the different process and implementation of para-diplomacy. In doing the cooperation, both local and foreign parties have their own rules and regulation as well as goals which would be reached through the cooperation. Other than the governmental role, the people to people role also give a different result of para-diplomacy. The people to people relationship also have a role in the cooperation where it could help the development as well as the progress of the cooperation. Thus, it cause the different result of para-diplomacy in every sub-national government.

Therefore, the implementation of sister province cooperation between West Java and South Australia is still developing, where with the remaining time of the period of cooperation it expected could be more develop and give more progress to the cooperation. Both West Java and South Australia still need cooperate each other as well as maintain the relations in order to implementing the work plan which had been set before. From 2015 to 2017, the cooperation has given a good progress for the beginning of the cooperation through the progress of some programs in the work plan. Within more focus and effort in doing and implementing the cooperation, it could be a mutually beneficial cooperation for both West Java and South Australia, where within times both parties could gain the benefit from the cooperation. While the cooperation is still running until 2020, therefore there is still many opportunities for both parties in developing and increasing the potentials in the cooperation.

## REFERENCES

- Agustina, Astri. *Pengembangan pariwisata di Jawa Barat belum maksimal*. August 1, 2018. <https://bandung.merdeka.com/pariwisata/pengembangan-pariwisata-di-jawa-barat-belum-maksimal-180801t.html> (accessed February 20, 2019).
- Australia, Government West Java & South. *Memorandum of Understanding Between the Government of West Java Province of the Republic of Indonesia and The Crown in Right of the State of South Australia Concerning Sister Province - State Cooperation*. Adelaide, South Australia, September 24, 2015.
- Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa. *Kilasan Sejarah West Java Leader's Reading Challenge*. 2016. <http://literasi.jabarprov.go.id/index.php?class=sejarah> (accessed February 20, 2019).
- Barat, Pemerintah Provinsi Jawa. *6 Misi Tingkatkan Kualitas Pendidikan*. March 29, 2017. <http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/22180/2017/03/29/6-Misi-Tingkatkan-Kualitas-Pendidikan> (accessed February 20, 2019).
- . *Potensi Seni dan Budaya Jawa Barat*. 2006. [http://www.jabarprov.go.id/index.php/potensi\\_daerah/detail/20/4](http://www.jabarprov.go.id/index.php/potensi_daerah/detail/20/4) (accessed February 20, 2019).
- Basa, Guzrizal Dt Salubuak. *Bridging the Gap Between Indonesia and Australia*. May 28, 2018. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/bridging-the-gap-between-indonesia-and-australia/> (accessed February 20, 2019).
- Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government. *Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia*. August 31, 2018. <https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia.aspx> (accessed February 20, 2019).
- Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta, 2006.
- Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999*. Jakarta, May 7, 1999.
- Istiqomah, Zuli. *Jabar Potensi Kedaulatan Pangan Nasional*. January 23, 2017. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/22/ok6nwg370-jabar-potensi-kedaulatan-pangan-nasional> (accessed February 20, 2019).
- Koesmawardhani, Nograhan Widhi. *OzAsia Festival 2015: Melihat Indonesia yang Bukan Cuma Bali*. September 26, 2015. <https://news.detik.com/berita/d-3028554/ozasia-festival-2015-melihat-indonesia-yang-bukan-cuma-bali> (accessed February 20, 2019).
- Kooistra, Marten. *Paradiplomacy in Practise: The Development of Paradiplomacy in Quebec, Scotland, and California*. 2017.
- Lecours, Andre. *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2008.
- Minami, Masaki. "The Role and Policy of the South Australian Government in the Development of Economic Ties with Asian Nations." Adelaide, 1997.
- Mukti, Takdir Ali. *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2013.

Province, Governmental and Cooperation Bureau of West Java. "Achievement of the Implementation Sister Province - State Cooperation between West Java and South Australia." Bandung, 2017.

Putra, Yudha Manggala P. *Mangga 'Gedong Gincu' Diminati Pasar Timur Tengah*. May 5, 2014. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/05/05/n53prj-mangga-gedong-gincu-diminati-pasar-timur-tengah> (accessed February 20, 2019).

Saha, Rakhahari Chatterji and Swagata. "Paradiplomacy: Concept and the Context." *India Quaterly*, 2017: 375-384.

Sydney, KJRI. *Pengembangan SDM di Bidang Kelautan dan Perikanan dan Budidaya Kerang Abalone di Jawa Barat*. November 9, 2016. <https://www.kemlu.go.id/sydney/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pengembangan-SDMdi-Bidang-Kelautan-Perikanan-Budidaya-Kerang-Abalone-di-Jabar.aspx> (accessed February 20, 2019).

—. *Signing of MoU on Sister Province / State Cooperation between West Java and South Australia*. September 24, 2015. <https://www.kemlu.go.id/sydney/en/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Signing-of-MoU-on-Sister-Province-State-Cooperation-between-West-Java-and-South-Australia.aspx> (accessed February 20, 2019).

Tavares, Rodrigo. *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press, 2016.

Tempo.co. *Deddy Mizwar: Potensi Perikanan Jabar Belum Optimal*. December 17, 2017. <https://nasional.tempo.co/read/1043043/deddy-mizwar-potensi-perikanan-jabar-belum-optimal> (accessed February 20, 2019).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

# Analisis Diplomasi *Soft Power Denmark* Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia) *An Analysis of Denmark's Soft Power Diplomacy in Indonesia* (*A Study on Environmental Management Cooperation in Indonesia*)

Septyanto Galan Prakoso\*, Nadia Dian Ardita\*, Andriyansyah Perdana Murtyantoro\*

\*Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
email: septyantogalan@yahoo.com

---

## Riwayat Artikel

Diterima 15 Maret 2019  
Direvisi 21 April 2019  
Disetujui 2 Mei 2019

---

## Abstract

*Global warming is one of the key issues of the century. The cause of this particular phenomenon is that most economic activities have been carried out by many countries without due consideration of sustainability and the environment. Due to the lack of awareness of both aspects, the Earth's temperature is getting warmer over the past few years and the long-term effect of such trend is that the sea level has started to rise. Coastal countries start to witness its impacts and some of them have already taken several actions to address this problem. Among the few countries that are determined to take serious measures to address this issue is Denmark. Through its Ministry of Foreign Affairs, Denmark has worked in cooperation/collaboration with countries that have contributed to this environmental problem in slowing down the phase of global warming by looking directly at its source. In response to this situation, back in November 2017, Denmark's Prime Minister Lars Løkke Rasmussen visited Jakarta to discuss issues of Denmark's interest in Indonesia, especially about environmental issue in Indonesia. The meeting was marked by a commitment of strengthened relations between two countries, and an exchange of gifts between both leaders. This study aims to find out the reasons why Denmark wanted to cooperate with Indonesia in surmounting environmental problems, and what actions the Danish government has taken to decrease the rate of pollution in Indonesia through the adoption of the National Interest concept. Towards the end, this article shows that Denmark has built several green facilities in order to decrease the pollution level, which partially comes from Indonesia.*

*Keywords: Indonesia-Denmark; green diplomacy; cooperation.*

---

## Abstrak

Pemanasan global merupakan isu yang penting pada abad ini. Sumber dari terjadinya fenomena ini adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sebagai akibat dari kurangnya aspek-aspek tersebut menyebabkan meningkatnya temperatur bumi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini kemudian menyebabkan dampak jangka panjang yaitu naiknya permukaan air laut. Negara-negara pesisir mulai merasakan dampak dan melakukan berbagai usaha untuk menghadapi isu lingkungan ini. Denmark menjadi salah satu negara yang berkeinginan untuk mengatasi masalah ini. Melalui Kementerian Luar Negerinya, Denmark telah melakukan kerja sama dengan negara-negara yang menjadi kontributor penyebab masalah lingkungan ini dengan tujuan untuk memperlambat laju pemanasan global. Melihat situasi ini, Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, melakukan kunjungan ke Indonesia pada November 2017. Kunjungan kenegaraan ini bertujuan untuk membahas kepentingan nasional Denmark terhadap Indonesia, khususnya mengenai isu lingkungan hidup. Pertemuan ini ditandai dengan pemberian hadiah diplomatik antara kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Denmark ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan serta tindakan apa yang pemerintah Denmark lakukan dalam mengurangi tingkat polusi di Indonesia dengan menggunakan konsep *National Interest*. Bagian terakhir jurnal ini menunjukkan hasil konkrit kerja sama Indonesia-Denmark yaitu dibangunnya fasilitas-fasilitas yang berorientasi Hijau untuk mengurangi polusi yang sebagian dihasilkan oleh Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia-Denmark; diplomasi hijau; kerja sama.

## Pendahuluan

Denmark dan Indonesia merupakan negara yang telah mengadakan hubungan diplomatik dan kerja sama sejak 1950 dan telah berjalan dengan baik. Baik Indonesia maupun Denmark menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, serta hubungan bilateral didasarkan atas kemitraan yang sejajar sebagai sesama negara yang berdaulat. Kerja sama yang dilakukan antara lain dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Hubungan Indonesia dengan Denmark semakin erat ketika reformasi terjadi di Indonesia tahun 1997. Denmark mendukung demokratisasi di Indonesia melalui skema kerja sama pembangunan (*Danish International Development Agency/DANIDA*). Beberapa tahun terakhir, pemerintah Denmark memandang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penting di kawasan Asia yang memiliki sumber daya potensial. Sejak tahun 1950, kunjungan kenegaraan oleh Ratu Margrethe II beserta Pangeran Consort Henrik dilakukan petama kali pada tanggal 21-24 Oktober 2015 yang bersamaan dengan momentum 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara.<sup>1</sup> Menurut Menteri Luar negeri Denmark, Kristian Jensen, kunjungan kenegaraan ini dilakukan dengan dasar untuk memperkuat kerja sama, mencakup perdagangan, pengembangan, budaya, politik, interaksi bisnis dan organisasi non-pemerintah.<sup>2</sup> Selain itu, Menteri Luar Negeri Denmark juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan pemain kunci di Asia serta memiliki kapasitas di ASEAN yang kemudian membuat pemerintah Denmark ingin memiliki aliansi kerja sama yang lebih

1 Kementerian Luar Negeri Indonesia, "Sekilas Info tentang Denmark," *Kementerian Luar Negeri Indonesia*, 2017, diakses 27 Desember 2017, <https://www.kemlu.go.id/copenhagen/id/Pages/Denmark.aspx>

2 Yohanna Ririhena, "Bright future seen for Indonesian-Danish relations," *The Jakarta Post*, 9 Oktober 2015, diakses 31 Maret 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/09/bright-future-seen-indonesian-danish-relations.html>

kuat dan membangun hubungan yang lebih kuat di seluruh Asia Tenggara.<sup>3</sup>

Tahun 2017 Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengunjungi Indonesia tepatnya di Istana Bogor pada tanggal 28 November 2017 dengan membawakan hadiah diplomatik berupa piringan hitam band Metallica. Kesukaan Presiden Joko Widodo terhadap band Metallica membuat Perdana Menteri Denmark semakin tertarik untuk mengenal lebih jauh sosok Joko Widodo. Pemberian hadiah tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik. Presiden Joko Widodo kemudian membalasnya dengan memberikan Rencong, senjata khas dari Aceh. Kunjungan tersebut dalam dunia hubungan internasional tidak semata-mata hanya kunjungan biasa belaka karena setiap kunjungan yang dilakukan pastinya terdapat pembahasan tertentu. Seperti pada kunjungan pertama kali oleh Ratu Denmark, kedua negara menghasilkan empat bentuk kerja sama, yaitu dialog antarumat beragama, energi terbarukan, kemaritiman, dan pendidikan. Namun, tidak setiap kunjungan beserta pembahasan yang dilakukan antar aktor diplomasi dipublikasikan kepada publik secara utuh karena untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing pihak. Pemberian hadiah diplomatik dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk melancarkan pembahasan diplomatik yang dilakukan.

Ada beberapa faktor yang mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia dan Denmark. Salah satunya Denmark menginginkan adanya pengembangan program hijau dengan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim, mendukung energi terbarukan dan efisiensi energi. Denmark sejak tahun 1973 ketika krisis minyak terjadi, telah menikmati pasokan energi yang terjamin karena adanya penguatan mendasar dari sistem energi yang diterapkan, integrasi kebijakan energi ramah lingkungan, serta kemajuan

3 Ririhena, "Bright future seen."

menuju efisiensi energi dengan langkah-langkah penghematan.<sup>4</sup> Hal ini kemudian membuat Denmark berkomitmen untuk menetapkan target 30% energi terbarukan pada tahun 2025 dalam berbagai sumber energi negaranya.<sup>5</sup> Pada tahun 1990, hampir 1 kg karbon dioksida dikeluarkan untuk setiap kWh listrik yang diproduksi di Denmark. Namun pada tahun 2012 Denmark hanya memancarkan kurang dari 300 g.<sup>6</sup> Integrasi energi angin yang tinggi, meluasnya penggunaan biomassa, dan penerapan sistem pajak energi lingkungan progresif telah mendukung anggapan Denmark sebagai 'negara hijau'.<sup>7</sup> Klok et. al dalam Sovacool menyatakan bahwa Denmark dapat dikatakan sebagai negara 'gelombang pertama yang menerapkan pajak lingkungan dan *Ecological Tax Reform* (Reformasi Pajak Ekologi) dibandingkan dengan negara-negara lain.<sup>8</sup>

Dengan melihat keadaan domestik yang ada di Denmark melalui penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan masalah lingkungan, tentunya kerja sama bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Denmark akan memberikan timbal balik bagi kedua negara. Dampak yang dirasakan bagi negara juga tentunya akan meluas bagi masyarakat maupun aktor-aktor lain yang terlibat dalam kerja sama. Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana Denmark dapat mencapai kepentingan nasionalnya di Indonesia khususnya melalui bidang lingkungan hidup. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau, teori sekuritisasi oleh Barry Buzan, serta menggunakan konsep *soft-power diplomacy* dengan melihat realitas kontemporer yang terjadi akibat perkembangan

informasi dan teknologi. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan dinamika hubungan diplomatik dan kerja sama yang telah terjalin antara Denmark dan Indonesia sejak tahun 1950.

## Konsep Teori

### *Kepentingan Nasional*

Teori kepentingan nasional merupakan teori yang lahir dari pendekatan realisme yang dicetuskan oleh Hans J. Morgenthau. Keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis. Kepentingan nasional diartikan sebagai kemampuan negara bangsa untuk melindungi identitas fisik, identitas politik, dan identitas kulturalnya dari gangguan negara bangsa lain dengan mengabaikan nilai moral universal yang ada. Morgenthau juga beranggapan bahwa negara merupakan aktor yang paling utama dalam melaksanakan dan melindungi kepentingan nasional dan menganggap bahwa individu, organisasi internasional, maupun aktor lainnya kurang penting untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan nasional. Namun seiring perkembangan zaman, dibutuhkan interaksi yang tetap memerhatikan nilai moral universal, sehingga muncullah pemikir kaum neorealis. Kenneth Waltz, pemikir kaum neorealis terkemuka mengungkapkan bahwa struktur sistem internasional merupakan titik fokus dalam menganalisis sebuah interaksi antar negara. Neorealisme menurut Waltz kurang lebih membuat aturan-aturan mengenai ketatanegaraan dan diplomasi. Negara melalui pemimpinnya merupakan aktor rasional memiliki strategi dan kelihaihan dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya.<sup>9</sup>

4 Ranjan Parajuli, "Looking into the Danish energy system: Lesson to be learned," *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16, no. (2012): 2191-2199.

5 Parajuli, "Looking into the Danish energy system."

6 Benjamin K. Sovacool, "Energy policymaking in Denmark: Implications for global energy," *Energy Policy* 61, 2013: 829-839.

7 Sovacool, "Energy policymaking in Denmark."

8 Sovacool, "Energy policymaking in Denmark."

9 Heydarian Pashakhanlou, Arash, "Comparing and Contrasting Classical Realism and Neorealism: A Re-examination of Hans Morgenthau's and Kenneth Waltz's Theories of International Relations". *E-international relations student online article*, 23 Juli 2009

## Soft Power Diplomacy

Menurut Joseph S. Nye, secara tradisional kekuatan sebuah negara dalam kancah internasional merupakan kekuatan militer yang menjadi kekuatan utama yang harus dimiliki. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kekuatan saat ini tidak ditekankan pada kekuatan tradisional saja. Faktor teknologi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah kekuatan signifikan dalam kancah internasional. Sehingga, faktor geografi, jumlah populasi, dan sumber daya alam menjadi kurang penting.<sup>10</sup> Sumber dari *soft-power* itu sendiri terdapat tiga yang utama, yakni budaya (*culture*), nilai politik (*political values*), dan kebijakan luar negeri (*foreign policy*).

Budaya memiliki daya tarik dan kemampuan asimilasi, artinya budaya dapat memberikan pemikiran dan nilai terhadap subjek, sehingga memiliki persepsi yang sama.<sup>11</sup> Dalam budaya, Nye membagi menjadi dua kelas, yaitu budaya kelas tinggi (*high culture*) dan kelas budaya populer (*popular culture*). Budaya kelas tinggi dapat membuka sisi keindahannya terhadap orang-orang dan dapat membuat mereka takluk secara emosional. Sedangkan budaya populer memiliki daya penetrasi yang kuat dan telah ada di seluruh dunia. Budaya populer yang ada di suatu negara dapat memperlancar negara untuk mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara. Sebagai sebuah contoh, budaya populer Amerika telah memiliki pengaruh di berbagai penjuru dunia melalui NIKE, McDonald, dan Hollywood yang semuanya memengaruhi gaya hidup maupun hobi.<sup>12</sup> Hal ini disebabkan karena adanya penetrasi budaya populer yang dilakukan secara terus menerus untuk mempromosikan budaya dan ideologi Amerika. Sehingga, nilai

dan psikologi populer yang ada di negara lain mendapatkan pengaruh secara halus dengan cara yang beragam, seperti terintegrasi dengan budaya asli.<sup>13</sup>

Nilai politik merupakan salah satu komponen yang utama dalam suatu sistem, di mana suatu negara dianggap tidak terlalu kuat jika sistem ideologis mereka lemah. Sistem ini bergantung pada daya tarik nilai-nilai yang merupakan komponen dari *soft-power*. Ketika nilai politik suatu negara bisa membuat negara tertarik melalui inovasi yang dilakukan secara terus-menerus, maka suatu negara dapat memiliki posisi yang kuat dalam hubungan internasional serta pemenuhan kepentingan nasional dapat lebih mudah tercapai.<sup>14</sup>

Kebijakan suatu negara baik kebijakan dalam negeri ataupun luar negeri merupakan hasil dari pengimplementasian nilai-nilai politik yang ada dalam suatu negara. Masyarakat akan lebih merasakan nilai-nilai politik yang ada melalui kebijakan yang telah dibentuk. Kebijakan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan waktunya, yakni kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua macam kebijakan ini dibentuk oleh pemerintah suatu negara berdasarkan berbagai latar belakang.<sup>15</sup> Pemerintah suatu negara melalui kebijakan luar negerinya dapat memengaruhi status dan popularitas mereka dalam lingkungan internasional serta lingkungan domestik.<sup>16</sup>

Ketiga sumber tersebut telah membuat kekuatan antarnegara di dunia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan masalah internasional menjadi semakin kompleks dengan semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam percaturan internasional. Nye berpendapat bahwa *soft-power* menjadi sebuah kemampuan yang dapat merealisasikan tujuan ataupun kepentingan nasional melalui

10 Joseph S. Nye, "Soft Power," *Foreign Policy*, no. 80 (1990): 153-171.

11 Li Lin dan Leng Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory and Its Revelation Towards Ideological and Political Education," *Humanities and Social Sciences* 5, no. 2. (Maret 2017): 69-74.

12 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

13 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

14 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

15 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

16 Lin dan Hongtao, "Joseph Nye's Soft Power Theory."

hal yang lebih menarik dibandingkan dengan tindakan melalui kekerasan, seperti perang, invasi, ataupun yang lainnya.

### *Sekuritisasi*

Sekuritisasi pada dasarnya adalah sebuah bentuk turunan dari teori konstruktivisme dimana subyek akan membangun sebuah pandangan terhadap sebuah obyek yang mana obyek ini kemudian dianggap sebagai ancaman dan akhirnya diperlukanlah sebuah aksi untuk mencegah ancaman yang dibawanya. Sekuritisasi ini adalah bentuk ekstrim dari politisasi<sup>17</sup> karena menggunakan bermacam cara dan sarana untuk menghindari ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional sebuah negara. Sekuritisasi ini tidak hanya mengacu pada aspek militer saja, namun juga masalah-masalah sosial lainnya yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Sebagai contoh sebuah negara mempunyai masalah lingkungan, maka dari itu sebuah negara dengan melewati beberapa proses menyatakan kepada masyarakat bahwasanya isu lingkungan ini dapat mengancam keberlangsungan kegiatan kenegaraan sehingga negara harus melakukan beberapa tindakan agar permasalahan ini dapat ditanggulangi.

Adapun komponen-komponen dalam Teori Sekuritisasi ini yaitu:<sup>18</sup> (a) *Agent*, adalah pihak yang menyatakan perlunya tindakan, langkah dan pernyataan sekuritisasi; (b) *An existential threat*, adalah sebuah obyek yang sudah diidentifikasi sebagai ancaman potensial; (c) *A referent object*, adalah objek yang harus dilindungi dari potensi ancaman yang sebelumnya sudah diidentifikasi; dan (d) *An audience*, ialah target dari tindakan sekuritisasi yang harus dibujuk agar dapat menerima isu yang diangkat menjadi sebuah ancaman. *Audience* ini bisa disejajarkan oleh masyarakat dari sebuah Negara.

17 Barry Buzan, "A New Framework for Analysis", (London: Lynne Rienner Publishers Inc, 1998)

18 Buzan, "A New Framework for Analysis."

Maka dari itu bisa dikatakan bahwasannya teori sekuritisasi ini tidak berpaku pada militer saja. Namun isu-isu yang tadinya tidak mendapatkan perhatian apapun dari pemerintah bisa saja menjadi ancaman jika negara menyatakan objek tersebut dapat mengganggu keamanan nasional.

### **Kebijakan dan Strategi Denmark di Bidang Lingkungan Hidup**

Denmark merupakan salah satu negara Nordik yang berada di Eropa bagian Utara yang dinobatkan sebagai salah satu negara pengolah limbah menjadi energi terbaik di dunia. Sejak tahun 1988, Denmark dihadapkan pada masalah pemanasan global yang mana membuat permukaan air laut Denmark mengalami kenaikan sebagai akibat mencairnya es di Kutub Utara. Tidak hanya kenaikan permukaan air laut, temperatur udara yang ada di Denmark juga mengalami kenaikan sebesar 1,5°C. Suhu rata-rata ketika musim dingin menjadi lebih hangat daripada 2°C dan suhu rata-rata selama musim panas sebesar 16°C.<sup>19</sup> Pada tanggal 4 Januari 2017, Denmark terkena musibah banjir akibat kenaikan permukaan laut. Permukaan laut tersebut naik hingga 177 cm di atas permukaan laut di wilayah selatan Denmark dan 157 cm di sebelah selatan Kopenhagen. Menurut Carlo Sørensen, profesor iklim dan ekonomi di *Technical University of Denmark*, permukaan laut Denmark akan naik hingga 70 cm pada tahun 2100 sehingga banjir akan lebih sering terjadi daripada tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ini tentunya mengancam keamanan dan keselamatan rakyat Denmark karena keadaan tersebut menimbulkan berbagai masalah kesehatan, ekonomi maupun sosial. Perlu diketahui bahwa Denmark merupakan sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*),

19 Climate Change, "Denmark," *Climate Change Post*, 23 Oktober 2016, diakses 26 Desember 2017, <https://www.climatechange.org/denmark/climate-change/>

yakni Denmark mengambil peran yang sangat penting untuk menyediakan layanan sosial yang layak bagi rakyatnya.

Pemerintah Denmark kemudian memberlakukan berbagai macam kebijakan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global yang dilakukan oleh Kementerian Energi, Bangunan dan Iklim. Ada 3 aspek utama yang dilakukan oleh Kementerian Energi, Bangunan dan Iklim untuk mengurangi efek pemanasan global,<sup>20</sup> yaitu: *pertama*, kampanye informasi melalui pembuatan website yang dioperasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; *Kedua*, Strategi penelitian, melalui pembentukan badan koordinasi untuk memastikan perubahan iklim yang terjadi di Denmark. Unit koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah Denmark memiliki tugas untuk melakukan penelitian adaptasi, menghimpun data, meneliti mengenai dampak dari iklim, serta melakukan penelitian lain yang relevan dengan adaptasi iklim. Selain itu, unit ini juga bertugas untuk mengoordinasikan dan memelihara tujuan penelitian yang ada dalam adaptasi iklim di Denmark yang dipandu oleh penasehat teknis yang terdiri dari peneliti Denmark dan internasional.<sup>21</sup> Proyek penelitian adaptasi ini mencakup studi kebutuhan adaptasi dalam arsitektur; melihat pengaruh dinamika ekologis dan perubahan iklim terhadap lingkungan laut di perairan Denmark; penilaian risiko berdasarkan evaluasi statistik curah hujan ekstrim, gelombang badai, dan ketinggian gelombang ekstrem; dan partisipasi dalam studi internasional mengenai risiko banjir di jalan raya.<sup>22</sup> Dan *ketiga*, membuat kerangka kerja organisasi, melalui pembentukan forum koordinasi antar otoritas publik.

20 E. Michael Goodsite., et al, "WHITE PAPER: Climate Change Adaptation in the Nordic Countries," *Stockholm Environment Institute*, 9 Maret 2013, diakses 26 Desember 2017, <https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/N-CMAEP-2013-White-Paper-Nordic-Countries-Adaptation.pdf>

21 Goodsite., et. al, "WHITE PAPER."

22 Goodsite., et. al, "WHITE PAPER."

Di samping itu, pemerintah Denmark juga melakukan penanggulangan banjir akibat dari pemanasan global dan juga berkomitmen untuk merubah sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah perubahan sumber pembangkit listrik dari batu bara ke energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi angin.<sup>23</sup>

Denmark telah menjadi sebuah negara yang berhasil menciptakan pembangkit energi terbarukan yang terus meningkat sejak tahun 1980. Hingga tahun 2017, hampir 30% konsumsi energi Denmark menggunakan energi terbarukan.<sup>24</sup> Sumber energi terbarukan, terutama angin, telah menjadi penyumbang sumber energi listrik dalam negeri Denmark sebanyak 50%.<sup>25</sup> Turbin angin pembangkit listrik Denmark telah mampu menghasilkan energi listrik lebih banyak dari permintaan domestik dengan total lebih dari 5 GW (1,3 GW turbin berada di lepas pantai).<sup>26</sup> Denmark memiliki kondisi angin terbaik di Eropa dan didukung dengan kebijakan pemerintah pada saat krisis minyak melanda pada tahun 1970-an dengan bantuan penelitian untuk memanfaatkan energi tersebut.<sup>27</sup> Tahun 2015, tenaga angin telah memberikan kontribusi sebesar 42% dari produksi listrik di Denmark.<sup>28</sup>

23 Nezar Patria, "Indonesia, Denmark to cooperate in clean energy," *The Jakarta Post*, 24 Mei 2018, diakses 23 Februari 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/24/indonesia-denmark-to-cooperate-in-clean-energy.html>

24 Danish Energy Agency, "Denmark signs MoU with Indonesian Energy Company," *My News Desk*, 29 November 2017, diakses 16 Desember 2017, <http://www.mynewsdesk.com/danish-energy-agency/news/denmark-signs-mou-with-indonesian-energy-company-281737>

25 Danish Energy Agency, "Denmark signs MoU."

26 Danish Energy Agency, "Denmark signs MoU."

27 Benjamin K. Sovacool, "Energy policymaking in Denmark: Implications for global energy," *Energy Policy* 61, 2013: 829-839.

28 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Kerja Sama Indonesia - Denmark, Jadikan Nyata, Sederhana, dan Workable," *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 29 November 2017, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kerja-sama-indonesia-denmark-jadikan-nyata-sederhana-dan-workable>

Tarif IPP Tenaga Angin di Denmark sebesar di bawah USD 4 sen/kWh untuk *onshore* dan di bawah USD 6 sen/kWh untuk *offshore*.<sup>29</sup> Sejak tahun 1990-an, Denmark telah berhasil meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) sebanyak 44% dengan konsumsi energi telah turun sebanyak 8% dan emisi karbon yang telah disesuaikan sebesar 36%.<sup>30</sup>

### Tantangan *Green Realism* Denmark

Lars Løkke Rasmussen merupakan Perdana Menteri Denmark yang menjabat sejak Juni 2015. Ia merupakan seorang politikus yang berasal dari partai minoritas di Denmark yaitu Partai Liberal Venstre yang ia sendiri merupakan pemimpin partai tersebut. Sejak terpilih menjadi Perdana Menteri Denmark, Rasmussen mulai mengembangkan komitmennya terhadap perubahan iklim di Denmark melalui kebijakan mengenai iklim dan energi. Kebijakan-kebijakan tersebut dibangun dengan dasar *green realism*. *Green realism* merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa ekologi dalam kehidupan memiliki hubungan satu sama lain, yaitu aktivitas yang dilakukan manusia dapat memengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya dan berdampak hingga melewati batas-batas negara. Rasmussen menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi, semakin luasnya lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan untuk generasi mendatang akan mendapatkan tingkat lingkungan yang sama seperti saat ini. Dengan demikian, pemerintah menginginkan adanya “*more environment for less money*”.<sup>31</sup>

Pendekatan ini juga merubah kebijakan pemerintah mengenai energi terbarukan,

29 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Kerja Sama Indonesia-Denmark.”

30 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Kerja Sama Indonesia-Denmark.”

31 Helene Dyrhaug, “Green realism – An assessment of the Danish government’s climate & energy policy,” UACES, 26 November 2015, diakses 27 Desember 2017, <http://eutrack.ideasonerurope.eu/2015/11/16/green-realism-assessment-danish-governments-climate-energy-policy/>

yakni dari tenaga angin ke alternatif sumber daya lainnya. Akan tetapi terdapat beberapa kontroversi dalam pemerintah Denmark ketika akan melaksanakan kebijakan ini, yakni mengenai masalah anggaran. Pemerintah berencana untuk memotong anggaran di semua tingkat dan bidang kebijakan, seperti budaya, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan. Pemotongan belanja ini tentunya sulit untuk mendukung transisi ekonomi hijau ini. Pertentangan salah satunya datang dari mantan Menteri Perubahan Iklim Denmark dan Mantan Komisaris Uni Eropa untuk Aksi Perubahan Iklim, Connie Hedegaard.<sup>32</sup> Jika Rasmussen ingin kebijakannya disetujui, maka ia harus mendapatkan dukungan dari tiga partai di parlemen, yaitu *Danish People’s Party*, *Liberal Alliance*, dan *Conservative Party*. Dukungan kepada Rasmussen yang paling terlihat dari ketiga partai tersebut adalah dari *Conservative Party*. Sehingga untuk mendapatkan dukungan yang banyak, Rasmussen harus memberikan beberapa insentif kepada mereka melalui anggaran belanja yang lebih kepada mereka. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan keringanan hambatan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Denmark meskipun terdapat pemotongan rancangan anggaran dana.

### *Danish International Development Agency* (DANIDA)

Sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Denmark dari pengurangan dampak pemanasan global, pemerintah Denmark tidak hanya memberlakukan beberapa kebijakan di dalam negeri saja. Namun, Denmark juga mencanangkan beberapa inisiasi dalam skala Internasional untuk terus mengurangi dampak pemanasan global terhadap kedaulatan negaranya. Salah satu inisiasi yang dicanangkan Denmark adalah DANIDA.

32 Dyrhaug, “Green realism.”

DANIDA adalah singkatan dari *Danish International Development Agency*. DANIDA adalah sebuah program kerja yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Denmark yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan negara-negara berkembang di berbagai kawasan. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Denmark melalui DANIDA mayoritas tertuju pada Afrika. Alasan mengapa lebih banyak bantuan ditujukan ke Afrika karena masih banyak permasalahan di Afrika yang kurang mendapatkan perhatian langsung dari dunia Internasional. Pada tahun 2016, Denmark menyalurkan total bantuan senilai DKK 15.96 Miliar atau setara dengan USD 2,34 miliar.<sup>33</sup>

Selain di Afrika, DANIDA juga mengadakan kerja sama dengan berbagai negara lain di Asia, salah satunya adalah Indonesia sebagai sebuah negara dengan luas hutan yang besar. Akan tetapi, luas hutan yang ada di Indonesia berkurang tiap tahunnya akibat adanya deforestasi yang terus meningkat. Selama tahun 2014-2015, total deforestasi yang terjadi seluas 1,09 juta hektar.<sup>34</sup> Deforestasi terluas terjadi di Pulau Sumatera, yakni 519 ribu hektar atau 47,5 persen dari total deforestasi di Indonesia, diikuti Pulau Kalimantan sebesar 34,3 persen.<sup>35</sup> Hal ini membuat Denmark khawatir karena dengan maraknya deforestasi di Indonesia maka laju pemanasan global akan meningkat. Dengan berkurangnya jumlah luas hutan yang ada di Indonesia, maka penyerapan karbon dioksida oleh hutan Indonesia juga akan menurun.

33 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, "About DANIDA," *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 2011, diakses 24 Februari 2019, <http://um.dk/en/danida-en/about-danida/>

34 Badan Pusat Statistik, "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017," BPS, 2017, diakses 2 April 2019, <https://unstats.un.org/unsd/environment/Compendia/Statistik%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%202017.pdf>

35 Badan Pusat Statistik, "Statistik Lingkungan Hidup."

Dampak dari fenomena ini adalah terjadinya pemanasan global yang mana suhu rata-rata global akan naik. Maka dari itu, peningkatan suhu ini akan membuat wilayah Denmark terancam tenggelam karena es di wilayah kutub akan mencair.

Melihat keadaan yang semakin genting, Denmark melalui DANIDA mengadakan kerja sama dengan Indonesia di beberapa sektor, antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup> (a) Program Budaya Denmark mendukung pemangku kepentingan utama Indonesia dalam upaya mereka untuk mengembangkan sektor seni dan budaya, di mana para pelaku budaya memiliki ruang dan kapasitas untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas dan sebagai wadah di mana seni berkontribusi pada saling pengertian dan kepercayaan; (b) Program Dukungan Lingkungan. Program ini mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan manajemen lingkungan dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sekarang dalam fase ketiga (ESP3); (c) Program Tata Pemerintahan yang Baik. Program ini mendukung Indonesia dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dan memerangi kejahatan transnasional.

Di antara ketiga poin utama kerja sama Indonesia dan Denmark tersebut, yang memiliki titik fokus lebih adalah kerja sama di bidang lingkungan. Hal ini dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah Denmark untuk bekerjasama dengan Indonesia sejak tahun 2005.<sup>37</sup> Rencana pembangunan yang dilakukan antara kedua pemerintah mulai dari tahun 2005 hingga 2025 menargetkan pada bidang

36 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, "DANIDA in Indonesia," *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 2017, diakses 25 Februari 2019, <http://indonesien.um.dk/en/danida-en/>

37 ESP3, "Program Dukungan Lingkungan," ESP3, 2019, diakses 25 Februari 2019, <http://www.esp3.org/index.php/id/>

|                | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | %      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| Russia         |      |      |      | 41   | 165  | 191  | 59   | 21   | 351  | 54   |      | 880   | 18.9%  |
| South Korea    | 2    |      | 176  | 5    | 90   |      | 120  | 18   | 182  | 121  | 3    | 715   | 15.3%  |
| United States  | 4    | 11   | 17   | 14   |      |      | 0    | 35   | 85   | 150  | 364  | 681   | 14.6%  |
| Netherlands    |      |      | 297  | 149  | 149  |      |      |      |      | 3    |      | 597   | 12.8%  |
| United Kingdom |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 541  | 24   | 565   | 12.1%  |
| France         | 13   | 30   | 46   | 21   | 16   | 33   | 29   | 21   | 10   | 16   | 33   | 267   | 5.7%   |
| China          |      | 10   | 3    | 3    |      | 2    | 8    | 69   | 78   | 39   | 33   | 244   | 5.2%   |
| Spain          | 10   | 10   | 10   |      |      |      |      | 24   | 47   | 35   | 24   | 161   | 3.5%   |
| Germany (P)    | 6    |      |      |      | 1    |      | 7    | 1    | 11   | 77   | 27   | 130   | 2.8%   |
| Switzerland    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 30   | 90   | 120   | 2.6%   |
| Brazil         |      |      |      |      |      |      |      | 18   |      | 37   | 37   | 92    | 2.0%   |
| Australia      |      |      |      |      |      |      |      |      | 18   | 19   | 37   | 75    | 1.6%   |
| Canada         | 1    |      | 1    | 2    |      |      | 1    | 11   | 6    | 6    | 6    | 34    | 0.7%   |
| Italy          |      |      | 16   | 4    | 4    |      |      |      |      | 8    |      | 32    | 0.7%   |
| Brunei         |      |      |      |      |      |      | 24   |      |      |      |      | 24    | 0.5%   |
| Poland         |      |      | 8    |      | 9    |      |      |      |      |      |      | 17    | 0.4%   |
| Belgium        |      |      |      |      |      |      |      |      | 13   |      |      | 13    | 0.3%   |
| Denmark        |      |      | 3    |      | 2    |      | 2    |      |      |      | 5    | 11    | 0.2%   |
| Czech Republic |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      | 1     | 0.0%   |
| Israel         |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      | 1     | 0.0%   |
| Total          | 36   | 61   | 577  | 239  | 436  | 225  | 250  | 218  | 802  | 1136 | 683  | 4661  | 100.0% |

Source: SIPRI Arms Transfer Database.

Gambar 1. Data Impor Perdagangan Senjata Indonesia (2005 - 2015)

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, investasi bisnis, energi, keamanan pangan, inovasi budaya dan teknologi yang menunjukkan bahwa kerja sama ini menuntut atas adanya produk baru dan solusi yang sangat luas.<sup>38</sup> Perusahaan dan pemerintah Denmark dengan keahlian dan teknologi yang baik menghadapi beberapa tantangan dan tuntutan yang ada di Indonesia, khususnya sektor-sektor berikut:<sup>39</sup> teknologi bersih pada lingkungan, limbah, air, pertumbuhan hijau, energi terbarukan, dan efisiensi energi; industri dan teknologi pangan; desain dan gaya hidup; ilmu kesehatan dan kehidupan; kemaritiman; dan industri pertahanan.

Pada tahun periode tahun 2005 hingga 2015, Indonesia memiliki hubungan kerja sama pertahanan dan keamanan dalam

jual beli senjata dari Denmark.<sup>40</sup> Gambar 1 menunjukkan data impor perdagangan senjata yang dilakukan Indonesia, dihimpun oleh SIPRI Arms Transfer Database dalam Adi dan Achwan, yang dilakukan Indonesia tahun 2005-2015 dinyatakan dalam juta dollar Amerika dengan harga konstan (1990).<sup>41</sup>

DANIDA ini sendiri menjadi salah satu sumber *soft-power* seperti yang dikemukakan oleh Nye. Implementasi nilai-nilai politik yang dimiliki oleh Denmark tercermin melalui kebijakan luar negeri negara tersebut. Kerja sama lingkungan yang dilakukan antara Denmark dan Indonesia maupun dengan negara-negara berkembang lainnya tentunya akan memengaruhi status dan popularitas Denmark di bidang lingkungan dalam ranah internasional. Selain itu kepentingan dan tujuan yang diinginkan oleh Denmark, maupun negara-negara yang diajak bekerjasama,

38 Denmark in Indonesia, "About Business in Indonesia," Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 23 Januari 2018, diakses 15 April 2019, <http://indonesien.um.dk/en/the-trade-council/market-and-business-culture-in-indonesia/>

39 Denmark in Indonesia, "About Business in Indonesia."

40 Isbandi Rukminto Adi & Rochman Achwan, *Competition And Cooperation In Social And Political Sciences*. (Chennai: Taylor & Francis Group, 2018).

41 Adi dan Achwan, *Competition And Cooperation*.

akan lebih mudah tercapai melalui program kerja ini. Kebijakan luar negeri ini membuat kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Denmark menjadi legal. Secara langsung ataupun tidak langsung, negara yang berpartisipasi dalam program kerja ini akan mendapatkan pengaruh dari Denmark, baik pengaruh budaya, teknologi, ataupun yang lainnya. Misalnya dalam pengaruh teknologi, Indonesia secara tidak langsung akan mendapatkan transfer teknologi bersih yang dilakukan melalui investasi seperti PLTB yang dilakukan di Jeneponto.

### Hubungan Bilateral Indonesia-Denmark

Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan kawasan hutan yang terbesar di dunia, namun deforestasi sebagai bentuk alih fungsi lahan juga yang tertinggi di dunia, yakni Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia. Terlebih, tingkat penduduk Indonesia juga terbesar di dunia dengan penggunaan kendaraan juga. Secara tidak langsung dengan tingginya laju deforestasi, Indonesia menjadi negara kelima yang menyumbang gas rumah kaca (GRK). Selama periode 1970-an, laju deforestasi di Indonesia mencapai 300 ribu hektare/tahun,<sup>42</sup> kemudian pada periode 1990-an meningkat menjadi 1 juta hektare/tahun.<sup>43</sup> Berdasarkan data statistik Kementerian Kehutanan tahun 2011, pada periode 2000-2010 laju deforestasi yang terjadi di Indonesia mencapai 1,2 juta hektare/tahun.<sup>44</sup> Kemudian, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), deforestasi netto nasional selama periode Juli 2016-Juni 2017 adalah 479 ribu hektare.<sup>45</sup>

42 Forest Watch Indonesia, "Deforestasi Tanpa Henti: Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara," *FWI*, 2018, diakses 2 April 2019, [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi\\_tanpa\\_henti\\_2013-2016\\_lowress.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf)

43 Forest Watch Indonesia, "Deforestasi Tanpa Henti."

44 WWF, "Kehutanan," WWF, 31 Mei 2014, diakses 2 April 2019, [https://www.wwf.or.id/program/reduksi\\_dampak\\_lingkungan/kehutanan/](https://www.wwf.or.id/program/reduksi_dampak_lingkungan/kehutanan/)

45 KLKH, "Angka Deforestasi Tahun 2016-2017 Menurun," *KLKH*, 29 Januari 2018, diakses 2

Melihat keadaan yang terjadi, pemerintah Indonesia kemudian membuat keputusan untuk berkomitmen mengurangi efek rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Pada tahun 2011, mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono melalui pidatonya di Shangri-La Hotel Jakarta, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki prioritas untuk membangun dan mengurangi kemiskinan dengan tidak mengesampingkan masalah mengenai hutan. Hal ini disebabkan karena hutan tidak dapat terlepas dari mata pencaharian, ketahanan pangan, ketersediaan kayu dan bahan bakar. Percepatan ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan mengintensifkan upaya untuk mengurangi emisi gas, penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan eksploitasi kehutanan.<sup>46</sup> Indonesia harus menyeimbangkan tujuan lingkungan dan sosial dengan ekonomi yang berkembang berdasarkan sumber daya alam dan kepentingan perusahaan.<sup>47</sup> Saat ini, Jokowi telah mengagendakan sembilan kebijakan dalam program Nawacita yang salah satu dari agenda tersebut merupakan kedaulatan energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Keadaan tersebut secara tidak langsung memiliki kesamaan pandangan dengan Rasmussen, Denmark mempunyai kemungkinan untuk mengadakan kerja sama dalam bidang ekonomi-lingkungan. Sebelumnya, Denmark telah menandatangani nota kesepahaman mengenai bidang maritim, budaya, energi, dan transportasi pada 22 Oktober 2015. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh

April 2019, [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1025](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1025)

46 Cifor, "Speech by President Susilo Bambang Yudhoyono: Forests Indonesia Conference: Alternative Futures to Meet Demands for Food, Fibre, Fuel and Redd+," *Cifor*, 27 September 2011, diakses 31 Maret 2019, [http://www.cifor.org/fileadmin/fileupload/media-release/27\\_Sep\\_SBY\\_Speech.pdf](http://www.cifor.org/fileadmin/fileupload/media-release/27_Sep_SBY_Speech.pdf)

47 World Resources Institute, "Forests and Landscapes in Indonesia," *World Resources Institute*, 9 Oktober 2013, diakses 27 Desember 2017, <https://www.wri.org/our-work/project/forests-and-landscapes-indonesia>

Menteri Energi, Bangunan dan Iklim, Lars Christian Lilleholt, dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said. Kesepakatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kunjungan diplomatik pertama sejak 1950 yang dilakukan oleh Ratu Margrethe II dengan Pangeran Consort Henrik pada 21-24 Oktober 2015.<sup>48</sup>

Kunjungan diplomatik kedua dilakukan kembali oleh Rasmussen sebagai Perdana Menteri Denmark di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa, 28 November 2017. Hal ini dapat dianalisis bahwa kunjungan sebelumnya belum mencapai salah satu kepentingan nasional dari pemerintah Denmark sehingga membutuhkan pembicaraan lebih lanjut melalui kunjungan diplomatik selanjutnya. Bahkan kunjungan tersebut dilakukan oleh kepala pemerintahan. Pertemuan ini dinamakan *summit diplomacy* yakni pertemuan yang dilakukan oleh pemimpin negara yang berkumpul di suatu tempat untuk membahas suatu permasalahan yang kemudian kedua negara saling berkomitmen untuk mengusahakan tercapainya sebuah tujuan bersama yang menguntungkan semua pihak. Pertemuan tersebut merupakan sebuah bentuk dari *soft-power diplomacy* karena Rasmussen bertemu dengan cara yang damai dan tidak menunjukkan kekuatan militernya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kunjungan kedua Denmark ke Indonesia menghasilkan penandatanganan kesepakatan bilateral untuk 2017-2020 sebagai tindak lanjut dari *Innovative Partnership Agreement* yang ditandatangani ketika Ratu Margrethe II berkunjung. Kesepakatan tersebut berisi mengenai peningkatan kerja sama maritim, seperti memerangi penangkapan ikan ilegal, meningkatkan kerja sama lingkungan yang

melibatkan proyek pelestarian hutan di Jambi, dan konservasi energi terbarukan jangka panjang. Selain itu, Indonesia sepakat untuk mengubah limbah menjadi energi seperti Denmark di beberapa kota, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Solo. Kemudian pada tanggal 29 November 2017, Indonesia melalui PLN menandatangani nota kesepahaman untuk pengelolaan energi masa depan di Indonesia. Denmark menginginkan Indonesia untuk mencapai target mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 melalui pengurangan konsumsi batu bara dalam negeri.<sup>49</sup> Selain itu, Denmark juga sepakat untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Indonesia untuk menciptakan energi baru dengan tarif listrik yang lebih murah serta mendapatkan keuntungan melalui penanaman investasi tersebut. Hal ini tentunya mendukung proyek Joko Widodo mengenai 35.000 MW.

Pada bulan Mei 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dan menteri Kerja sama Pembangunan Denmark, Ulla Tornaes, meluncurkan Peta Potensi Energi Angin Indonesia untuk menentukan wilayah yang berpotensi menjadi wilayah PLTB.<sup>50</sup> Selain meluncurkan peta potensi energi, pemerintah Indonesia dan Denmark juga meluncurkan buku "*Integration of Wind Energy in Power System*" yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk membuat kebijakan dan pelaksana dalam mengintegrasikan energi listrik yang

48 Kementerian Luar Negeri Indonesia, "Sekilas Info tentang Denmark," *Kementerian Luar Negeri Indonesia*, 2017, diakses 27 Desember 2017, <https://www.kemlu.go.id/copenhagen/id/Pages/Denmark.aspx>

49 Danish Energy Agency, "Denmark signs MoU with Indonesian Energy Company," *My News Desk*, 29 November 2017, diakses 16 Desember 2017, <http://www.mynewsdesk.com/danish-energy-agency/news/denmark-signs-mou-with-indonesian-energy-company-281737>

50 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Kaleidoskop 2017: Langkah Nyata Sektor ESDM dalam Mewujudkan Energi Berkeadilan (Bagian 2/4)," *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 2 Januari 2018, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kaleidoskop-2017-langkah-nyata-sektor-esdm-dalam-mewujudkan-energi-berkeadilan-bagian-2-4>

di produksi PLTB ke dalam sistem jaringan listrik PT. PLN dengan berdasar dengan yang telah diterapkan oleh pemerintah Denmark.<sup>51</sup> Selanjutnya sebagai tindak lanjut kunjungan Perdana Menteri Denmark, pemerintah Indonesia mengadakan *Clean Technology Roundtable Discussion* di Hotel Raffles, Jakarta.<sup>52</sup> Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap target bauran energi dari EBT sebesar 23% di tahun 2025.<sup>53</sup>

Denmark memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang diajak bekerja sama dalam bidang lingkungan hidup karena Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pernyataan ini dikeluarkan menurut penelitian oleh Universitas Georgia di Amerika Serikat. Sampah tersebut kebanyakan berupa sampah plastik yang susah terurai secara alami yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.<sup>54</sup> Pemanasan global tersebut akan menyebabkan es di Kutub Utara akan cepat mencair dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut di negara-negara sekitar Kutub Utara, salah satunya adalah Denmark. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman kedaulatan Denmark. Sehingga, Denmark secara tidak langsung menekan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.

Selain menginginkan pelestarian lingkungan, dengan Indonesia ikut berpartisipasi dalam perjanjian tersebut, investasi Denmark di Indonesia dalam hal jual-beli listrik seperti *green realism* yang diinginkan oleh Rasmussen akan mudah tercapai.

Salah satu bentuk realisasi dari perjanjian yang terjalin adalah pembangunan *Wind Farm Jeneponto I* dirancang untuk memiliki kapasitas 72 MW yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2019.<sup>55</sup> Pada tanggal 19 September 2017, perwakilan terkemuka dari Equis dan PT. PLN menandatangani *Power Purchase Agreement (PPA)* di Kopenhagen di hadapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan Lars Christian Lilleholt serta CEO Vestas Anders Runevard PPA untuk *Tolo Wind Farm* adalah yang pertama untuk Equis di Indonesia dan PPA pertama untuk PT. PLN di bidang angin.<sup>56</sup> Vestas Anders Runevard merupakan produsen turbin angin yang berbasis di Aarhus, Denmark. Vestas telah melakukan desain, pembuatan, pemasangan, dan servis turbin angin di seluruh dunia dengan kapasitas tenaga angin lebih dari 76 GW di 75 negara dengan 63 GW turbin angin yang sedang beroperasi.<sup>57</sup> Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kualitas angin di Jeneponto merupakan salah satu yang terbaik di dunia.<sup>58</sup> Dengan demikian Denmark dengan kemajuan teknologinya akan lebih mudah mengeksplorasi angin-angin yang ada di Indonesia untuk mendapatkan

51 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Indonesia - Denmark Luncurkan Peta Potensi Angin," *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 3 Mei 2017, diakses 26 Februari 2019, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/indonesia-denmark-luncurkan-peta-potensi-angin>

52 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Kaleidoskop 2017: Langkah Nyata Sektor ESDM dalam Mewujudkan Energi Berkeadilan (Bagian 2/4)," *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 2 Januari 2018, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kaleidoskop-2017-langkah-nyata-sektor-esdm-dalam-mewujudkan-energi-berkeadilan-bagian-2-4>

53 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Kaleidoskop 2017."

54 BBC Indonesia, "Lautan Indonesia, penyumbang sampah terbesar kedua di dunia," *BBC Indonesia*, 12 Januari 2016, diakses 17 Desember 2017, [http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2016/01/160111\\_sampah\\_jakarta](http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2016/01/160111_sampah_jakarta)

55 Andi Hajramurni, "Completion of Jeneponto Wind Farm accelerated to July", 5 April 2018, diakses 24 Februari 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/05/completion-of-jeneponto-wind-farm-accelerated-to-july.html>

56 Redaya Energy, "Equis and PT. PLN (Persero) Sign 60 MW Wind PPA". *Venaenergy*, 19 September 2016, diakses 25 Februari 2019, <https://www.venaenergy.com/content/4-newsroom/20160919-equis-and-pt-pln-persero-sign-60mw-wind-ppa/equis-and-pt-pln-persero-sign-60mw-wind-ppa.pdf>

57 Redaya Energy, "Equis and PT. PLN (Persero)."

58 LIPI, "LIPI Sebut Angin Jeneponto Terbaik di Dunia," *LIPI*, 30 September 2016, diakses 30 Desember 2017, <http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-sebut-angin-jeneponto-terbaik-di-dunia/16471>

keuntungan dan membangun kesejahteraan rakyat Denmark maupun Indonesia ke arah yang lebih maju. Selain itu, hal ini juga akan berdampak dengan pengurangan penggunaan energi fosil untuk listrik di Indonesia.

Selain bekerjasama dalam bidang PLTB, pemerintah Denmark melalui DANIDA kembali mempertegas dan memperkuat komitmennya dengan mencanangkan bantuan ESP3 (*The Enviromental Support Programme*) Fase 3. Program ESP3 ini adalah kerja sama yang melibatkan pemerintahan Denmark dengan badan-badan pemerintahan Indonesia seperti Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Terbarukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya bantuan ESP3 ini pemerintah Denmark berusaha memfasilitasi perubahan kegiatan perekonomian Indonesia yang masih belum berorientasi pada lingkungan menjadi kegiatan perekonomian yang *Green* dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan sekitar.<sup>59</sup> Pada akhirnya dengan menaruh perhatian lebih pada aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan diharapkan bahwa permasalahan pemanasan global yang bersumber dari Indonesia dapat dicegah dan diperlambat sehingga ancaman naiknya permukaan laut yang dapat mengancam kedaulatan wilayah Denmark dapat dicegah dan diperlambat. Selama program ESP3 berjalan, pemerintah Denmark akan memberikan total dana bantuan sebesar DKK 270 Juta atau setara dengan Rp 600 Miliar.

Bentuk penjawantahan dari kerja sama lingkungan ini diwujudkan dalam peningkatan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan yaitu seperti pengolahan limbah, energi terbarukan, efisiensi energi dan sumber daya alam. Program ESP3 ini difokuskan di Jawa Tengah terlebih dahulu sebagai proyek percontohan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa proyek

yang dilaksanakan di luar Jawa Tengah. Ketika program-program yang ada dicanangkan di Jawa Tengah menuai hasil yang bagus maka, proyek-proyek tersebut akan diangkat menjadi proyek nasional. Tujuan akhir dari ESP3 ini adalah menciptakan sebuah kondisi dimana perekonomian Indonesia berorientasi pada aspek keberlanjutan dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin lama semakin memburuk.

Selama program ESP3 ini berjalan, terdapat beberapa proyek yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah Indonesia. Beberapa diantaranya adalah pengolahan sampah menjadi *Refused Derived Fuel* di Cilacap; pembangunan panel surya di Karimunjawa; dan, pembersihan pantai di Bali.

#### *Pengolahan Sampah menjadi Refused Derived Fuel di Cilacap*

*Refuse Derived Fuel* (RFS) adalah sebuah produk bahan bakar yang dihasilkan dari limbah domestik dan bisnis.<sup>60</sup> Namun limbah yang paling sering digunakan untuk memproduksi RFS adalah limbah plastik. Jika terdapat limbah-limbah yang tidak bisa terbakar seperti kaca dan baja maka limbah tersebut akan dipisahkan. Untuk mengurangi limbah plastik di Cilacap, maka PT. Holcim Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Denmark melalui program ESP3 nya. Fasilitas pengolahan sampah menjadi *Refused Derived Fuel* ini akan dibangun di TPA Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan lahan sebesar 1 milik Pemerintah Kabupaten Cilacap.<sup>61</sup> Menurut

60 Clarity, "What is RDF &SRF?," Clarity, 2019, diakses 25 Februari 2019, <https://www.clarity.eu.com/home/waste-to-fuel-solutions/what-is-rdf-srf.php>

61 Arimbi Ramadhani, "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pertama di Indonesia," *Kompas*, 27 Juli 2017, diakses 23 Februari 2019, <https://properti.kompas.com/read/2017/07/27/073026221/cilacap-bangun-tempat-pengolahan-sampah-terpadu-pertama-di-indonesia>

59 ESP3, "Program Dukungan Lingkungan," ESP3, 2019, diakses 25 Februari 2019, <http://www.esp3.org/index.php/id/>

Bupati Kabupaten Cilacap Tatto Suwanto, fasilitas pengolahan ini membutuhkan biaya Rp 40 Miliar setiap lima tahun beserta biaya-biaya lain.<sup>62</sup> Pemerintah Kabupaten Cilacap membuka kerja sama dengan pihak-pihak luar seperti masyarakat, swasta, dan luar. Karena proyek ini berorientasi pada keberlanjutan dan pemeliharaan lingkungan maka Pemerintah Denmark sesuai dengan poin kedua DANIDA yaitu menjaga lingkungan maka Pemerintah Denmark ikut turut serta dalam proyek RFS di Cilacap. Pemerintah Denmark sendiri melalui DANIDA telah menyatakan ketertarikan untuk membantu investasi di fasilitas tersebut sebesar 50%.<sup>63</sup> Denmark juga berkontribusi membiayai pengadaan peralatan mekanikal dan elektrikal.<sup>64</sup> Tujuan dari didirikannya fasilitas RFS ini adalah pabrik Holcim yang ada di Cilacap dapat menggunakan RFS sebagai bahan bakar alternatif menggantikan batu bara.<sup>65</sup>

Jika dilihat dari tingkat ketertarikan pemerintah Denmark dalam pengadaan proyek fasilitas RFS ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Denmark sangat serius pada komitmennya untuk memperbaiki cara manajemen pengelolaan lingkungan di Indonesia. Selain membantu dan mendukung Indonesia dalam merubah kegiatan perekonomiannya menjadi lebih berorientasi pada aspek-aspek lingkungan, Denmark juga memiliki kepentingan utama untuk memperlambat pemanasan global. Dengan didirikannya fasilitas RFS ini diharapkan

bahwa kegiatan pabrik-pabrik yang masih menggunakan bahan bakar tradisional seperti batu bara bisa dialihkan sehingga polusi yang dihasilkan pabrik tersebut dapat berkurang dan laju pemanasan global dapat diperlambat.

#### *Pembangunan Panel Surya di Karimunjawa*

Selain membangun PLTB, Denmark juga melakukan pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kepulauan Karimunjawa. Pembangunan PLTS ini mencakup pulau Nyamuk, pulau Genting, dan pulau Parang.<sup>66</sup> Pemerintah Denmark melalui program ESP3 nya mendanai pengadaan panel surya sebesar Rp 14 miliar.<sup>67</sup> Dengan adanya dana yang cukup besar tersebut maka pemerintah Indonesia dan Denmark dapat mewujudkan proyek PLTS dengan total kapasitas energi sebesar 283 kWp. PLTS di pulau Parang akan dibangun dengan kapasitas 136 kWp, pulau Nyamuk sebesar 111 kWp, sedangkan pulau Genting akan dibangun PLTS berkapasitas 36 kWp.<sup>68</sup>

Berkat dibangunnya PLTS di ketiga pulau tersebut, persediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan penduduk dapat tercapai. Sebelum adanya proyek PLTS kerja sama pemerintah Denmark dan Indonesia, persediaan listrik di ketiga pulau menggunakan mesin diesel dan hanya berlangsung selama 6 jam saja. Bahkan persediaan listrik di ketiga pulau dapat menunjang aktivitas masyarakat selama 24 jam sehari. Tentu pengadaan PLTS ini saling menguntungkan pihak Indonesia dan

62 Ramadhani, "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah."

63 Royal Danish Embassy, "Cilacap Regency Refuse Derived Fuel Project Financial Model Review," ESP3, 2015, diakses 25 Februari 2019, [http://esp3.org/images/Library/PapersReports/14321-8\\_RDF\\_Project\\_FM\\_Review\\_Final\\_Report\\_2015-11-11.pdf](http://esp3.org/images/Library/PapersReports/14321-8_RDF_Project_FM_Review_Final_Report_2015-11-11.pdf)

64 Arimbi Ramadhani, "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pertama di Indonesia," *Kompas*, 27 Juli 2017, diakses 23 Februari 2019, <https://properti.kompas.com/read/2017/07/27/073026221/cilacap-bangun-tempat-pengolahan-sampah-terpadu-pertama-di-indonesia>

65 Ramadhani, "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah."

66 Putri Aini Yasmin, "Denmark Bangun 'Kebun Matahari' Terangi Pulau Genting Karimunjawa," *Detik Finance*, 7 Agustus 2018, diakses 23 Februari 2019, <https://finance.detik.com/energi/d-4154577/denmark-bangun-kebun-matahari-terangi-pulau-genting-karimunjawa>

67 David Oliver Purba, "Pembangunan PLTS Karimunjawa Diresmikan, Apa Dampaknya Bagi Rakyat?," *Kompas*, 24 Oktober 2017, diakses 23 Februari 2019, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/07040001/pembangunan-plts-karimunjawa-diresmikan-apa-dampaknya-bagi-rakyat->

68 Purba, "Pembangunan PLTS Karimunjawa Diresmikan."

Denmark. Pasalnya pembangunan PLTS ini sesuai dengan keinginan presiden Joko Widodo yang ingin melepas ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga fosil<sup>69</sup> yang notabene merupakan salah satu penyumbang dari pemanasan global. Penggunaan PLTS yang ramah lingkungan ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca lebih dari 3.200 ton Co2 per tahun.<sup>70</sup> Sedangkan di pihak Denmark, pembangunan pembangkit listrik yang terbaru ini sesuai dengan kepentingan awal mereka yaitu untuk menjaga kualitas lingkungan khususnya di Indonesia agar tetap bersih dan berkelanjutan sehingga tingkat pemanasan global tidak berdampak secara signifikan pada Negara Denmark.

#### *Pembersihan Pantai di Bali*

Selain ketiga proyek yang sedang berjalan tersebut, Denmark dan Indonesia juga menyelenggarakan berbagai acara terkait dengan isu lingkungan hidup. Salah satunya adalah diselenggarakannya rangkaian pra-acara menjelang *Our Ocean Conference* (OOC) 2018 pada tanggal 28 Oktober 2018. Pra-acara ini berupa Pembersihan Pantai (*Beach Clean-up*) di Pantai Kuta, Bali yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Denmark bekerjasama dengan Pusat Studi Asia Tenggara, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.<sup>71</sup> Acara ini merupakan salah satu bentuk kampanye melawan polusi plastik di laut. Kegiatan yang ada dalam acara ini berupa

69 Sandro Gatra, "Presiden Jokowi Tak Ingin Listrik Tergantung Pada Energi Fosil," *Kompas*, 25 Februari 2019, diakses 25 Februari 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/14043791/presiden-jokowi-tak-ingin-listrik-tergantung-pada-energi-fosil>

70 David Oliver Purba, "Pembangunan PLTS Karimunjawa Diresmikan, Apa Dampaknya Bagi Rakyat?," *Kompas*, 24 Oktober 2017, diakses 23 Februari 2019, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/07040001/pembangunan-plts-karimunjawa-diresmikan-apa-dampaknya-bagi-rakyat>

71 ESP3, "OOC 2018: Beach Clean Up," ESP3, 2018, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esp3.org/index.php/en/news-and-events/341-ooc-2018-beach-clean-up>

pembersihan Pantai Kuta dari polusi pantai, seperti rumput laut, gelas, jarum, plastik dan lain-lain. Sebelum melakukan pembersihan pantai, kegiatan diawali dengan melakukan pelepasan sekitar seribu tukik yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti beserta duta besar dari negara-negara sahabat.<sup>72</sup> Rangkaian pra-acara yang kemudian dilanjutkan dengan *workshop* dengan tema "*Plastic Waste Recycling and Circular Economy*" pada 29 Oktober 2018.<sup>73</sup> Pra-acara ini dapat dikatakan sebagai sebuah dukungan Denmark kepada Indonesia untuk mengelola limbah sampah. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan kepentingan nasional Denmark dari ancaman pemanasan global yang telah menyebabkan permukaan air laut Denmark mengalami kenaikan sehingga menyebabkan munculnya ancaman banjir yang lebih sering di masa yang akan datang.

#### **Kesimpulan**

Denmark dan Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama sejak 1950 dengan bidang kerja sama yang beragam seperti bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Namun, kunjungan diplomatik pertama baru dilakukan pada tahun 2015 melalui kedatangan Ratu Margrethe II bersama dengan Pangeran Consort Henrik. Pemerintah Denmark beranggapan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan potensi sumber daya yang besar. Pertemuan tersebut menghasilkan nota kesepahaman antar kedua negara untuk bekerja sama dalam bidang maritim, budaya, energi, dan transportasi pada 22 Oktober 2015 yang ditandatangani

72 Retno M, "Menlu RI : Laut Bukan Tong Sampah", RRI, 28 Oktober 2018, diakses 26 Februari 2019, [http://rri.co.id/post/berita/590454/nasional/menlu\\_ri\\_laut-bukan\\_tong\\_sampah\\_besar.html#](http://rri.co.id/post/berita/590454/nasional/menlu_ri_laut-bukan_tong_sampah_besar.html#)

73 ESP3, "OOC 2018: Beach Clean Up," ESP3, 2018, diakses 25 Februari 2019, <https://www.esp3.org/index.php/en/news-and-events/341-ooc-2018-beach-clean-up>

Lars Christian Lilleholt, dengan Menteri Energi dan Sudirman Said. Terdapat tindak lanjut dari penandatanganan ini, yakni pembentukan kerangka kerja sama *Strategic Sector Cooperation* (SSC) yang berlangsung pada Januari 2016. Kemudian pada bulan November 2017, Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, datang berkunjung ke Indonesia dengan membawakan piringan hitam Metallica. Banyaknya tindak lanjut dari kunjungan yang dilakukan menunjukkan bahwa Denmark memiliki tekad kuat untuk dapat bekerjasama dengan Indonesia.

Negara akan mengusahakan kepentingan negaranya melalui berbagai cara agar tercapai. Saat ini, pendekatan suatu negara terhadap negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya tidak menggunakan cara kekerasan ataupun perang, melainkan dekat pendekatan yang lebih 'halus' atau melalui *soft-power diplomacy*. Pemberian hadiah tersebut merupakan sebuah sarana untuk melancarkan diplomasi Denmark agar kepentingan nasionalnya terpenuhi. Rasmussen merupakan perdana menteri yang sangat memerhatikan lingkungan dengan landasan green realism menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi dengan tetap memerhatikan lingkungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan selama beberapa dekade terakhir Denmark dihadapkan pada masalah pemanasan global. Melalui kunjungan kedua tersebut, antara Indonesia dengan Denmark telah menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama peningkatan kerja sama maritim, seperti memerangi penangkapan ikan ilegal, meningkatkan kerja sama lingkungan yang melibatkan proyek pelestarian hutan di Jambi, dan konservasi energi terbarukan jangka panjang melalui pembangkit listrik tenaga angin. Selain bekerjasama dalam sektor PLTB, Denmark dan Indonesia juga sepakat untuk bekerjasama di bidang PLTS serta pengolahan sampah.

Hal yang didapatkan oleh Indonesia dari kerja sama bilateral yang terjalin dengan Denmark adalah Indonesia mendapatkan transfer ilmu dan teknologi dari investasi yang ditanamkan dari investor asal Denmark. Jumlah energi fosil yang ada di dunia dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hasil energi fosil yang sama. Hal ini kemudian memerlukan adanya energi baru yang lebih ramah lingkungan dan mudah untuk diperbarui. Kemajuan Denmark dalam teknologi ramah lingkungan diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia beserta masyarakatnya untuk lebih termotivasi melakukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi ramah lingkungan, mengingat Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor lingkungan hidup, seperti lautan, hutan, dan sumber daya alam lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto., dan Rochman Achwan. *Competition And Cooperation In Social And Political Sciences*. Chennai: Taylor & Francis Group, 2018.
- Arash Heydarian Pashakhanlou, "Comparing and Contrasting Classical Realism and Neorealism: A Re-examination of Hans Morgenthau's and Kenneth Waltz's Theories of International Relations". E-international relations student online article, 23 Juli 2009. Diakses 3 Mei 2019. <https://www.e-ir.info/2009/07/23/comparing-and-contrasting-classical-realism-and-neo-realism/>
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017." *Badan Pusat Statistik*, 2017. Diakses 2 April 2019. <https://unstats.un.org/unsd/environment/Compendia/Statistik%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%202017.pdf>

- Barry Buzan, *A New Framework for Analysis*, (London: Lynne Rienner Publishers Inc, 1998)
- BBC Indonesia. "Ini sangat keren': Jokowi menerima piringan hitam Metallica 'Master Of Puppets'". *BBC Indonesia*, 30 November 2017. Diakses 7 Desember 2017. <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial42167699>
- BBCIndonesia. "LautanIndonesia, penyumbang sampah terbesar kedua di dunia". *BBC Indonesia*, 12 Januari 2016. Diakses 27 Desember 2017. [http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2016/01/160111\\_sampah\\_jakarta](http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2016/01/160111_sampah_jakarta)
- Clarity, "What is RDF &SRF?." *Clarity*, 2019. Diakses 25 Februari 2019. <https://www.clarity.eu.com/home/waste-to-fuel-solutions/what-is-rdf-srf.php>
- Climate Change. Denmark. *Climate Change Post*, 23 Oktober 2016. Diakses 26 Desember 2017. <https://www.climatechangepost.com/denmark/climate-change/>
- Danish Energy Agency. "Denmark signs MoU with Indonesian Energy Company." *My News Desk*, 29 November 2017. Diakses 16 Desember, 2017. <http://www.mynewsdesk.com/danish-energy-agency/news/denmark-signs-mou-with-indonesian-energy-company-281737>
- Danish Energy Agency. "The Danish Energy Model: Innovative, Efficient and Sustainable." *Danish Energy Agency*, 2014. Diakses 24 Februari, 2019. [https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/the\\_danish\\_energy\\_model.pdf](https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/the_danish_energy_model.pdf)
- Denmark in Indonesia. "About Business in Indonesia", *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 23 Januari 2018. Diakses 15 April 2019, <http://indonesien.um.dk/en/the-trade-council/market-and-business-culture-in-indonesia/>
- Dyrhaug, Helene. "Green realism – An assessment of the Danish government's climate & energy policy." *UACES*, 16 November 2015. Diakses 27 Desember, 2017. <http://eutrack.ideason europe.eu/2015/11/16/green-realism-assessment-danish-governments-climate-energy-policy/>
- ESP3. "OOC 2018: Beach Clean Up." *ESP3*, 29 Oktober 2018. Diakses Februari 25, 2019. <https://www.esp3.org/index.php/en/news-and-events/341-ooc-2018-beach-clean-up>
- ESP3. "Program Dukungan Lingkungan. 2019." *ESP3*, 2019. Diakses 25 Februari 2019. <http://www.esp3.org/index.php/id/>
- Gatra, Sandro. "Presiden Jokowi Tak Ingin Listrik Tergantung Pada Energi Fosil." *Kompas*, 25 Februari 2019. Diakses 25 Februari 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/14043791/presiden-jokowi-tak-ingin-listrik-tergantung-pada-energi-fosil>
- Goodsite, E. Michael, et al. "WHITE PAPER: Climate Change Adaptation in the Nordic Countries". *Stockholm Environment Institute*, 9 Maret 2013. Diakses 26 Desember 2017. <https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/N-CMAEP-2013-White-Paper-Nordic-Countries-Adaptation.pdf>
- Jackson, Robert., dan Georg Sørensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hajramurni, Andi. "Completion of Jeneponto Wind Farm accelerated to July". *The Jakarta Post*, 5 April 2018. Diakses 24 Februari 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/05/completion-of-jeneponto-wind-farm-accelerated-to-july.html>
- Hans J. Morgenthau & Kenneth W. Thompson, *Politik Antarbangsa*, Penerjemah: A.M Fatwan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990).

- Kami, Indah Mutiara. "Ungkapan Syukur Jokowi Setelah Tebus Vinyl Metallica Rp 11 Juta." *Detik News*, 21 Februari 2018. Diakses 23 Februari 2019. <https://news.detik.com/berita/d-3877522/ungkapan-syukur-jokowi-setelah-tebus-vinyl-metallica-rp-11-juta>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Indonesia - Denmark Luncurkan Peta Potensi Angin." *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 3 Mei 2017. Diakses 26 Februari 2019. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/indonesia-denmark-luncurkan-peta-potensi-angin>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Kaleidoskop 2017: Langkah Nyata Sektor ESDM dalam Mewujudkan Energi Berkeadilan (Bagian 2/4)." *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 2 Januari 2018. Diakses 25 Februari 2019. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kaleidoskop-2017-langkah-nyata-sektor-esdm-dalam-mewujudkan-energi-berkeadilan-bagian-2-4>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Kerja Sama Indonesia - Denmark, Jadikan Nyata, Sederhana, dan Workable." *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, 29 November 2017. Diakses 26 Februari 2019. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kaleidoskop-2017-langkah-nyata-sektor-esdm-dalam-mewujudkan-energi-berkeadilan-bagian-2-4>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. "Sekilas Info Tentang Denmark." *Kementerian Luar Negeri Indonesia*, 2017. Diakses 27 Desember 2017. <https://www.kemlu.go.id/copenhagen/id/Pages/Denmark.aspx>
- Lidegaard, Martin, Mogens Jensen, dan Rasmus Helveg Petersen. "Indonesia-Denmark partnership: How to clear a 11,000 km divide". *The Jakarta Post*, 29 November 2014. Diakses 30 Desember 2017. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/29/indonesia-denmark-partnership-how-clear-a-11000-km-divide.html>
- Lin, Li, dan Leng Hongtao. "Joseph Nye's Soft Power Theory and Its Revelation Towards Ideological and Political Education," *Humanities and Social Sciences* 5, no. 2. (Maret 2017): 69-74.
- LIPI. "LIPI Sebut Angin Jeneponto Terbaik di Dunia." *LIPI*, 30 September 2016. Diakses 30 Desember 2017. <http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-sebut-angin-jeneponto-terbaik-di-dunia/16471>
- M, Retno. "Menlu RI : Laut Bukan Tong Sampah." *RRI*, 28 Oktober 2018. Diakses 26 Februari 2019. [http://rri.co.id/post/berita/590454/nasional/menlu\\_ri\\_laut\\_bukan\\_tong\\_sampah\\_besar.html#](http://rri.co.id/post/berita/590454/nasional/menlu_ri_laut_bukan_tong_sampah_besar.html#)
- Ministry of Foreign Affairs of Denmark. "About Danida". *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 2011. Diakses 24 Februari 2019. <http://um.dk/en/danida-en/about-danida/>
- Ministry of Foreign Affairs of Denmark. "DANIDA in Indonesia." *Ministry of Foreign Affairs of Denmark*, 2017. Diakses 25 Februari 2019. <http://indonesien.um.dk/en/danida-en/>
- News Desk. "Danish PM surprises Jokowi with Metallica box set". *The Jakarta Post*, 28 November 2017. Diakses 9 Desember 2017. <http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/28/danish-pm-surprises-jokowi-with-metallica-box-set.html>
- Nye, Joseph S. "Soft Power." *Foreign Policy*, no. 80 (1990): 153-171.

- Patria, Nezar. "Indonesia, Denmark to cooperate in clean energy." *The Jakarta Post*, 24 Mei 2018. Diakses 23 Februari 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/24/indonesia-denmark-to-cooperate-in-clean-energy.html>
- Parajuli, Ranjan. "Looking into the Danish energy system: Lesson to be learned". *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16. (2012): 2191-2199.
- Purba, David Oliver. "Pembangunan PLTS Karimunjawa Diresmikan, Apa Dampaknya Bagi Rakyat?". *Kompas*, 24 Oktober 2017. Diakses 23 Februari 2019. <https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/07040001/pembangunan-plts-karimunjawa-diresmikan-apa-dampaknya-bagi-rakyat>
- Ramadhani, Arimbi. "Cilacap Bangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pertama di Indonesia." *Kompas*, 27 Juli 2017. Diakses 23 Februari 2019. <https://properti.kompas.com/read/2017/07/27/073026221/cilacap-bangun-tempat-pengolahan-sampah-terpadu-pertama-di-indonesia>
- Redaya Energi. "Equis and PT. PLN (Persero) Sign 60 MW Wind PPA." *Venaenergy*, 19 September 2016. Diakses 25 Februari 2019. <https://www.venaenergy.com/content/4-newsroom/20160919-equis-and-pt-pln-persero-sign-60mw-wind-ppa/equis-and-pt-pln-persero-sign-60mw-wind-ppa.pdf>
- Ristekdikti. "Denmark Berbicara Kerjasama Lebih Lanjut Dengan Indonesia". *Ristekdikti*, 28 April 2016. Diakses 27 Desember 2017. <https://ristekdikti.go.id/denmark-berbicara-kerjasama-lebih-lanjut-dengan-indonesia/>
- Ririhena, Yohanna. "Bright future seen for Indonesian-Danish relations." *The Jakarta Post*, 9 Oktober 2015. Diakses 31 Maret 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/09/bright-future-seen-indonesian-danish-relations.html>
- Royal Danish Embassy. "Cilacap Regency Refuse Derived Fuel Project Financial Model Review." *ESP3*, 2015. Diakses 25 Februari 2019. [http://esp3.org/images/Library/PapersReports/14321-8-RDF\\_Project\\_FM\\_Review\\_Final\\_Report\\_2015-11-11.pdf](http://esp3.org/images/Library/PapersReports/14321-8-RDF_Project_FM_Review_Final_Report_2015-11-11.pdf)
- Sheany. "Indonesia, Denmark Agree to Cooperate Waste Management Energy." *Jakarta Globe*, 28 November 2017. Diakses 7 Desember 2017. <http://jakartaglobe.id/news/indonesia-denmark-agree-to-cooperate-on-waste-management-energy/>
- Sovacool, Benjamin K. "Energy policy making in Denmark: Implications for global energy." *Energy Policy* 61, (2013): 829-839.
- Tribun Jeneponto. "Menurut Orang Jerman Ini, Kualitas Angin Jeneponto Terbaik di Dunia." *Tribun Makassar*, 26 Agustus 2016. Diakses Desember 30, 2017. <http://makassar.tribunnews.com/2016/08/26/menurut-orang-jerman-ini-kualitas-angin-jeneponto-terbaik-di-dunia>
- W, Christian. "Flooding in Denmark Becoming the Norm." *CPH Post*, 5 Januari 2017. Diakses 28 Desember 2017. <http://cphpost.dk/news/flooding-in-denmark-becoming-the-norm.html>
- World Resources Institute. *Forests and Landscapes in Indonesia*. World Resources Institute, 9 Oktober 2013. Diakses 27 Desember 2017. <https://www.wri.org/our-work/project/forests-and-landscapes-indonesia>
- Yasmin, Putri Aini. "Denmark Bangun 'Kebun Matahari' Terangi Pulau Genting Karimunjawa." *Detik Finance*, 7 Agustus 2018. Diakses 23 Februari 2019. <https://finance.detik.com/energi/d-4154577/denmark-bangun-kebum-matahari-terangi-pulau-genting-karimunjawa>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

# Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional

## *Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics*

Aji Widiatmaja\*, Ulul Albab\*\*

\*Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan,  
Universitas Pertahanan Indonesia  
email: \*ajiwidiatmaja@gmail.com, \*\*bolul87@gmail.com

---

### **Riwayat Artikel**

Diterima 11 Maret 2019  
Direvisi 20 April 2019  
Disetujui 2 Mei 2019

### **Abstract**

Indonesia's foreign policy in the Susilo Bambang Yudhoyono's (SBY) and Joko Widodo's era have their own strengths and weaknesses. SBY's foreign policy tended to be outward-looking, which was marked by promotion of soft power, high politics, and leveraging Indonesia influence in global stage. Meanwhile, Joko Widodo's foreign policy is more inward-looking in that it focuses more on domestic sectors. Problems will arise if a country carries out its foreign policy in an unbalanced manner. Development in the global and regional strategic environment requires a collective response achieved in multilateral forums. This makes cooperation and active participation of a country in international forums become important. This paper aims to analyze Indonesia's foreign policy under SBY and Joko Widodo to find out the strengths and weaknesses of both foreign policies. The author has also provided a foreign policy recommendation that combines both inward and outward-looking perspectives in its performance. They are made in the form of reclaiming Indonesia's leadership in ASEAN to make the region a zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN), preventing foreign powers infiltration, maintaining ASEAN countries sovereignty, and curbing pragmatic and unilateralist actions in response to strategic environmental dynamics. These are important to ensure the achievement of Indonesia's national interests. In simple terms, outward-looking policies are adopted as a tool to achieve national interests that benefit the Indonesian people (inward-looking).

Keywords: Foreign policy; inward looking; outward looking; Indonesia leadership; National interest.

### **Abstrak**

Kebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung *outward looking* dengan mengedepankan *soft power* dan bercorak *high politics* serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat *inward looking* yang berfokus pada penguatan sektor domestik. Permasalahan akan muncul jika suatu negara tidak berimbang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Perkembangan lingkungan strategis global dan regional membutuhkan respons kolektif yang dicapai dalam forum-forum multilateral. Hal ini membuat kerja sama dan keaktifan suatu negara dalam forum internasional menjadi penting. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, penulis juga memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri yang menggabungkan corak *inward* dan *outward looking* dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal tersebut berupa mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN guna membuat ASEAN sebagai *zone of peace, freedom, and neutrality* (ZOPFAN), mencegah masuknya kekuatan asing, menajaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut penting dilakukan guna menjamin tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Secara sederhana, kebijakan *outward looking* digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (*inward looking*).

Kata Kunci: kebijakan luar negeri; *inward looking*; *outward looking*; kepemimpinan Indonesia; kepentingan nasional.

## Pendahuluan

Asia Tenggara merupakan wilayah yang paling dinamis jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Wilayah ini mempunyai perbedaan satu dengan yang lain dalam hal ideologi, budaya, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan kemampuan pertahanan. Sebagai daerah yang pernah terkoyak di masa perang dingin, Asia Tenggara berhasil mengelola konflik-konflik yang ada dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) di tahun 1967. Rosyidin mengatakan setidaknya terdapat tiga alasan yang mendorong terbentuknya ASEAN. Yang pertama, ASEAN dimaksudkan sebagai *political détente* antara Indonesia-Malaysia yang sempat terlibat “Politik Konfrontasi” di era demokrasi terpimpin Indonesia di bawah Soekarno. Konflik tersebut sempat membuat hubungan Indonesia-Malaysia menjadi memanas. Kedua, ASEAN berfungsi sebagai benteng pelindung dari persebaran ideologi komunis meskipun akhirnya Vietnam (sebagai negara komunis) bergabung dengan ASEAN pada tahun 1995. Yang ketiga, ASEAN ditujukan untuk menciptakan wilayah Asia Tenggara yang bebas dari intervensi kekuatan asing demi menjaga kedaulatan negara.<sup>1</sup> Telah banyak pakar menilai jika Indonesia memiliki peranan yang penting dalam terbentuknya ASEAN serta menjaganya tetap eksis hingga saat ini. Bahkan, Indonesia telah dijuluki sebagai *leader* dan *big brother* bagi negara-negara ASEAN.

Hal serupa turut disampaikan oleh Mantan Menteri Pertahanan Indonesia periode 2009-2014, Prof. Purnomo Yusgiantoro. Beliau menyampaikan jika Indonesia merupakan *big brother* dan negara berpengaruh di ASEAN. Namun hal tersebut bukan berarti Indonesia

memegang kontrol penuh di ASEAN, tetapi ASEAN tetap mengedepankan konsensus dan kesepakatan bersama antar-anggota dalam mengambil keputusan.<sup>2</sup> Dengan melihat fakta tersebut, kerjasama antar-anggota ASEAN mutlak diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Meskipun telah berdiri lebih dari lima puluh tahun, ASEAN masih menghadapi ancaman keamanan yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategis. Beberapa masalah tersebut meliputi sengketa di Laut China Selatan (LCS), isu kemanusiaan Rohingya, *illegal fishing*, sengketa perbatasan, perompakan di laut, dan terorisme. Saat ini dunia sedang berada dalam tahapan multipolaritas dimana terdapat banyak pusat kekuatan yang sekaligus menambah beragamnya aktor-aktor dalam hubungan internasional. Salah satu aktor kuat dalam kancah internasional saat ini adalah kelompok teroris yang mencoba mengguncang struktur global dengan cara-cara yang berbahaya.<sup>3</sup>

Melihat perkembangan lingkungan strategis global maupun regional tersebut, hal yang paling mungkin dilakukan adalah menjalin kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral. Hal ini karena tidak ada negara yang mampu untuk menghadapi ancaman tersebut sendirian. Untuk itu, menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Buzan dan Waever menyampaikan jika persebaran ancaman terhadap keamanan lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar (*neighborhood*). Fenomena inilah yang mereka sebut sebagai *regional security complex* (RSC) sehingga menjalin hubungan kerja sama dengan negara tetangga adalah keniscayaan dan keharusan.<sup>4</sup> Dalam menjalin

1 Muhammad Rosyidin, “The Indonesian Quarterly: Reflection on ASEAN at its 50th Anniversary,” *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Third Quarter, Vol. 45 No. 3 (2017): 225.

2 Prof. Purnomo Yusgiantoro, interview dilakukan oleh Aji Widiatmaja, 3 September, 2018.

3 Mangadar Situmorang, “Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK,” *Makalah Kegiatan Networking Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara* (2014): 72

4 Barry Buzan & Ole Waever, *Regions and Powers: The structure of International Security* (USA: Cambridge University Press, 2003), 4.

kerjasama internasional maka tidak lepas dari kebijakan luar negeri suatu negara. Maka, melihat kebijakan luar negeri suatu negara, dalam hal ini Indonesia, merupakan sesuatu yang penting untuk melihat kesesuaiannya dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini. Bagi Indonesia, menjaga stabilitas dan keamanan kawasan menjadi salah satu alat untuk mencapai kepentingan nasional.

Sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerapkan kebijakan luar negeri yang proaktif. Dengan menggunakan jargon seribu kawan dan nol musuh (*thousand friends zero enemy*), Indonesia pada pemerintahan SBY aktif dalam percaturan hubungan internasional (*outward looking*). SBY mengedepankan citra positif Indonesia dengan keaktifannya pada forum-forum internasional.<sup>5</sup> Di sisi lain, Joko Widodo lebih fokus pada kebijakan dalam negeri (*inward looking*) terutama penguatan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur.<sup>6</sup> Kedua model kebijakan tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Namun tentu saja, kedua model kebijakan tersebut juga memiliki kekurangan. Penulis berpendapat jika kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara harus dilakukan secara berimbang dan terukur. Hal ini karena terdapat *linkage* antara kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang saling mempengaruhi. *Linkage* tersebut semakin menguat saat ini dengan didorong oleh derasnya arus globalisasi. Giddens berpendapat bahwa globalisasi telah mendorong terjadinya intensifikasi hubungan internasional sehingga fenomena yang terjadi di lingkup global dapat mempengaruhi kawasan regional, nasional, maupun lokal.<sup>7</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis corak kebijakan luar negeri Indonesia pada

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo dalam mengelola hubungan internasional guna menciptakan stabilitas kawasan regional. Kemudian, tulisan ini bertujuan memberikan suatu perspektif kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang dengan memperhitungkan faktor lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Penulis berpendapat bahwa kebijakan suatu negara di era *shrinking world* seperti saat ini haruslah bersifat *inward* dan *outward looking*. Secara lebih sederhana, keaktifan dalam forum-forum internasional dapat berkontribusi terhadap kepentingan nasional suatu negara.

### Perkembangan Lingkungan Strategis Global & Regional (ASEAN)

Hubungan internasional terus terjalin dan mempunyai beragam corak yang berasal dari kepentingan nasional masing - masing negara. Hubungan internasional tersebut dapat berbentuk kerjasama perdagangan, keamanan, pertahanan, ekonomi, pendidikan, hingga konflik yang semua itu didasari oleh kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan, pencapaian, ataupun preferensi kebijakan yang disebarkan melalui pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bertujuan akhir untuk keuntungan masyarakat negaranya sendiri.<sup>8</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat bermacam-macam bentuk dalam hubungan internasional untuk mencapai kepentingan nasional. Perbedaan ini bisa dilihat dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga sejarah sebuah negara. Perbedaan dalam sumber daya dan bentuk interaksi hubungan internasional inilah yang terus menggerakkan roda politik internasional. Perpolitikan internasional di era teknologi informasi saat ini tidak hanya menyangkut elit politik semata namun juga semua kalangan dan tidak

5 Ade M Wirasenjaya, "Indonesia's Foreign Policy and Multi-Track Regionalism," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 8 (2017): 176.

6 Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK", 69.

7 Anthony Giddens, *The Consequence of Modernity*, (Stanford: Stanford University Press, 1990), 64

8 Andrey Heywood, *Global Politics*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 57

terikat oleh batas-batas negara. Aktor-aktor baru dalam hubungan internasional (*non-state actor*) tersebut saat ini dapat mempengaruhi perpolitikan internasional.

Perpolitikan internasional yang terus bergerak ini juga turut berkontribusi terhadap dinamisitas lingkungan strategis global & regional (ASEAN). Lingkungan strategis global saat ini digerakan oleh dua isu besar yaitu pertahanan dan ekonomi. Negara yang saat ini mendominasi perpolitikan internasional dalam dua isu tersebut adalah Amerika Serikat dan China. Dinamisitas di wilayah ASEAN berawal dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Barrack Obama yaitu "*rebalancing to the Asia-Pacific*" yang dikeluarkan pada tahun 2009. Kebijakan ini bertujuan untuk menyaingi pengaruh China yang terus berkembang pesat di daerah Asia Pasifik. Tentu saja hal ini menimbulkan kemunculan fenomena "*balance of power*" yang mengusik *status quo* yang selama ini dipegang oleh Amerika Serikat. Dengan kebijakan tersebut, Amerika Serikat berusaha untuk mendukung isu-isu internasional yang bertentangan dengan kepentingan nasional China.<sup>9</sup> Contoh dari hal tersebut adalah dukungan kuat terhadap kemerdekaan Taiwan dari China serta kedekatan hubungan Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan guna mengamankan kepentingan nasionalnya di kawasan pasifik. Di bawah Trump, Amerika Serikat semakin frontal untuk melawan China dengan menerapkan politik "*trade war*" yang membuat struktur ekonomi global turut terpengaruh. Isu Laut China Selatan (LCS) juga turut menjadi perhatian di wilayah regional Asia Tenggara karena terdapat beberapa negara ASEAN yang terlibat secara langsung di dalamnya. Amerika Serikat dan Tiongkok yang berusaha untuk

mensukseskan kepentingan nasionalnya secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kawasan Asia Tenggara.

Perekonomian di Asia Tenggara saat ini didorong oleh perkembangan yang cepat dari China terlepas dari efek positif maupun negatif yang terjadi. Perkembangan perekonomian tentu akan diikuti oleh meningkatnya intensitas hubungan internasional yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh perpolitikan internasional yang sedang terjadi. Deputy Kepala Bidang Asia Kementerian Perdagangan China, Yang Weiqun, menyatakan jika nilai perdagangan antara ASEAN dan China selama tahun 2018 tercatat sebesar 587,87 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Selain perdagangan, angka investasi antara ASEAN-China mencapai 205,71 miliar dolar AS atau sekitar 22 kali lipat sejak tahun 2004.<sup>10</sup>

Peningkatan ekonomi China diberbagai bidang pada kenyataannya telah melewati laju pertumbuhan negara-negara raksasa dalam bidang ekonomi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Walaupun tidak semua negara di Asia Tenggara mendapatkan efek perkembangan ekonomi yang sama, namun hubungan ini telah membangun kedekatan perekonomian China dan Asia Tenggara yang berakibat pada berkurangnya interaksi perekonomian dari pihak lainnya termasuk Amerika Serikat. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi Amerika Serikat yang sudah lama menancapkan pengaruh di wilayah ini. Negara di kawasan Asia Tenggara yang berada di antara dua kekuatan ekonomi dan politik besar terus berusaha untuk menjaga jarak antara kedua belah pihak untuk memaksimalkan keuntungan hasil dinamika tersebut. Namun, dalam beberapa isu negara-negara ASEAN cenderung

9 J. Canrong, "How America's relationship with China changed under Obama," *World Economic Forum*, 14 Desember 2016, diakses 20 Januari 2019. <https://www.weforum.org/agenda/2016/12/america-china-relationship>

10 Koko, Triarko, "Nilai Perdagangan ASEAN-Cina 2018, Meningkat," *Cendana News*, 14 Mar 2019 - 14:47, diakses 13 April 2019, <https://www.cendananews.com/2019/03/nilai-perdagangan-asean-cina-2018-meningkat.html>

bersikap unilateralis demi mempertahankan kepentingan nasionalnya.<sup>11</sup> Hal ini dapat dilihat dari sengketa di Laut China Selatan (LCS). Beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, mempunyai sikap yang berbeda dan cenderung meninggalkan mekanisme ASEAN yang mengedepankan dialog dan konsensus. Hal ini dapat berakibat melemahnya regionalitas ASEAN dalam menjaga kawasan tersebut tetap stabil dan aman. Pembangunan pangkalan militer China di LCS yang kemudian diikuti oleh Indonesia di wilayah Natuna, dan masuknya intervensi Amerika Serikat secara langsung maupun tidak langsung di LCS menandakan mekanisme ASEAN tidak berjalan. Hal ini mengakibatkan pada terjadinya ketidakpastian dan ketidakstabilan di kawasan regional ASEAN.

Rivalitas Sino-AS di Laut China Selatan (LCS) mendorong kedekatan Vietnam, yang merupakan *claimant state* di isu tersebut, kepada Amerika Serikat. Hal ini cukup menarik mengingat Vietnam merupakan negara komunis yang serupa dengan China. Namun keterbukaan ekonomi Vietnam dan dukungan Amerika Serikat di Laut China Selatan membawa hubungan yang lebih dekat pada kedua negara. Di sisi yang lain, Filipina yang selama bertahun-tahun dekat dengan Amerika Serikat saat ini lebih mendekati kepada China. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kesempatan dalam bidang perekonomian yang terbuka lebar terlebih dengan adanya pemberhentian bantuan dana dari Amerika Serikat. Pemberhentian bantuan ini dikarenakan kebijakan Presiden Duterte yang memerangi narkoba dianggap telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Tak ketinggalan Indonesia turut mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah turbulensi regional ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari

pragmatisme Indonesia yang sedang gencar membangun infrastruktur dan membutuhkan investor dana yang besar. Di bawah Presiden Joko Widodo, kebijakan Indonesia di Laut Cina Selatan telah berubah dari *active player* dalam membangun solusi damai menjadi lebih pragmatis untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Pembangunan pangkalan militer Indonesia di Natuna menunjukkan sikap Indonesia terhadap kedaulatannya, namun di sisi lain Indonesia tidak bisa terlalu antagonis terhadap China. Hal ini karena China merupakan investor potensial bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.<sup>12</sup>

Fakta-fakta di atas menunjukkan pragmatisme negara-negara di ASEAN dalam menjamin kepentingan nasionalnya. Namun, hal tersebut akan berakibat buruk bagi keberlangsungan budaya konsensus ASEAN sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan. Tentu saja pragmatisme negara-negara ASEAN, yang sekaligus meninggalkan “budaya ASEAN” yang mengedepankan konsensus dan dialog, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *collective action* negara-negara ASEAN sehingga dapat berakibat pada instabilitas kawasan. ASEAN yang telah berdiri sejak tahun 1967, saat ini sedang menghadapi ujian besar untuk memilih antara kepentingan nasional atau keberlangsungan kebersamaan regional. Penulis berpendapat kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara berimbang dan tidak berat sebelah. Indonesia sebagai *big brother* bagi negara-negara anggota ASEAN saat ini perlu meningkatkan peran dan kepemimpinan di ASEAN guna memperkuat stabilitas keamanan dan kerja sama internasional di wilayah Asia Tenggara. Hal ini penting dikarenakan wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah yang rentan terhadap aksi-aksi kejahatan seperti perompakan, *illegal fishing*, dan terorisme.

11 A.M. Murphy, “Great Power Rivalries, Domestic Politics and Southeast Asian Foreign Policy: Exploring the Linkages,” *Asian Security* 13, no. 3 (Agustus 2017): 165-182

12 Aaron L. Connelly, “Indonesia in the South China Sea: Going it alone,” *Lowy Institute for International Policy*, (Desember 2016): 1

## Potensi Ancaman di Wilayah Regional ASEAN

Potensi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara saat ini mayoritas merupakan ancaman – ancaman berbentuk asimetris yang meliputi *Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing*, terorisme, *piracy*, dan *human rights*. Ancaman dari luar kawasan yang merembet kepada lingkungan strategis kawasan Asia Tenggara yaitu klaim sepihak dari China atas Laut China Selatan yang menyangkut kedaulatan negara Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Indonesia. Bagi Indonesia ancaman-ancaman tersebut dapat mengganggu stabilitas serta perkembangan perekonomian, keamanan, dan perpolitikan regional sehingga dapat mengganggu proses pembangunan di dalam negeri. Berbagai macam potensi ancaman dari dalam dan luar kawasan ini tak kunjung selesai dikarenakan ruang lingkungannya yang bersifat lintas batas negara. Untuk menghadapi berbagai permasalahan lintas batas tersebut penyelesaiannya seharusnya juga melakukan penyelesaian lintas batas negara dengan artian kerja sama antar negara dalam dan luar kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, kerja sama internasional dan multilateral menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Terjalinya kerja sama internasional antar-negara membutuhkan stabilitas dan ketiadaan konflik atau sengketa. Hal tersebut penting mengingat perkembangan lingkungan strategis telah menimbulkan banyak ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara. Salah satu ancaman nyata bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara saat ini adalah terorisme.

Terorisme menjadi ancaman yang nyata di wilayah regional ASEAN dari dulu hingga saat ini. Hal ini diperparah dengan belum adanya kesepakatan terkait fenomena terorisme, sensitifitas dalam hal kedaulatan, dan ketidakberimbangan kemampuan

pertahanan di antara negara-negara ASEAN dalam menanggulangi terorisme. Hal ini dapat berakibat terjadinya terorisme *spillover* atau penyebaran terorisme ke wilayah negara lain karena ketidakmampuan suatu negara melawan terorisme di wilayahnya sendiri. Terorisme di Asia Tenggara telah menjadi perhatian khusus bagi negara dan masyarakat di kawasan di tahun 2002 pada insiden bom Bali 1. Telah diketahui jika serangan bom ini difasilitasi oleh jaringan terorisme Al Qaeda yang berasal dari luar kawasan Asia Tenggara. Situasi dan kondisi saat ini yang terus berkembang memungkinkan jaringan terorisme menyebarkan pahamnya dengan memanfaatkan teknologi informasi di dunia digital seperti media sosial, internet, dan media *chatting online*. Kemunculan generasi baru terorisme ini disebut oleh Menteri Pertahanan Indonesia Rayamizard Ryacudu dalam kasus Bom Surabaya sebagai terorisme generasi ketiga dikarenakan ide terorisme dengan tujuan tidak lagi hanya meneror agama non-Islam namun agar menciptakan negara dengan hukum Islam seperti jaringan ISIS (*Islamic State*) yang kemudian menyebar ke Eropa dan Asia melalui sosial media, jaringan tidak formal, dan pelatihan dari terorisme asing.<sup>13</sup>

Hal ini sebenarnya juga telah dilontarkan sebelumnya oleh Liow dalam penelitiannya. Ia menjelaskan jika terjadi perubahan pergerakan terorisme akibat terdesaknya ISIS di Timur Tengah sebagai pusat kegiatan terorisme. Terdesaknya ISIS pada akhirnya menjadikan para militan dan kelompok-kelompok teroris di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih aktif. Hal ini dapat dilihat dari kasus Marawi yang diusahakan oleh kelompok terorisme sebagai markas untuk operasi teror di kawasan Asia

13 N. Chandran. "Family Terrorism is Southeast Asia's Newest Threat, Defense Officials Warn," *CNBC Asia Pacific News*, 3 Juni 2018, diakses 21 Februari 2019. <https://www.cnbc.com/2018/06/03/family-terrorism-is-southeast-asias-newest-threat-defense-officials-warn.html>

tenggara. Kemudian cara-cara dan profil perekrutan yang biasanya berputar di ruang lingkup para grup radikal mulai berubah kepada mereka yang tidak punya keterlibatan langsung atau disebut sebagai *lone wolf terrorist*, yaitu pelaku teror secara individu tanpa adanya keterikatan dengan grup teroris. Perilaku *lone wolf terrorist* dapat terjadi karena pengaruh yang disebarkan melalui internet dan media sosial.<sup>14</sup> Upaya dalam memerangi kasus terorisme yang bersifat lintas negara di kawasan Asia Tenggara telah dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya tersebut seperti kerjasama antar negara seperti *Our Eyes Initiatives* (OEI) yang beranggotakan 6 Negara Asia Tenggara untuk saling bertukar informasi intelijen dan pembentukan *Trilateral Patrol* antara Indonesia-Malaysia-Filipina di wilayah Laut Sulu. Kepentingan nasional yang sama memunculkan inisiatif untuk bekerja sama. Namun kerja sama tersebut memerlukan kesungguhan dan komitmen yang semaksimal mungkin dari negara. Hal ini penting dalam rangka untuk menjalin beragam inisiatif kerjasama di kawasan dalam memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme garis keras.

Selain terorisme, permasalahan yang cukup mendapat perhatian adalah sengketa perbatasan (*territorial disputes*) di Laut China Selatan (LCS) yang menjadi suatu potensi konflik besar. Tentu permasalahan di LCS membutuhkan kesabaran dalam kerja sama dan dialog dengan sekaligus menahan ego nasionalisme masing-masing negara. Terkait sengketa tersebut telah dilakukan berbagai pertemuan bilateral dan multilateral dalam penyelesaiannya yang terbukti sampai sekarang tidak ada eskalasi konflik. Namun, pembangunan pangkalan militer China dan Indonesia di kawasan serta masuknya intervensi Amerika Serikat telah membuat wilayah LCS menjadi sedikit memanas. Ditambah lagi adanya pertemuan antara AS - Australia yang dikatakan oleh

14 J.C. Liow, "Shifting Sands of Terrorism in Southeast Asia," *RSIS Commentary*, 15 Februari 2018, no. 25: 1-5.

Pompeo menghasilkan kesepakatan tidak akan berdiam diri jika terdapat *code of conduct* (COC) yang akan merugikan kepentingan pihak ketiga atau hak dari semua negara dibawah hukum internasional. Hal ini dapat diartikan jika AS dan Australia akan selalu mengupayakan adanya kesepakatan yang menguntungkan mereka.<sup>15</sup> Sengketa perbatasan di wilayah LCS telah berubah menjadi arena pertarungan kepentingan banyak pihak baik negara-negara ASEAN maupun negara-negara di luar ASEAN. Diperlukan suatu kepemimpinan strategis dan komitmen negara-negara ASEAN untuk menjaga kawasan regional tersebut tetap stabil dan aman. Maka sentralitas ASEAN dalam *manage* konflik harus ditegakkan. Hal ini semata-mata guna melindungi kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN, yang dalam hal ini termasuk Indonesia. Di era kepemimpinan Joko Widodo, sentralitas Indonesia di ASEAN cenderung mengalami penurunan dibandingkan di era kepemimpinan SBY.

### Citra Positif Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era SBY

Indonesia di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menampilkan kebijakan luar negeri yang pro aktif dan *high profile*. Hal ini ditandai dengan safari politik internasional yang dilakukan oleh SBY dalam rangka meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional. Dengan menggunakan jargon "*thousand friends zero enemy*" SBY ingin menunjukkan posisi penting Indonesia di dunia internasional. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, SBY telah mengunjungi Malaysia dan Singapura yang merupakan tetangga dekat Indonesia. Hal ini penting sebagai tanda "perkenalan" sebagai langkah awal upaya diplomasi di masa yang akan

15 Emanuele Scimia, "South China Sea progress between China and Asean will run into choppy waters with the US", *South China Morning Post*, 29 Februari 2018, diakses 21 Februari 2019, <https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/united-states/article/2158455/south-china-sea-progress-between-china-and>

datang. Setelah itu, SBY juga mengunjungi Australia, Selandia Baru, dan Timor Leste.<sup>16</sup> Pada tahun 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berkata jika “no country perceives Indonesia as an enemy and there is no country which Indonesia considers an enemy. Thus, Indonesia can exercise its foreign policy freely in all directions, having a million friends and zero enemies”.<sup>17</sup> Kata-kata tersebut mengandung makna jika Indonesia merupakan negara yang mendorong kerja sama yang konstruktif dengan negara manapun. Kemudian kalimat tersebut juga memberi pesan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak gemar berkonflik.

Dari fakta di atas dapat disimpulkan jika SBY berusaha untuk memulai hubungan internasional dengan negara-negara ASEAN dan beberapa negara tetangga di sekitar ASEAN. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia sejak Orde Baru yaitu *Concentric Circle Formula*. Konsep ini menjadikan ASEAN terletak pada *concentric circle* yang pertama dan berfungsi sebagai *corner stone* politik luar negeri Indonesia. Dengan kata lain, ASEAN menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Di lingkaran kedua, terdapat negara-negara yang tergabung dalam *Pacific Island Forum* dan *the South West Pacific Dialogue*. Selain itu juga terdapat Konsultasi Tripartite antara Indonesia, Australia, dan Timor Timur. Serta di dalam lingkaran konsentris kedua ini juga terdapat ASEAN + 3 yang meliputi Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sedangkan di dalam lingkaran konsentris ketiga memfokuskan pada kerja sama dengan negara ekonomi

mapan seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.<sup>18</sup> Dalam isu Laut China Selatan (LCS), Indonesia di bawah SBY mengambil peran sebagai mediator yang selalu menekankan pada penyelesaian masalah secara damai. Ia mengatakan pada forum KTT ke-24 ASEAN di Myanmar bahwa Indonesia secara moral merasa terpenggil untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa di LCS.<sup>19</sup> Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan menghindari konflik dalam menangani isu LCS.

Dalam isu terorisme, Indonesia di bawah SBY mencitrakan dirinya sebagai negara Islam terbesar di dunia yang menolak aksi-aksi terorisme yang berlatar belakang agama Islam. Prof. Makarim Wibisono pernah mengatakan jika Indonesia paska peristiwa 9/11 mencoba untuk membuktikan kepada dunia jika semua yang beragama Islam tidak serta merta adalah teroris.<sup>20</sup> SBY turut berpartisipasi di banyak forum global dalam bidang anti-terorisme, menjadi ketua *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Counter Terrorism Task Force*, dan memainkan berbagai peran penting dalam membangun komunikasi dengan negara-negara non-Islam untuk membangun kepercayaan terhadap Islam. SBY menekankan bahwa Islam menentang segala bentuk ekstrimisme. Hal tersebut disampaikan dalam beberapa kesempatan seperti saat bertemu dengan Iyad Ameen Madani, yang merupakan Sekretaris Jenderal OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan ke-6 *United Nations Alliance*

16 Ratna Shofi Inayati, “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia,” *EJournal Politik LIPI*, 2016, diakses 27 Februari 2019, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/390/227>

17 Rizky Alif Alvia, Ganesh Cintika Putri, & Irfan Ardhani. “Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi ‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo”, *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 2 (Maret 2018): 152

18 Inayati, Ratna Shofia, “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia”, *EJournal Politik LIPI*, 2016, diakses 27 Februari 2019, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/390/227>

19 Rizki Gunawan, “SBY: Indonesia Terdepan Damaikan Konflik Laut China Selatan”, *Liputan6.com*, 12 Mei 2014, 18:03 WIB, diakses 14 April 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/2048913/sby-indonesia-terdepan-damaikan-konflik-laut-china-selatan>

20 Ahmad Fuad Fanani, *SBY and the Place of Islam in Indonesian Foreign Policy*, (Adelaide: Flinder University, 2012), 81

of Civilisations (UNAOC) di Bali tahun 2014 silam.<sup>21</sup>

Terpilihnya SBY memberikan harapan baru bagi terciptanya pemerintahan Indonesia yang lebih baik dan berperan dalam kancah perpolitikan internasional. Hal ini diawali oleh SBY dengan menawarkan kerja sama *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP) DI Konferensi Asia-Afrika ke-50 pada April tahun 2005.<sup>22</sup> Rizal Sukma mengatakan jika terdapat tiga strategi utama dalam politik luar negeri SBY. Yang pertama adalah fokus Indonesia dalam memprioritaskan pembentukan komunitas regional dengan menekankan pada multilateralisme. Hal ini ditunjukkan dengan keaktifan Indonesia pada forum-forum multilateral seperti ASEAN, APEC, ASEAN + 3, *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan *East Asia Summit* (EAS). Fokus kedua politik luar negeri Indonesia di bawah SBY adalah turut memberikan perhatian pada hubungan-hubungan bilateral dengan negara *major* dan *regional power* yang meliputi Cina, Korea Selatan, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah fokus politik Indonesia dalam upaya untuk aktif dan berkontribusi dalam masalah-masalah global seperti perubahan iklim, keamanan energi, ekonomi, dan pangan.<sup>23</sup>

Hal tersebut di atas dilakukan oleh SBY dalam rangka untuk menciptakan citra positif Indonesia di mata dunia. Efek dari penguatan citra positif dapat meningkatkan kepercayaan

negara-negara lain dalam menjalin kerja sama yang konstruktif dengan Indonesia. Selama beberapa tahun Indonesia di bawah SBY telah banyak membangun diplomasi internasional sebagai fokus utama politik luar negeri. Membangun kedekatan dengan negara mitra kunci yang merupakan negara maju maupun negara berkembang diwujudkan dalam bingkai *strategic partnership* ataupun *comprehensive partnership*. Kedua bentuk kemitraan tersebut merupakan suatu cara untuk menyusun struktur hubungan, persetujuan yang didasarkan pada prioritas, serta langkah-langkah yang disusun guna mencapai target yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat membuat kerja sama tersebut menjadi lebih terstruktur dan terukur.<sup>24</sup> Prinsip “*thousand friends zero enemy*” merupakan suatu proyeksi kekuatan *soft power* Indonesia guna meningkatkan kepercayaan dunia internasional sehingga dapat membangun kerja sama yang konstruktif<sup>25</sup> dalam menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan.

### Pragmatisme Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Joko Widodo

Di era Presiden Joko Widodo dapat dikatakan kebijakan luar negeri Indonesia, jika tidak berbanding berbalik, memiliki perbedaan yang signifikan dengan SBY. Banyak kalangan menilai jika Presiden Joko Widodo memiliki pandangan yang *inward looking* atau lebih memfokuskan pada dinamika dalam negeri. Perbedaan latar belakang dengan SBY menjadi salah satu faktor yang menentukan gaya kepemimpinan Joko Widodo. SBY yang berlatar belakang militer dan memiliki pengalaman politik nasional dan internasional berbeda dengan

21 Sandro Gatra, “Presiden SBY dan Sekjen OKI Bahas Perkembangan ISIS dan Boko Haram”, *Kompas.com* - 29/08/2014, 10:22 WIB, diakses 16 April 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/10220191/Presiden.SBY.dan.Sekjen.OKI.Bahas.Perkembangan.ISIS.dan.Boko.Haram>

22 Andhik Beni Saputra, “Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011,” *Repository UNRI*, (2012), diakses 27 Februari 2019, <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1066/PLN%20RI%20Era%20Presiden%20SBY%202009-2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

23 Andhik Beni Saputra, “Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011, 5

24 Andhik Beni Saputra, “Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011,” 6

25 Tonny Dian Effendi, “Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif: Resensi Buku,” *Indonesian Perspective*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017): 77-81

Joko Widodo yang belum terbiasa dengan forum-forum internasional multilateral. Joko Widodo menerapkan kebijakan *down-to-earth diplomacy* atau diplomasi membumi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan diplomasi membumi dimaksudkan untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia. Dalam artian segala bentuk kerja sama difokuskan pada kepentingan nasional terutama dalam bidang ekonomi.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah Joko Widodo tidak terlalu fokus pada pembentukan citra positif di kancah internasional. Joko Widodo menginginkan hasil yang cepat (*quick result*) dari kerja sama-kerja sama internasional yang dijalankan oleh Indonesia.

*Down-to-Earth Diplomacy* juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan domestik atau lebih tepatnya publik Indonesia dengan mengutamakan isu sosial ekonomi yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat Indonesia. Dengan berfokus pada isu-isu domestik, bukan berarti Joko Widodo meninggalkan kebijakan luar negerinya. Fokus kebijakan luar negeri Joko Widodo diprioritaskan pada isu-isu ekonomi yang memberikan manfaat secara nyata bagi Indonesia. Sebagai contoh, saat ini Indonesia sedang menggerakkan beberapa perundingan ekonomi yang meliputi *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Preferential Trade Agreement* (PTA), dan akan memulai perundingan *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Di luar isu ekonomi, kebijakan luar negeri Indonesia juga berhasil dalam hal perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Tercatat dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2015-2017 telah berhasil menyelesaikan sebanyak 25.620 kasus hukum yang dihadapi oleh WNI. Serta sebanyak 1035 tindak pidana perdagangan orang berhasil untuk diatasi.<sup>27</sup>

26 Aaron L. Connelly, "Indonesia in the South China Sea: Going it alone," 7.

27 Fetra Tumanggor, "Melihat Politik Luar Negeri

Kebijakan-kebijakan luar negeri tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip kepentingan nasional yang nyata dan manfaatnya secara langsung terasa.

Terkait dengan isu stabilitas keamanan kawasan seperti terorisme dan Laut China Selatan (LCS), profil politik Joko Widodo tidak sekuat SBY. Dalam isu terorisme misalnya, Joko Widodo tidak terlalu vokal dan aktif dalam forum-forum internasional anti-terorisme. Joko Widodo cenderung mendelegasikan forum-forum tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kemunculan ISIS dan peningkatan aktivitas kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina turut meningkatkan intensitas pertemuan dan komitmen para pemimpin di kawasan baik bilateral maupun multilateral. Peran tersebut tidak langsung dimainkan oleh Joko Widodo, sebagai contoh kerja sama di tingkat ASEAN yang membentuk "*Our Eyes*", yang merupakan kerja sama pertukaran informasi strategis untuk meningkatkan keamanan kawasan, diprakarsai oleh enam Menteri Pertahanan negara ASEAN, termasuk Indonesia, pada tahun 2018.<sup>28</sup> Sedangkan dalam isu Laut China Selatan (LCS), Indonesia di bawah Joko Widodo tidak memainkan peran sentral. Turunnya peran Indonesia di ASEAN dalam isu LCS membuat kondisi kawasan menjadi memanas. Dibangunnya pangkalan militer China di wilayah LCS yang kemudian diikuti oleh Indonesia dengan melakukan hal yang sama di Natuna menandakan mekanisme ASEAN tidak berjalan. Joko Widodo pada kenyataannya lebih menampilkan corak kepemimpinan yang bersifat penguatan domestik (*inward looking*).

Jokowi," *Tagar News*, 25 Oktober 2017, diakses 27 Februari 2019, <https://www.tagar.id/melihat-politik-luar-negeri-jokowi>

28 Kementerian Pertahanan RI, "Enam Menhan ASEAN Tandatangani Perjanjian Kerja Sama "Our Eyes", *ADMM Retreat 2018*, diakses 14 April 2019, <https://www.kemhan.go.id/2018/02/06/enam-menhan-asean-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-our-eyes-dalam-admm-retreat-2018.html>

Terdapat empat komponen penanda yang mengkonstruksi kebijakan *inward looking* Joko Widodo. Yang pertama terkait dengan prinsip dan tujuan politik luar negeri Indonesia. Prinsip ini tetap berpegang pada konsep bebas-aktif yang selama ini dianut pada kebijakan luar negeri Indonesia. Implementasi dari prinsip ini dapat dibaca pada visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menginginkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong. Kemudian, Joko Widodo juga memberikan prioritas pada empat elemen yang berfokus pada rakyat yaitu perlindungan WNI/TKI di luar negeri, perlindungan sumber daya alam dan perdagangan, produktivitas perekonomian, dan pertahanan dan keamanan nasional. Komponen kedua sebagai penanda kebijakan *inward looking* Joko Widodo adalah konstelasi politik internasional dan regional. Dalam hal perkembangan lingkungan strategis global dan regional, pemerintah Indonesia cukup merespons dengan baik terutama dalam isu keamanan dan ekonomi.<sup>29</sup>

Komponen ketiga adalah dinamika politik dalam negeri yang cukup menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam fenomena konsolidasi demokrasi paska reformasi, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah. Permasalahan tersebut meliputi penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Penguatan pada elemen-elemen tersebut sejatinya dapat menjadi elemen positif bagi citra Indonesia di mata internasional sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Komponen keempat adalah gaya kepemimpinan Joko Widodo yang didasarkan pada konsep *Rational Action Model* (RAM). RAM mengandaikan jika para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan politik,

29 Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK," 74.

dalam hal ini Presiden Joko Widodo, harus menguasai permasalahan bangsa baik internal maupun eksternal sebagai modal analisis dalam mengambil kebijakan.<sup>30</sup> Latar belakang Presiden Joko Widodo yang belum memiliki cukup pengalaman perpolitikan internasional, sangat mempengaruhi warna kebijakan luar negeri Indonesia yang saat ini cenderung *inward looking*.

Namun demikian, terdapat pula penanda bahwa Indonesia di bawah Joko Widodo juga menampilkan kebijakan yang bersifat *outward looking*. Akan tetapi, corak *outward looking* tersebut berbeda dengan SBY yang mengedepankan citra positif. Indonesia di era Joko Widodo menekankan pada orientasi dan strategi yang berpegang pada kepentingan nasional. Upaya penanggulangan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia dan keaktifan di forum-forum internasional seperti APEC, G20, dan IORA menjadi penanda *outward looking* Joko Widodo. Namun orientasi kebijakan luar negeri tersebut tetap didasarkan pada pragmatisme "*no profit no deal*". Hamzah menyatakan jika Joko Widodo merupakan pribadi yang berorientasi hasil nyata. Joko Widodo memang tidak selalu nyaman dengan lingkungan internasional di tengah-tengah kekuatan politik global.<sup>31</sup> Jika di analisis menggunakan *Rational Action Model* (RAM), maka corak kepemimpinan Joko Widodo sangat ditentukan oleh pengalaman pribadinya yang berbeda dengan SBY. Hal inilah yang menjadi corak bagi Joko Widodo dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya.

Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo pada kenyataannya memiliki cukup prestasi di dalam kebijakan luar negerinya. Selain bersemangat menggerakkan forum-forum

30 Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK," 76.

31 B.A. Hamzah, "Sinking the Ships: Indonesia's Foreign Policy under Jokowi," *RSIS Commentary*. No. 16, (20 Januari 2015): 2

ekonomi internasional, perlindungan terhadap WNI, dan upaya penanggulangan kapal asing, Indonesia tahun lalu berhasil terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020. Hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang sekaligus membawa beban moral kepada bangsa Indonesia. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia mendapat legitimasi internasional bahwa memang Indonesia dianggap mampu untuk berkontribusi terhadap upaya menciptakan perdamaian dunia. Namun, dengan beban tersebut maka kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia seharusnya tidak semata-mata bersifat unilateralis, pragmatis, dan mengejar kepentingan nasional semata. Upaya nyata Indonesia sebagai agen dalam perdamaian dunia perlu dituangkan dalam langkah nyata.

### **Kontekstualisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Regional**

Tipe kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo menunjukkan perbedaan yang signifikan. Tentu saja kebijakan luar negeri tersebut telah melalui proses panjang dan perencanaan matang dari masing-masing rezim pemerintahan. Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk memberikan analisis guna melihat kelebihan dan kekurangan corak kebijakan yang telah dilakukan oleh SBY dan Joko Widodo. Kemudian, penulis juga memberikan rekomendasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia ke depan dengan melihat kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo. Hal ini semata-mata untuk tetap mempertahankan eksistensi Indonesia di kancah internasional dengan tetap mencapai kepentingan nasional.

Telah disampaikan sebelumnya jika corak kebijakan luar negeri SBY sangat mengedepankan citra (*image*) dengan jargon "*thousand friends zero enemy*". Safari politik SBY yang bercorak *high politics* dimaksudkan

untuk membuat Indonesia aktif di kancah perpolitikan internasional. SBY menampilkan kekuatan *soft power* yang didasarkan pada personalitas yang atraktif, budaya, nilai-nilai politik yang menjunjung tinggi moralitas universal.<sup>32</sup> Hal ini berujung pada pengakuan dunia internasional kepada Indonesia yang bergerak sejalan dengan nilai-nilai universal. Pola politik luar negeri SBY adalah untuk merangkul banyak pihak dalam kerja sama yang menguntungkan melalui diplomasi internasional. Menurut SBY langkah tersebut dapat memberikan tempat bagi Indonesia di dunia internasional sehingga Indonesia dapat turut serta menentukan dan berkontribusi untuk membuat tatanan global.<sup>33</sup> Namun, kebijakan luar negeri SBY tersebut bukanlah tanpa kritik. Beberapa pihak melayangkan kritik terhadap "safari politik" SBY tersebut sebagai tidak lebih dari sebuah "*ego trip*". SBY dianggap terlalu antusias pada forum-forum multilateral tanpa memberikan efek yang semestinya bagi kepentingan nasional. Bahkan SBY dianggap gagal untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi WNI/TKI Indonesia yang berada di luar negeri.<sup>34</sup>

Di sisi lain, corak kepemimpinan Joko Widodo dalam kebijakan luar negeri memberikan efek yang nyata pada masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perbaikan perlindungan bagi WNI/TKI di luar negeri, proyek infrastuktur sebagai pemerataan pembangunan, dan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) yang berusaha menguatkan sektor maritim Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut seolah-olah dilaksanakan untuk mengisi gap kekosongan yang ditinggalkan

32 Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: Public Affairs, 2004): 6

33 Andhik Beni Saputra, "Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011," *Repository UNRI*, (2012), diakses 27 Februari 2019, <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1066/PLN%20RI%20Era%20Presiden%20SBY%202009-2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

34 Aaron L. Connelly, "Indonesia in the South China Sea: Going it alone," 7.

oleh pemerintahan SBY. Pada dasarnya, Joko Widodo mempunyai sikap skeptis pada forum-forum multilateral yang Ia anggap *takes time* dan melelahkan tanpa hasil yang jelas. Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo tidak terlalu menggemari forum-forum multilateral kecuali yang dapat memberikan efek langsung bagi Indonesia.

Connelly menyatakan jika Joko Widodo menekankan pada hasil yang nyata dalam bidang ekonomi dan sikap skeptis terhadap forum-forum multilateral membuat diplomasi luar negeri Indonesia cenderung turun dibandingkan di era SBY. Fakta Menunjukkan jika peran Indonesia di ASEAN turut menurun yang berakibat pada terganggunya proses pembentukan norma-norma ASEAN dan konsensus pada setiap pertemuan di level ASEAN.<sup>35</sup> Kepemimpinan Joko Widodo, menurut Rosyidin, cenderung tidak tertarik pada forum regional. Hal ini dapat dilihat dari keengganan Joko Widodo dalam menggunakan mekanisme ASEAN untuk menghadapi sengketa di Laut China Selatan (LCS). Bahkan Indonesia turut “terprovokasi” untuk mendirikan pangkalan militer di Natuna guna menandingi Cina yang sudah melakukan hal serupa sebelumnya. Menurut Rosyidin, kebijakan luar negeri Indonesia di era Joko Widodo bersifat nasionalistis, unilateralis, berorientasi domestik, dan enggan menggunakan mekanisme ASEAN yang melalui proses panjang.<sup>36</sup> Pragmatisme Joko Widodo turut disampaikan oleh Rizal Sukma, penasehat kebijakan luar negeri Joko Widodo. Ia menyatakan jika Indonesia akan lebih berfokus kepada pengembangan diplomasi secara bilateral. Hal ini dikarenakan Joko Widodo tidak ingin membuang waktu dalam hubungan diplomatik yang tidak menguntungkan Indonesia.<sup>37</sup> Menurunnya peran Indonesia di

kancah regional berakibat pada menurunnya peran ASEAN dalam mengelola konflik dan ancaman keamanan di wilayah regional. Hal ini cenderung dapat menarik kekuatan asing untuk turut campur dan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegagalan ASEAN untuk meredam infiltrasi China di Asia Tenggara (klaim sepihak LCS dan pembangunan fasilitas militer) telah membuat Amerika Serikat dan Australia turut bereaksi dengan membangun pangkalan militer di Papua Nugini. Tentu hal ini dapat meningkatkan tensi di kawasan regional yang nantinya juga akan berimplikasi pada instabilitas kawasan.

Fakta tersebut seharusnya juga menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk lebih aktif di forum internasional dan regional dan tidak semata-mata menghitung sekedar untung-rugi. Keaktifan di forum-forum internasional juga menjadi keharusan karena tahun ini Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini membuat Indonesia harus aktif dalam setiap usaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Indonesia telah lama menjadi “pemimpin” di ASEAN yang dapat menjaga stabilitas kawasan dan mengelola konflik dengan baik. Peran tersebut saat ini seolah-olah hilang karena sikap pragmatisme dan terlalu fokus pada kepentingan domestik. Penulis berpendapat jika fokus kebijakan suatu pemerintahan seharusnya berfokus *inward* dan *outward looking* sehingga tercipta suatu “*equilibrium*” atau keseimbangan. Di satu sisi Indonesia tetap menjalankan peran dalam forum-forum internasional dengan tidak meninggalkan kepentingan nasional. Terciptanya ASEAN sebagai *zone of peace, freedom and neutrality* (ZOPFAN) dapat meminimalisir intervensi kekuatan asing sehingga kepentingan nasional Indonesia juga tidak terganggu.

35 *Ibid*, 9.

36 Rosyidin, “The Indonesian Quarterly: Reflection on ASEAN at its 50th Anniversary,” 225.

37 P. Prameswaran, “Is Indonesia Turning Away From ASEAN Under Jokowi?”, *The Diplomat*, 2014, Desember

18, diakses 16 April 2019, <https://thediplomat.com/2014/12/is-indonesia-turning-away-from-asean-under-jokowi/>

## Kesimpulan

SBY memiliki profil politik yang kuat di kancah internasional yang Ia peroleh dengan aktif di berbagai forum dunia seperti Sidang Umum PBB, pertemuan G-20, dan bahkan memberikan pidato di Universitas Harvard yang merupakan salah satu universitas ternama dunia. Praktis hal tersebut turut mendongkrak citra positif Indonesia di mata dunia. Indonesia di bawah SBY juga tampil sebagai mediator dalam sengketa wilayah di LCS sehingga konflik yang terjadi terbilang sangat minim. Indonesia selalu mendorong penyelesaian sengketa wilayah di LCS dilakukan secara damai. SBY dapat dikatakan berhasil dalam membuat citra positif Indonesia di kancah internasional, namun SBY kurang mampu untuk memberikan hasil nyata bagi Indonesia. Hal ini menyebabkan kritikan dari berbagai pihak bahwa SBY hanya melakukan *ego trip* tanpa hasil yang jelas.

Di sisi lain, Profil politik Joko Widodo di mata internasional dapat dikatakan lemah. Joko Widodo tercatat sudah tiga kali absen dalam Sidang Umum PBB. Hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi citra Indonesia di kancah internasional serta melemahkan komitmen Indonesia dalam upaya kontribusinya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Joko Widodo hanya aktif di forum-forum internasional terutama dalam bidang ekonomi seperti forum IMF-World Bank yang digelar di Bali beberapa waktu yang lalu. Indonesia di bawah Joko Widodo juga gagal mengambil peran sebagai *Big Brother* bagi ASEAN dalam isu LCS. Indonesia justru turut memanaskan suhu politik regional dengan membangun pangkalan militer di Natuna sebagai respons atas dibangunnya pangkalan militer China di wilayah LCS. Meskipun tidak terlalu aktif di forum-forum internasional, kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih dirasakan manfaatnya. Hal ini terbukti dengan perbaikan perlindungan WNI di luar

negeri, stabilitas pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan suatu alat untuk mencapai kepentingan nasional di kancah internasional. Peran aktif suatu negara di forum-forum internasional dapat meningkatkan citra positif sehingga menimbulkan *trust*. Tingginya kepercayaan tersebut dapat memudahkan suatu negara dalam menjalin kerja sama konstruktif yang pada akhirnya dapat mencapai kepentingan nasional. Kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral merupakan pilihan yang paling masuk akal dalam perkembangan dunia yang sangat dinamis. Sebaliknya sikap-sikap pragmatis dan unilateralis dapat membuat suatu negara dikucilkan dalam pergaulan internasional. Perkembangan lingkungan strategis dan beragamnya ancaman membuat suatu negara tidak akan mungkin menghadapinya sendiri. Maka dibutuhkan suatu hubungan yang baik dengan negara-negara lain sebagai modal untuk melakukan kerja sama. Indonesia yang sejak lama merupakan "*pemimpin ASEAN*" sangat dibutuhkan kehadirannya untuk *men-drive* stabilitas keamanan kawasan. Ditambah lagi saat ini Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB yang memberikan tugas bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan dan global. Ujung dari stabilitas kawasan pada akhirnya juga akan bermuara pada kepentingan nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan stabilitas keamanan kawasan akan mendorong kerja sama internasional dan pertumbuhan ekonomi.

Penulis berpendapat jika citra positif Indonesia yang dibangun oleh SBY seharusnya dapat diteruskan oleh Joko Widodo. Dengan memanfaatkan citra positif tersebut, Indonesia dapat lebih diuntungkan dalam mencapai kepentingan nasional di kancah internasional. Pembangunan sektor domestik yang menjadi fokus Joko Widodo

akan berjalan lebih maksimal jika stabilitas keamanan kawasan dapat terpelihara seperti sebelumnya. Jika Joko Widodo mampu mempertahankan eksistensinya seperti yang dilakukan oleh SBY di kancah internasional, dan dengan tetap fokus pada penguatan sektor domestik, maka Joko Widodo akan menciptakan suatu keseimbangan (*equilibrium*) dalam kebijakan luar negerinya. Dengan menggabungkan corak kebijakan luar negeri tersebut justru akan menghasilkan suatu kebijakan yang komprehensif, holistik, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Hal inilah yang akan menjadi kelebihan Joko Widodo dibandingkan dengan SBY. Keaktifan di forum-forum internasional akan menciptakan rasa saling percaya (*trust*). Kepercayaan tersebut akan melahirkan legitimasi dan citra positif pada suatu negara. Kemudian legitimasi dan citra positif tersebut akan memudahkan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya baik di kancah domestik maupun internasional. Kerja sama internasional juga merupakan cara terbaik dalam merespons ancaman keamanan, pertahanan, dan instabilitas kawasan. Hal ini dikarenakan tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi ancaman tanpa bantuan negara lain. Untuk itu, sikap pragmatis dan unilateralis perlu dihindari oleh negara dalam pergaulan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvia, Rizky Alif., Putri, Ganesh Cintika, & Ardhani, Irfan. "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo". *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2017-Maret 2018): 152
- Buzan, Barry and Waever, Ole. *Regions and Powers: The structure of International Security*. USA: Cambridge University Press, 2003.
- Rosyidin, Muhammad. "The Indonesian Quarterly: Reflection on ASEAN at its 50th Anniversary." *Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Third Quarter 2017 Vol 45 No. 3* (2017): 225
- Canrong, J. "How America's relationship with China changed under Obama", *World Economic Forum*, 14 Desember 2016. Diakses 20 Januari 2019. <https://www.weforum.org/agenda/2016/12/america-china-relationship>
- Chandran, N. "Family Terrorism is Southeast Asia's Newest Threat, Defense Officials Warn", *CNBC Asia Pacific News*, 3 Juni 2018. Diakses 21 Februari 2019, <https://www.cnn.com/2018/06/03/family-terrorism-is-southeast-asias-newest-threat-defense-officials-warn.html>
- Connelly, Aaron L. "Indonesia in the South China Sea: Going it alone", *Lowy Institute for International Policy*. (December, 2016): 1
- Effendi, Tonny Dian. "Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif: Resensi Buku". *Indonesian Perspective* Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017): 77-81
- Fanani, A. F. *SBY and the Place of Islam in Indonesian Foreign Policy*. Adelaide: Flinder University, 2012.

- Gatra, Sandro. "Presiden SBY dan Sekjen OKI Bahas Perkembangan ISIS dan Boko Haram", *Kompas.com* - 29/08/2014, 10:22 WIB. Diakses 16 April 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/10220191/Presiden.SBY.dan.Sekjen.OKI.Bahas.Perkembangan.ISIS.dan.Boko.Haram>
- Giddens, Anthony. *The Consequence of Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- Gunawan, Rizki. "SBY: Indonesia Terdepan Damaikan Konflik Laut China Selatan". *Liputan6.com*, 12 Mei 2014, 18:03 WIB. Diakses 14 April 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/2048913/sby-indonesia-terdepan-damaikan-konflik-laut-china-selatan>
- Hamzah, B.A. "Sinking the Ships: Indonesia's Foreign Policy under Jokowi". *RSIS Commentary*. No. 016 (20 Januari 2015): 2
- Heywood, Andrey. *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan, 2011
- Inayati, Ratna Shofi. "Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia," *EJournal Politik LIPI*, 2016. Diakses 27 Februari 2019, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/390/227>
- Kemhan RI. "Enam Menhan ASEAN Tandatangani Perjanjian Kerja Sama "Our Eyes" dalam ADMM Retreat 2018". *KEMHAN RI*, 2018- Februari 6. Diakses tanggal 14 April 2019, <https://www.kemhan.go.id/2018/02/06/enam-menhan-asean-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-our-eyes-dalam-admm-retreat-2018.html>
- Liow, J.C. "Shifting Sands of Terrorism in Southeast Asia," *RSIS Commentary*, 15 Februari 2018, no. 25: 1-5.
- Murphy, A.M. "Great Power Rivalries, Domestic Politics and Southeast Asian Foreign Policy: Exploring the Linkages," *Asian Security* 13, no. 3 (Agustus 2017): 165-182
- Nye, Joseph. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs, 2004
- Prameswaran, P. "Is Indonesia Turning Away from ASEAN Under Jokowi?," *The Diplomat*, 2014, Desember 18. Diakses 16 April 2019, <https://thediplomat.com/2014/12/is-indonesia-turning-away-from-asean-under-jokowi/>
- Saputra, Andhik Beni. "Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011," *Repository UNRI*, (2012). Diakses 27 Februari 2019, <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1066/PLN%20RI%20Era%20Presiden%20SBY%202009-2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Scimia, Emanuele. "South China Sea progress between China and Asean will run into choppy waters with the US," *South China Morning Post*, 29 Februari 2018. Diakses 21 Februari 2019. <https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/united-states/article/2158455/south-china-sea-progress-between-china-and>
- Situmorang, Mangadar. "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK". *Makalah Kegiatan Networking Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara* (2014): 72
- Triarko, Koko. "Nilai Perdagangan ASEAN-Cina 2018, Meningkat", *Cendana News*, 14 Maret 2019 - 14:47. Diakses 13 April 2019. <https://www.cendananews.com/2019/03/nilai-perdagangan-asean-cina-2018-meningkat.html>

Tumanggor, Fetra. “Melihat Politik Luar Negeri Jokowi”, *Tagar News*, 25 Oktober 2017. Diakses 27 Februari 2019, <https://www.tagar.id/melihat-politik-luar-negeri-jokowi>

Wirasenjaya, Ade M. “Indonesia’s Foreign Policy and Multi-Track Regionalism”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 8 (2017): 176.

## PEDOMAN PENULISAN

1. Artikel yang dimuat dalam POLITICA merupakan hasil pemikiran dan hasil penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan dinamika politik dalam dan luar negeri.
2. Naskah yang dikirim adalah karya tulis asli yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran (*font*) 11, spasi 1.15, pada kertas ukuran A4. Panjang tulisan 6000 – 8000 kata. Berkas (*file*) dibuat dengan *Microsoft Word* (.doc). Pengiriman *file* juga dapat dilakukan sebagai *attachment e-mail* ke alamat: [jurnal.politica@yahoo.com](mailto:jurnal.politica@yahoo.com)
4. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Apabila penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat *e-mail* untuk memudahkan komunikasi.
5. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dengan format *esai*. Judul artikel dicetak dengan huruf besar yang dicetak tebal (*bold*) dan dibuat dalam dwi Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Artikel disertai judul pada masing-masing bagian artikel dan tanpa menggunakan nomor/angka pada judul bagian.
6. Tulisan dilengkapi dengan abstrak dan kata kunci dalam dwi Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Abstrak font 9, tidak lebih dari 250 kata.  
Abstrak artikel hasil pemikiran berisi tentang: (a) permasalahan yang diangkat/dikemukakan; (b) pendekatan/teori atau kerangka pemikiran apa yang digunakan untuk melihat/menjelaskan masalah; dan (c) kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan.  
Abstrak artikel hasil penelitian berisi tentang: (a) permasalahan yang diangkat/dikemukakan; (b) pendekatan/teori atau kerangka pemikiran apa yang digunakan untuk melihat/menjelaskan masalah; (c) bagaimana cara mendapatkan data atau metodologi yang digunakan; dan (d) kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan atau temuan/hasil penelitian.
7. Naskah memuat unsur latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, metodologi, teori/kerangka pemikiran/tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup atau simpulan/rekomendasi.
8. Naskah dilengkapi dengan *footnote* dan daftar referensi (daftar pustaka) menggunakan sistem pengutipan *Chicago Manual of Style* (CMS).

Contoh:

### **Buku:**

*Footnote:*

<sup>1</sup> Malcolm Gladwell, *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference* (Boston: Little, Brown, 2000), 64-65.

<sup>2</sup> Gladwell, *Tipping Point*, 71.

Daftar Pustaka:

Gladwell, Malcolm. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Boston: Little, Brown, 2000.

### Artikel dalam jurnal, majalah, dan surat kabar:

#### Footnote:

- <sup>1</sup> Alexandra Bogren, "Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate," *Journal of Gender Studies* 20, no. 2 (Juni 2011): 156.
- <sup>2</sup> Bogren, "Gender and Alcohol," 157.
- <sup>3</sup> Jill Lepore, "Dickens in Eden," *New Yorker*, 29 Agustus 2011, 52.
- <sup>4</sup> Lepore, "Dickens in Eden," 54-55.

#### Daftar Pustaka:

- Bogren, Alexandra. "Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate." *Journal of Gender Studies* 20, no. 2 (Juni 2011): 155-69.
- Lepore, Jill. "Dickens in Eden." *New Yorker*, 29 Agustus 2011.

### Website:

#### Footnote:

- <sup>1</sup> Elisabeth Bumiller and Thom Shanker, "Pentagon Lifts Ban on Women in Combat," *New York Times*, 23 Januari 2013, diakses 24 Januari 2013, <http://www.nytimes.com/2013/01/24/us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html>
- <sup>2</sup> Bumiller and Shanker, "Pentagon Lifts Ban."

#### Daftar Pustaka:

- Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. "Pentagon Lifts Ban on Women in Combat." *New York Times*, 23 Januari 2013. Diakses 24 Januari 2013. <http://www.nytimes.com/2013/01/24/us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html>.

9. Referensi diutamakan berasal dari publikasi 10 tahun terakhir dan memuat referensi yang berasal dari jurnal.